



iNOVASI UNTUK NEGERI  
**nfo indonesia**

EDISI # 64 FEBRUARI 2026

<https://www.infoindonesia.id>



# SIAPAPUN WAPRESNYA PRESIDENNYA TETAP PRABOWO

KINERJA  
KEMENTERIAN  
HAJI DAN UMRAH

BERHARAP  
KINERJA BPJS  
MEMUASKAN

ASN KEMENAG  
SIAP HIJRAH  
KE IKN

RP 55 T  
UNTUK THR  
APARATUR NEGARA



# info indonesia

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

## Network



**INFO PASANG**  
NUR AISAH  
+ 62 815-1157-6312  
**IKLAN**



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA  
JL. Raya Kalibata No. 8  
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781

Email : [redaksi@infoindonesia.id](mailto:redaksi@infoindonesia.id)

[www.infoindonesia.id](http://www.infoindonesia.id)

facebook @infoindonesia.id twitter : @\_infoindonesia

Instagram @info\_indonesia.id

YouTube : infoindonesiatv



#### PEMIMPIN UMUM :

Usman Rizal

#### PEMIMPIN PERUSAHAAN

Nur Aisah

#### PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

#### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rahmad Romli

#### Redaktur Pelaksana

Irmayani

#### REDAKTUR

Nina Erlina, Ega Tri Gustina,  
Nur Khamida, Sukma Mawarni

#### REPORTER

Ari Irgan, Siti Nieke, Agung Prasetya,  
Rizwan Suandi, Hari Priyadi,  
Putri Aridhani

#### DESAIN MEDSOS

Al Amin, M. Fikri, Adam Aulia.

#### TATA LETAK

Sujatmiko

#### KEUANGAN

Atika

#### SEKRETARIS REDAKSI

Nur Aisah

#### PENGEMBANGAN BISNIS

Ega Tri Gustina, Ellisa Mawarni

#### DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

#### BANK ACCOUNT

a/n PT. WAHANA MULTIMEDIA, BCA  
No. Rek 553-041-4321,  
KCP Otista Jakarta Timur

## PENTAS

Pentas ekonomi politik Indonesia sedang menunjukkan salah satu episode termenarik, jika bukan yang paling rumit. Kompleksitas atau kait-mengait adegan juga alur kisahnya akan berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai warga negara secara perorangan, anggota keluarga, hingga sebagai bangsa.

Tapi, kita samakan dulu persepsi mengenai ekonomi politik. Yang paling sederhana, pengertian ekonomi politik adalah bagaimana kekuasaan (politik) dan sumber daya (ekonomi) saling mempengaruhi. Di dunia nyata, keputusan ekonomi jarang sekali murni hanya karena perhitungan atau angka, tanpa kaitan kepentingan politik di belakangkannya. Kepentingan politik pun terbagi menjadi internal (dalam negeri) dan eksternal (geopolitik regional hingga global).

Nah, episode yang masih berlangsung di pentas ekonomi politik Indonesia adalah dinamika pasar modal, atau bursa. Dalam konteks ekonomi politik, pasar modal atau bursa efek bukan sekadar tempat jual-beli saham, melainkan juga instrumen yang mencerminkan kesehatan hubungan antara penguasa, pengusaha, dan publik.

Pasar modal menjadi pentas ekonomi politik nasional, antara lain karena, pertama, menjadi indikator atau petunjuk mengenai kepercayaan terhadap kebijakan (signal policy). Bursa efek lazim bereaksi sangat cepat terhadap keputusan politik. Bukan hanya kebijakan domestik, dalam negeri, melainkan juga geopolitik global.

Kedua, pasar modal menjadi alat ukur atau barometer stabilitas nasional. Bursa saham sering dianggap sebagai organ yang mendeteksi gangguan keamanan atau ketidakstabilan politik sebelum dampaknya terasa ke masyarakat luas. Sedangkan stabilitas politik yang terjaga akan mendorong stabilitas pasar modal, yang pada gilirannya memberikan optimisme ekonomi bagi pemerintah untuk melanjutkan proyek-proyek strategis.

Ketiga, masih dalam sudut pandang ekonomi politik, komposisi emiten (perusahaan) di bursa mencerminkan struktur kekuatan ekonomi negara. Jika bursa didominasi oleh perusahaan perbankan dan energi (seperti di Indonesia), ini mencerminkan bahwa ekonomi nasional masih sangat bergantung pada sektor finansial dan komoditas sumber daya alam.

Namun, tingginya jumlah investor ritel domestik mencatatkan rekor baru pada akhir 2025, berjumlah 20,36 juta Single Investor Identification (SID) per akhir Desember 2025. Angka ini tumbuh sekitar 36-37 persen dibandingkan dengan posisi akhir 2024 dengan peran investor lokal mencapai 99,78 persen. Toh pada titik inilah pasar modal kita terguncang oleh sikap Morgan Stanley Capital International (MSCI) dengan keputusan pembekuan (interim freeze) semua perubahan indeks bagi saham-saham Indonesia. Langkah ini dipicu oleh kekhawatiran serius investor global mengenai transparansi struktur kepemilikan saham dan akurasi data jumlah saham beredar di publik (free float).

Dalam situasi ini, penting untuk memahami pesan Presiden Prabowo Subianto: Fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Di pentas ekonomi politik, kita menyaksikan perbaikan pasar modal juga akan memperkuat fundamental ekonomi: pertumbuhan, pengendalian inflasi, ketahanan eksternal, dan kebijakan fiskal-moneter. ●

#### ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,

Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

● TELP 021-791 96781 ● FAX 021-791 96786

Email : redaksi21pro@gmail.com

Instagram : info\_indonesia.id

Tiktok : infoindonesia.tv

Facebook : infoindonesia. id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH  
PT Wahana Multimedia  
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH  
PT Dua Satu Pro

# DAFTAR ISI

EDISI BULAN FEBRUARI 2026



## 6 INFO UTAMA

Ancang-ancang menuju pemilihan Presiden berikutnya bergulir kian cepat meski momentumnya masih terjadwal pada 2029. Terlalu banyak yang menjadi petunjuk maupun isyaratnya.

## 22 INFO PRIORITAS SUMSEL

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.

## 40 INFO DAERAH

Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat langkah percepatan pembangunan perumahan rakyat melalui sinergi langsung dengan pemerintah pusat.

## 42 INFO TRAVEL

PT Cheria Trip Bahagia (CTB), melalui brand Cheria Holiday, telah menjelma menjadi pelopor wisata halal dunia sejak 2012.



## 64

### INFO MUBA

Satu tahun kepemimpinan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Haji Toha Tohet dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen mencatatkan sejumlah capaian strategis.



## 82

### INFO KEMENTERIAN

Penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya menyangkut aspek ritual, tetapi juga tata kelola, perlindungan jamaah, dan nilai peradaban.



## 94

### INFO KHUSUS

Penetapan awal puasa Ramadan berbeda lagi setelah sebelumnya terjadi beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana menyikapinya?

## 58

### INFO EKONOMI

Keselamatan wisata merupakan pondasi utama dalam membangun ekosistem pariwisata generatif yang berkelanjutan di Indonesia. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang bergantung keamanan dan kenyamanan di lingkungan objek wisata.

- 3 DARI REDAKSI
- 20 OPINI
- 46 INFO KULINER
- 48 INFO WISATA
- 50 INFO KESEHATAN
- 52 INFO OLAH RAGA
- 66 INFO ISTANA
- 68 INFO JABAR
- 70 INFO NASIONAL
- 90 INFO PALEMBANG





NFO UTAMA



# TAHTA 2030

LIMA WAJAH, SATU NASIB BANGSA

## Ancang-ancang menuju pemilihan Presiden berikutnya bergulir kian cepat meski momentumnya masih terjadwal pada 2029. Terlalu banyak yang menjerdi petunjuk maupun isyaratnya.

**S**alah satu yang mencolok adalah ungkapan Presiden Prabowo Subianto dalam taklimat di acara Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026. Di sesi pertama taklimat itu banyak hal yang mengemuka. Namun, ungkapan yang menjadi indikasi anchang-ancang menuju Pilpres 2029 sudah jelas:

"Jadi begini ya: Kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan, 2029 bertarung," kata Prabowo dalam taklimat di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026. Senin, 2 Februari 2026.

Konteks "2029 bertarung" itu pun jelas memenuhi unsur-unsur kajian maupun politik praktis: Menyangkut kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, alokasi sumber daya, konflik dan konsensus, serta eksistensi atau kesinambungan negara. Terlebih lagi, acara yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu, dihadiri oleh 4.011 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan pusat maupun daerah.

Menyimak konteksnya, Presiden Prabowo mengemukakan soal pertarungan 2029 tadi dalam kaitannya dengan kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Antara lain, ia mengemukakan pelaksanaan program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang luas.

"... MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026. Paling lambat. Dengan kondisi sekarang saja, hari ini, MBG telah ada dapur ya, SPPG yang

sudah operasional 22.275 dapur operasional. Dalam proses penilaian dan pengajuan, 13.829. Dengan 22.000 saja, sekarang menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 x 50 orang yang digaji tiap hari," ungkap Prabowo.

Selain tenaga kerja langsung, keberadaan dapur SPPG juga mendorong keterlibatan pemasok bahan pangan di tingkat desa, mulai dari sayuran, telur, ikan, ayam, hingga daging. Setiap dapur diperkirakan melibatkan 10 hingga 20 pemasok, sehingga apabila target 82 juta penerima tercapai, program ini berpotensi menciptakan tiga hingga lima juta lapangan kerja.

Presiden menegaskan kebutuhan

soal suka dan tidak suka tadi, bahwa sikap saling mencela dan menghardik, termasuk aksi-aksi yang berujung pada kerusuhan, tidak akan menghasilkan lapangan kerja maupun membuka pabrik baru. Menurut dia, aksi demonstrasi diperbolehkan sesuai ketentuan hukum. Namun, tindakan yang mengarah pada pembakaran dan kekerasan merupakan perbuatan pidana yang membahayakan bangsa dan negara.

"Demo boleh, tapi dia tidak berharap demo, dia berharap kerusuhan. Dan kerusuhan itu mencelakakan bangsa dan negara. Kerusuhan mencelakakan bangsa dan negara. Bakar-bakar, bom molotov, saya katakan itu membahaya-



rakyat terhadap pekerjaan menjadi salah satu fokus utama pemerintah. "Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang satu juta lapangan kerja. Hanya dari MBG, dan ada tuduhan untuk menjelekkkan kita sebagai bangsa," tandasnya.

Prabowo menyinggung pula, terkait

kan. Itu pidana," ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa sebagian kelompok yang kerap memicu aksi destruktif diduga berada di bawah pengaruh kekuatan asing. Presiden menegaskan seluruh warga negara untuk lebih peduli terhadap kepentingan rakyat dan bangsa, serta menilai capaian pemerintah berdasarkan hasil yang nyata. ●



# PRABOWO (MUNGKIN SAJA) DENGAN ZULHAS

Presiden Prabowo Subianto kian mendapat dukungan untuk maju kembali dalam Pilpres 2029. Dukungan terbaru datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tapi, soal Wakil Presiden pendampingnya, belum tentu Gibran.

**D**ukungan PKB agar Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia selama dua periode atau selama 10 tahun (2024-2029 dan 2029-2034) terungkap usai Ketua Umum PKB A Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

"Kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita. Bukan hanya lima tahun bahkan sepuluh tahun yang akan datang," kata Cak Imin di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

Toh Ketua Umum PKB ini menambahkan, belum ada pembahasan di internal PKB soal calon wakil presiden yang akan didukung pada Pilpres mendatang. "Oh belum dibahas. Belum. Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal dua periode lah," ujar Muhaimin.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kembali menegaskan dukungannya kepada pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2029. "Kan sudah saya sampaikan Prabowo-Gibran dua periode," kata Jokowi kepada wartawan di kediaman

pribadinya di Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 30 Januari 2026

Jokowi menyangkal berbagai spekulasi yang menyebut Gibran, putra sulungnya, berpeluang maju sebagai calon presiden pada 2029. Ia menepis sekaligus isu yang menyatakan Prabowo

yang penting: Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau Capres silakan, kalau Wapres kita bicara. Iya kan, kita bicara gitu? Jadi lihat kekuatan kita seperti ini. Yang terlihat saja saudara saksikan," ungkap Zulhas dalam acara 'Halalbihalal dan Pengumuman Susunan Kepengurusan

DPP PAN' di Rumah DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu, 20 April 2025.

Zulhas tidak memperlakukan masalahnya apabila ada kader PAN yang berkeinginan mendampingi Prabowo sebagai cawapres pada Pilpres 2029. Di hadapan para pengurus, Zulhas mengatakan lebih mementingkan perolehan suara PAN di pemilu mendatang dibandingkan dengan keinginannya maju mendampingi Prabowo. "Ketua umum yang penting (suara) PAN itu naik, itu yang paling penting. Yang lain silahkan, bisa berlomba," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Zulhas menyinggung pula hubungan koalisi antara PAN dan Partai Gerindra yang didirikan Prabowo sudah berjalan selama 15 tahun. Bahkan dia menyebut hubungan PAN dengan Partai Gerindra sebagai koalisi sejati.

"PAN dan Gerindra ini koalisi sejati, 15 tahun bagaimana?

Baru ini kita menang, kan? Kalau berjuang 15 tahun, ya berjuang lagi, nanti sampai terus berhasil pembangunannya 15 tahun lagi. Bila perlu sampai 2045," sambungnya.

Tapi, soal Capres-Cawapres, semua sudah mafhum (paham) bahwa yang dicalonkan lazimnya adalah Ketua Umum Partai. Apakah Zulhas sebagai Ketua Umum PAN akan menjadi pasangan Prabowo dalam Pilpres 2029? Masih ada dinamika politik dan beberapa hal bi halal lagi sebelum momentum Pilpres 2029 tiba. ●



dan Gibran akan berpisah atau malahan saling berhadapan dalam kontestasi Pilpres berikutnya. "Sudah, itu saja," ujar Jokowi menegaskan kembali komitmennya terhadap kesinambungan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2029 mendatang.

Tapi, soal Gibran akan berpisah dengan Prabowo pada Pilpres 2029 sudah mengemuka sejak awal 2025. Salah satunya datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Saya sampaikan kepada Pak Prabowo



# PASANGAN GIBRAN - BAHILIL BUKAN GIBAH

Belum ada kepastian apakah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkesinambungan dalam Pilpres 2029. Dinamika politik akan menentukan pada saatnya.

**T**oh pengamat politik Rocky Gerung sudah memprediksi duet Prabowo-Gibran tidak akan berlanjut pada Pilpres 2029. "Dalam proyeksi ke 2029, kalangan Gerindra pasti sudah lengkap bersiap atau Pak Prabowo dua periode, tetapi wakil presidennya pasti bukan Gibran. Itu sudah pastilah," ujarnya, melalui kanal YouTube Rocky Gerung official pada Oktober 2025.

Nah, jika Prabowo dan Gibran sama-sama maju sebagai Capres 2029, siapa kandidat cawapres masing-masing? Di media sosial sempat muncul kemungkinan pasangan Gibran dengan Bahlil Lahadiala yang juga Ketua Umum Partai Golkar. Secara berkelakar, di media sosial pula, pasangan Gibran-Bahlil dapat disingkat menjadi Gibah, mirip-mirip ghibah dalam bahasa Arab yang padanannya adalah bergunjing atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya.

Namun, tentu saja pasangan Gibran-Bahlil bukan gibah atau ghibah. Keduanya memiliki rekam jejak politik sebagaimana jabatannya sekarang: Gibran menjabat Wapres di pemerintahan Presiden Prabowo. Sedangkan Bahlil, selain Ketua Umum Partai Golkar, juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yang juga menarik, Rocky Gerung pernah mengemukakan bahwa model kepemimpinan Gibran dan Bahlil akan mendominasi politik sampai Pilpres 2029. Menurut dia, figur seperti Gibran (sebagai Wapres) dan Bahlil (sebagai menteri strategis dan tokoh partai) akan mendominasi politik nasional karena kurangnya figur alternatif yang mampu mengimbangi kekuatan mereka.

"Jadi kalau kita lihat dari posisi hari ini tidak ada lagi figur politik alternatif untuk diinvestasikan di dalam sistem rekrutmen politik kita menuju 2029. Dengan kata lain model kepemimpinan macam Gibran macam Bahlil itu yang akan mendominasi politik lima tahun ke depan," ungkapnya.

Akan halnya Bahlil, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia pernah menegaskan partainya telah memutuskan men-

pai 603.500 barel per hari (bph), sedikit melampaui target APBN 603.000 bph. Pada APBN 2026, target lifting minyak naik menjadi 610.000 bph.

Untuk sumber daya mineral, pemerintah berencana melakukan pemangkasan produksi pada komoditas strategis melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Antara lain, produksi batu bara diproyeksikan turun menjadi sekitar 600 juta ton dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan nikel akan ada penyesuaian kuota produksi yang mempertimbangkan dinamika harga pasar global agar hilirisasi nikel tetap berkeadilan dan memiliki nilai tambah tinggi.

Tambahan pula, pemerintah memiliki program ketahanan energi biodiesel dan bioetanol dengan kesinambungan program bahan bakar nabati menjadi



dukung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. "Kami di Munas Golkar itu sudah memutuskan. Munas itu forum keputusan tertinggi, telah memutuskan bahwa mendukung Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran," ujarnya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Agustus 2025.

Sedangkan sebagai Menteri ESDM, Bahlil juga mengemban berbagai tugas serius semisal lifting (produksi siap jual) minyak. Per 2025, lifting minyak menca-

prioritas untuk menekan impor energi. Salah satu implementasinya adalah menggenjot bauran energi baru dan terbarukan (EBT) setelah mencatatkan angka 15,75 persen pada 2025 menjadi 17 persen pada 2026.

Sedangkan di sisi politik, dinamika awal 2026 masih menempatkan Bahlil sebagai operator politik utama dan penggerak mesin Partai Golkar untuk mengamankan posisi Gibran di masa depan, baik sebagai pendamping Prabowo lagi maupun dalam skenario kepemimpinan baru. ●



# AHY-KHOFIFAH: KELANJUTAN NASIONALIS-RELIGIUS

Pilpres 2029 masih beberapa tahun lagi. Di samping itu, aturan main atau Undang-Undang Pemilu dan Pilpres masih dalam proses perubahan. Sedangkan dinamika politik nasional yang terus bergulir masih sarat dengan konsolidasi pemerintahan Prabowo-Gibran. termasuk sinyal kuat dukungan untuk Presiden Prabowo Subianto melanjutkan pemerintahan pada 2029.

**A**papun, tetap layak mendiskusikan potensi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan di pemerintahan Prabowo-Gibran, di Kabinet Merah Putih, menjadi salah satu Capres pada Pilpres 2029. Malah Presiden Prabowo Subianto yang berpidato dalam penutupan Kongres VI Partai Demokrat pada Selasa malam, 25 Februari 2025 sempat melontarkan potensi AHY sebagai Capres masa depan.

"Ada Presiden SBY, siapa tahu ada Presiden AHY. Saya enggak tahu," ujar Prabowo saat itu.

Kader Demokrat langsung riuh bertepuk tangan setelah itu. Prabowo kemudian melihat AHY dan Wapres

Gibran Rakabuming Raka yang kala itu duduk berdampingan.

"Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang ini. Enggak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3. lya kan?" ujar Presiden Prabowo.

Nah, jika AHY Capres, siapa Cawapresnya? Salah satu kandidat Cawapresnya adalah Khofifah Indar Parawansa, petahana Gubernur Jawa Timur yang dalam periode kedua jabatannya. Alasan yang melandasi potensi AHY-Khofifah berpasangan dalam Pilpres 2029 antara lain adalah kedekatan historis dan rekam jejak koalisi: Partai Demokrat adalah pengusung utama Khofifah dalam Pilgub Jawa Timur. Chemistry (kecocokan) politik yang sudah terbangun lama antara Demokrat dan Khofifah memudahkan penjajakan

koalisi di masa depan

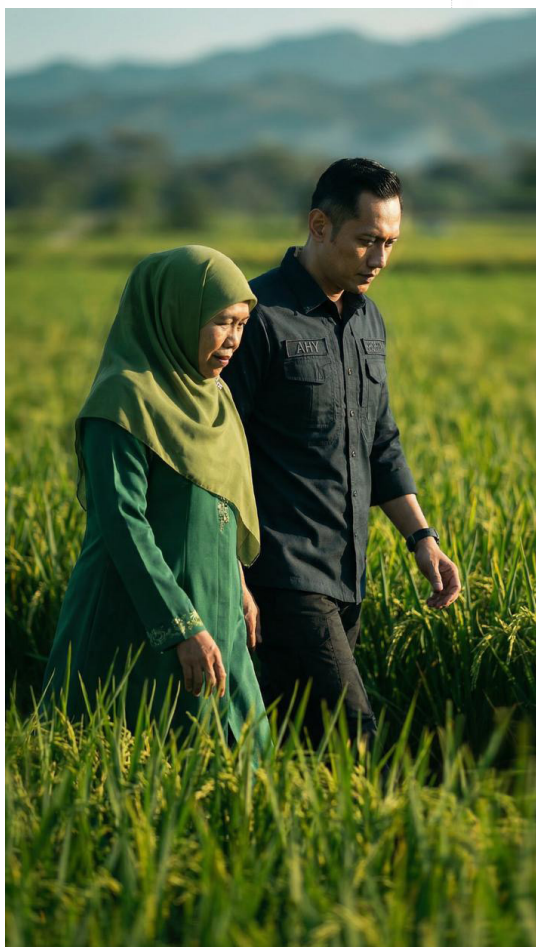
Selain itu, meski AHY menyatakan dukungan pada Prabowo, spekulasi pengamat sering menempatkan Ketua Umum Partai Demokrat ini sebagai figur yang dapat naik daun atau menjadi bintang yang bersinar (rising star) jika peta politik berubah menjelang Pilpres 2029. Pada sisi lain, AHY memerlukan pasangan dengan basis massa kuat yang melekat pada Khofifah sebagai salah satu representasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Jawa Timur.

Salah satu penopang kekuatan AHY jika berpasangan dengan Khofifah adalah kombinasi geografis dan basis massa. Pasangan ini menyatukan basis suara nasional-religius. Khofifah memiliki akar rumput yang sangat kuat di Jawa Timur Muslimat dan NU, sementara AHY memiliki basis pemilih Demokrat yang solid di berbagai daerah dan basis nasionalis.

Pengalaman Eksekutif dan Pemerintahan juga mendukung: AHY sebagai Menteri ATR/BPN (Koalisi Indonesia Maju) mencerminkan rekam jejak di pemerintahan pusat. Sedangkan Khofifah adalah Gubernur Jawa Timur dua periode dengan rekam jejak kepemimpinan yang teruji.

Ringkasnya, duet AHY-Khofifah memiliki potensi besar sebagai pasangan "Nasionalis-Religius" yang seimbang, menggabungkan pemilih muda nasionalis dan akar rumput NU. Keunggulan utamanya adalah kombinasi pengalaman eksekutif di pusat (AHY) dan basis massa kuat di Jatim (Khofifah).

Namun, mereka harus menghadapi persaingan ketat di internal koalisi pemerintahan dan memastikan basis suara di luar Jawa solid mendukungnya. Toh Pilpres 2029 masih beberapa tahun lagi. ●





# ANIES-MAHFUD: PERNAH TARIK-MENARIK

Pasangan Anies Rasyid Baswedan dan Mahfud MD pernah menjadi wacana menjelang Pilpres 2024, meski akhirnya tak terwujud. Bagaimana pada Pilpres 2029?

Sebagai kilas balik, menjelang Pilpres 2024, sebelum resmi berpasangan dengan Ganjar Pranowo, Mahfud MD secara terbuka mengakui telah ditawarkan menjadi cawapres Anies Baswedan melalui Presiden PKS Ahmad Syaikh. Namun, Mahfud menolak tawaran itu dengan alasan menjaga agar Koalisi Perubahan tetap solid.

Pengakuan itu disampaikan Mahfud yang kala itu menjabat Menko Polhukam merangkap Pelaksana Tugas Menkominfo usai rapat kerja Kemenkominfo dengan Komisi I DPR RI, Senin, 5 Juni 2023.

"Saya sampaikan juga kepada Ketum PKS Pak Syaikh ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak (Mahfud) menjadi cawapres Anies. Jangan saya, nanti malah pecah. Anies kalau koalisinya nggak setuju malah Aniesnya ndak dapat tiket kalau partainya keluar satu," ungkapnya kala itu.

Menurut Mahfud, jika kehadirannya berpotensi memicu Partai Demokrat keluar dari koalisi jika AHY tidak dipilih, yang berisiko membuat Anies gagal mendapatkan tiket pencapresan. Toh akhirnya dalam Pilpres 2024 yang maju sebagai pasangan Capres Anies adalah Cawapres A Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Pasangan Anies-Muhaimin berada di bawah panji Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), terdiri dari Partai Nas-

Dem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan dukungan tambahan dari Partai Ummah, didukung total 26,95 persen suara nasional pada pemilu 2019. Se-

tuk menyimak dinamikanya. Toh Anies dan Mahfud sudah memiliki rekam jejak panjang sebagai figur intelektual dan teknokrat. Baik Anies maupun Mahfud berlatar belakang akademik dan birokrasi.

Sementara Anies dikenal dengan visi transformasinya, Mahfud MD adalah pakar hukum yang tegas dalam isu keadilan.

Kekuatan lain, elektabilitas Anies dianggap stabil sehingga tetap menjadi salah satu penantang utama untuk 2029 dengan tingkat keterpilihan yang relatif tinggi berhadapan dengan petahana. Antara lain, Partai Gerakan Rakyat yang sudah terbentuk dan mengusung Anies sebagai Capres pada Pilpres 2029. Sedangkan Mahfud MD memiliki citra kuat dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, yang dapat melengkapi narasi perubahan yang sering dibawa Anies. Toh kontroversi politik identitas



dalam Pilkada DKI pada 2017 masih berpotensi melekat pada Anies Baswedan. Namun, dinamika dan peta politik menjelang Pilpres 2029 masih dapat berubah sebagaimana yang terjadi menjelang Pilpres 2024. Banyak yang akan terjadi pada tahun ini dan selanjutnya. Kita akan bersama-sama menyikaminya dengan seksama. ●

mula koalisi ini terdiri dari NasDem, PKS, dan Demokrat. Namun, Partai Demokrat keluar pada 1 September 2023 setelah PKB masuk dan membentuk pasangan Anies-Muhaimin sebagai Capres-Cawapres yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada 19 Oktober 2023.



# PUAN-GUS IMIN: AKANKAH PENJAJAKAN BERULANG?

Penjajakan memasangkan Puan Maharani dan Abdul Muhaimin Iskandar pernah terjadi menjelang Pilpres 2024. Bagaimana pada Pilpres 2029?

dalam Pilpres 2024, namun berpasangan dengan Capres Anies Rasyid Baswedan.

Menanggapi pasangan Anies-Cak Imin, Puan mengucapkan selamat secara resmi. "Saya ucapkan selamat kepada pasangan Mas Anies dan Cak Imin yang sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden," kata Puan di Benteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 2 Agustus 2023.

Nah, bagaimana kemungkinan pasangan Puan-Cak Imin maju dalam Pilpres 2029. Sinyal awal menunjukkan justru PKB mendukung Presiden petahana Prabowo Subianto untuk melanjutkan pemerintahan pada 2029.

Meski demikian, layak dicatat bahwa Puan dan Cak Imin tetap berpotensi menjadi pasangan Capres-Cawapres karena keduanya memiliki basis pemilih yang kuat. Duet ini merepresentasikan perpaduan basis massa nasionalis PDI

Perjuangan dan basis religius tradisional dari PKB.

Di samping itu, keduanya memiliki infrastruktur politik yang menunjang. Sebagai Ketua DPR RI dan Ketua DPP PDIP, Puan memiliki kontrol kuat atas struktur partai, sedangkan Cak Imin saat ini menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat di kabinet Prabowo, memiliki akses langsung ke kebijakan publik yang menyentuh akar rumput. Kekuatan lainnya, adalah logistik dan jaringan. Kedua figur didukung oleh partai dengan pendanaan mandiri yang kuat dan jaringan organisasi otonom yang sanggup menjangkau tingkat desa.

Namun, dengan segenap kekuatan, dan juga kelemahannya, apakah Puan-Cak Imin akan muncul sebagai pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2029? Masih terlalu dini untuk menjawabnya.

Dinamika yang menyusun peta politik menjelang Pilpres 2029 akan terus berlangsung. Masih memerlukan waktu untuk melihat hasil akhirnya. ●

**M**alah penjajakan itu terjadi pada September 2022, masih dua tahun sebelum pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir. Dalam pertemuan di Warung Pecel, seberang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, PKB secara terbuka menawarkan opsi duet ini sebagai perwakilan koalisi Nasionalis-Religius.

Kala itu Puan Maharani pun mengemukakan sinyal positif. "Pertemuan ini spesial, bukan hanya karena Cak Imin juga lagi berulang tahun, tapi pertemuan ini merupakan suatu momentum bahwa kami menyepakati ke depannya akan mencoba mencari kebersamaan yang sama sehingga memang bisa membangun bangsa dan negara bersama-sama," ungkapnya.

Terungkap pula Cak Imin mengemukakan "minimal menjadi Cawapres." Toh dinamika politik sesudahnya, masih menjelang Pilpres 2024, mengubah peta politik. Alhasil, Muhaimin memang menjadi Cawapres





# SIAPAPUN WAPRESNYA PRABOWO TETAP PRESIDENNYA

Meninggalkan Indonesia dari Bandara Halim Perdanakusuma, Presiden Prabowo Subianto menuju Amerika Serikat pada pertengahan Februari 2026. Perjalanan ke luar negeri kali ini beriringan dengan penguatan legitimasi politiknya di dalam negeri.

Dalam konteks politik domestik, legitimasi dapat bermakna pengakuan, penerimaan, dan dukungan terhadap kebijakan atau langkah untuk memegang serta menjalankan kekuasaan.

Berbeda dengan legalitas yang hanya berfokus pada kesesuaian tindakan pemerintah dengan hukum tertulis, legitimasi lebih menekankan pada aspek moral dan keyakinan publik bahwa otoritas tersebut memang layak untuk dipatuhi.

Tanpa legitimasi, pemerintahan cenderung mengandalkan paksaan atau kekerasan untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebaliknya, legitimasi yang kuat memungkinkan pemerintahan berjalan dengan stabil karena kebijakan-kebijakannya dipatuhi secara sukarela

oleh warga negara.

Nah, peningkatan legitimasi politik Prabowo itu datang dari arus bawah maupun kalangan elite. Dari kalangan warga secara umum, tanda-tanda penguatan legitimasi itu datang misalnya dari hasil survei nasional terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia. Hasil survei Indikator menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tercatat hampir 80 persen, tepatnya sebanyak 79,9 persen responden puas dengan kinerja 17 bulan selama Prabowo memimpin.

"Sangat tinggi untuk ukuran approval rating seorang Presiden," kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Prof. Burhanuddin Muhtadi saat merilis survei di Jakarta, Minggu, 8 Februari 2026. Menurut dia, rating mendekati 80 persen itu tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan dua presiden sebelumnya: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi), saat pertama kali memimpin.

Sedangkan legitimasi dari elite politik datang dari sejumlah Ketua Umum Partai Politik yang mendukung Prabowo Subianto untuk melanjutkan pemerintahan pada periode kedua setelah masa pemerintahan 2024-2029. Dukungan datang mulai dari Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Golkar, hingga Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, sebagai catatan juga, dukungan partai-partai politik koalisi pemerintahan tadi belum atau tidak menegaskan kesinambungan Prabowo-Gibran.

Dalam pandangan pengamat politik Adi Prayitno dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tampak jelas partai-partai pendukung Prabowo itu memiliki kepentingan jagoannya masing-masing dapat menjadi Cawapres pada 2029. "Seluruh partai politik sampai hari ini, belum sepakat akan kembali mendukung Gibran untuk disandingkan dengan Prabowo," kata Adi di saluran Youtube resminya, Kamis, 12 Februari 2025.

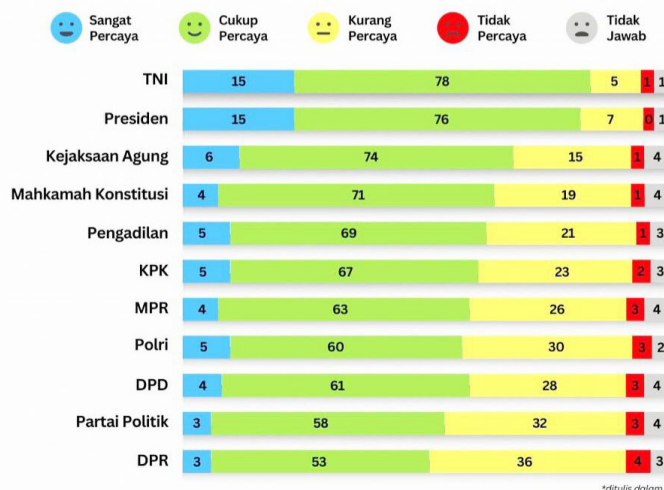
Ia mencontohkan, baru PAN melalui elite partainya, yakni Eddy Soeparno yang ingin Zulkifli Hasan alias Zulhas menjadi Cawapres pendamping Prabowo. "Internal partai-partai politik ini, pasti sudah memiliki jagoan siapa yang akan didorong menjadi pendamping Pak Prabowo," ucapnya.

Jadi, untuk sementara ini, siapapun cawapresnya, Prabowo tetap Presiden-nya. Termasuk juga Wapres Petahana Gibran Rakabuming Raka. Dinamika politik domestik ini beriringan dengan perjalanan Prabowo ke Amerika Serikat terkait urusan Board of Peace, penanganan warga Palestina di Gaza, juga perjanjian dagang Indonesia-AS. Urusan ini juga akhirnya akan berdampak pada legitimasi Prabowo di dalam negeri. ●



## Survei: 79,9% Masyarakat Puas dengan Kinerja Presiden Prabowo

Sumber Data: Indikator Politik Indonesia



# MBG SEBAGAI KAMBING HITAM

Akhir-akhir ini kita menemukan satu penemuan ilmiah baru dalam tata kelola negara: apa pun masalahnya, jawabannya adalah MBG. Sebelas juta kartu BPJS dinonaktifkan? Pasti karena MBG. Dana pendidikan seret? MBG lagi. Anak tak mampu beli buku? Tentu saja MBG.

Besok kalau hujan tak turun dan sawah re-tak, mungkin juga karena MBG terlalu banyak menyerap anggaran awan.

Bangsa ini tampaknya memiliki bakat luar biasa dalam menyederhanakan persoalan rumit menjadi satu nama yang mudah dibenci. Dan kebetulan, MBG sedang menjadi selebritas kebijakan. Ia besar, mahal, terlihat, dan politis. Sempurna untuk dijadikan sasaran tembak.

Padaahal, anggaran negara bukan celengan plastik yang kalau diisi satu sisi, sisi lain otomatis bolong. APBN adalah struktur kompleks dengan kewajiban hukum, belanja wajib, transfer daerah, pembayaran utang, subsidi energi, dan fluktuasi penerimaan yang tak pernah romantis.

Tetapi menjelaskan kompleksitas memang melelahkan. Jauh lebih praktis menunjuk satu program dan berkata: "Itu dia biang keroknya."

Logika semacam ini terdengar gagah di media sosial, tetapi ringkih di meja analisis.

Apakah MBG tanpa masalah? Tentu tidak. Program sebesar itu selalu mengandung risiko: pembengkakan anggaran, distribusi yang tak merata, potensi kebocoran, bahkan politisasi.

Mengkritik MBG adalah hak, bahkan kewajiban warga negara. Tetapi mengaitkan setiap kebijakan yang tidak populer dengan MBG adalah bentuk kemalasan intelektual.

Jika ada penonaktifan BPJS, apakah sudah dibedah apakah itu hasil verifikasi data, pembersihan peserta tidak aktif, atau problem defisit iuran yang sudah lama menghantui sistem jaminan kesehatan? Atau lebih mudah mengatakan: "Itu karena MBG menyedot dana?"

Jika ada anak yang putus asa karena persoalan pendidikan, apakah kita berani memeriksa tata kelola daerah, distribusi dana, atau prioritas belanja lain? Atau kita cukup puas dengan satu terdakwa tunggal bernama MBG?

Kita seperti penonton sepak bola yang setiap kali tim kalah,



SUPRIYANTO MARTOSUWITO

menyalahkan satu pemain, padahal permainan buruk adalah hasil dari taktik, koordinasi, stamina, dan strategi yang lebih luas.

Di banyak negara, program makan bergizi di sekolah bukanlah keanehan. Ia dipandang sebagai investasi jangka panjang: menekan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, mengurangi beban keluarga miskin, dan menciptakan efek ekonomi lokal. Apakah selalu sukses? Tidak. Apakah harus diawasi? Sangat.

Tetapi tak ada satu pun negara waras yang menyimpulkan bahwa setiap problem fiskal otomatis berasal dari program makan anak sekolah.

Yang sedang kita saksikan bukan sekadar perdebatan anggaran, melainkan fenomena politik kambing hitam. Publik yang frustrasi membutuhkan simbol untuk kemarahan mereka. Dan MBG, dengan label harga yang besar, sangat cocok untuk itu.

Ironisnya, ketika semua kesalahan ditimpakan pada satu program, justru pengawasan struktural melemah.

Pemerintah bisa saja bersembunyi di balik narasi tunggal itu. Karena publik berhenti bertanya lebih dalam. Semua sudah selesai dengan satu kesimpulan instan.

Padaahal demokrasi menuntut ketelitian, bukan sekadar kemarahan.



Anda boleh skeptis pada MBG. Anda boleh menuntut audit ketat. Anda boleh mempertanyakan efektivitasnya. Tetapi jika setiap persoalan negara — dari BPJS hingga buku sekolah — disederhanakan menjadi "gara-gara MBG", maka yang sesungguhnya sedang kita pertontonkan adalah kemiskinan nalar.

Dan bangsa yang gemar mencari kambing hitam biasanya bukan bangsa yang kekurangan masalah. Ia hanya kekurangan kesabaran untuk berpikir.

Mungkin yang perlu kita evaluasi bukan hanya MBG, tetapi juga kebiasaan kita sendiri: terlalu cepat menyimpulkan, terlalu malas menelusuri, terlalu senang menemukan satu nama untuk semua dosa.

Karena kalau semua salah adalah MBG, maka kita tak perlu lagi belajar tentang anggaran, kebijakan publik, atau tata kelola negara. Cukup satu mantra: salahkan MBG. Praktis. Ringkas. Dan tragis. ●

# ANATOMI KRISIS GARUDA: MENGURAI SKANDAL PENGADAAN PESAWAT HINGGA JERAT UTANG RP 140 TRILIUN

**M**egaskandal tata kelola yang membelit maskapai pembawa bendera nasional, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, tercatat sebagai salah satu krisis korporasi terburuk dalam sejarah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Puncak dari krisis ini tergambar pada gunung utang yang sempat menembus kisaran Rp 140 triliun (sekitar US\$9,8 miliar), sebuah beban masif yang membawa perusahaan nyaris runtuh.

Meski angka utang tersebut sangat fantastis, penelusuran fakta menunjukkan bahwa krisis ini merupakan akumulasi dari praktik koruptif masa lalu yang berbenturan langsung dengan krisis eksternal serta keterlibatan aktor swasta yang sering kali luput dari sorotan.

## Akar Masalah: Skandal Suap dan Kontrak Irasional

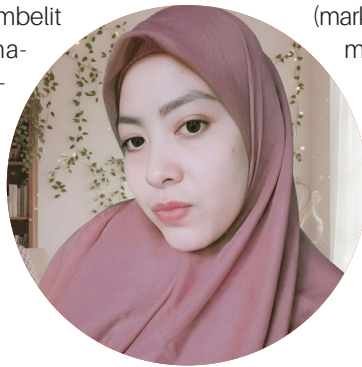
Fakta hukum membuktikan bahwa mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, terlibat dalam pusaran suap dan pencucian uang lintas negara. Skandal pengadaan ini melibatkan raksasa aviasi global dan berdampak langsung pada penandatanganan kontrak sewa pesawat (leasing) dengan harga yang terlampaui jauh di atas standar kewajaran industri internasional.

Selain harga yang ditekan tidak wajar, pengadaan armada yang agresif memicu kompleksitas tipe pesawat. Garuda dipaksa mengelola ragam armada yang berbeda (seperti Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600), yang memicu pembengkakan eksponensial pada biaya perawatan, logistik suku cadang, hingga pelatihan kru.

## Sisi Gelap: Swasta yang "Tak Tersentuh" dan Peran Perantara

Sering kali dalam narasi kebangkrutan BUMN, sorotan tajam hanya tertuju pada direksi yang mendekam di penjara. Namun, terdapat lapisan pemain swasta yang sering kali tetap "tak tersentuh" di balik layar. Dalam kasus Garuda, terungkap peran sentral perusahaan perantara (intermediary) yang menjadi jembatan aliran dana antara pabrik pesawat global dengan pejabat BUMN.

Modus operandi ini menggunakan perusahaan cangkang di yurisdiksi luar negeri untuk menyamarkan asal-usul dana. Pihak swasta penyedia jasa atau vendor sering kali berlindung di balik kontrak bisnis-ke-bisnis (B2B) yang secara legal sulit dibatalkan, meskipun di dalamnya terdapat penggelembungan harga



OLEH LHYNAA MARLINA

(mark-up). Akibatnya, sementara BUMN berdarah-darah membayar cicilan utang yang mencekik, entitas swasta pengatur skema ini sering kali telah lebih dulu mengamankan keuntungan besar dan sulit dijangkau oleh yurisdiksi hukum domestik secara utuh.

## Efek Domino Operasional dan Hantaman Pandemi

Kombinasi harga sewa pesawat yang irasional menciptakan beban tetap yang mencekik arus kas perusahaan. Utang Garuda akhirnya meledak dan menyentuh angka Rp 140 triliun saat pandemi

COVID-19 melumpuhkan mobilitas global. Ketika pendapatan terjun bebas, kewajiban pembayaran dari kontrak sewa peningkatan manajemen lama tetap berjalan tanpa ampun. Kondisi inilah yang mengeskalasi angka utang ke tingkat fatal sebelum akhirnya dilakukan restrukturisasi melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2022.

## Jerat Hukum dan Ujian Ne Bis In Idem

Rentetan skandal ini merembet panjang di ranah hukum. Setelah divonis 8 tahun penjara dalam kasus pertama terkait suap

mesin Rolls-Royce, Emirsyah Satar kembali dijatuhi hukuman dalam kasus kedua terkait pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600. Pada tingkat banding, majelis hakim memperberat hukuman menjadi 10 tahun penjara, ditambah kewajiban membayar uang pengganti ratusan miliar rupiah.

Namun, drama hukum memasuki babak baru pada awal 2026. Emirsyah resmi mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan dalih asas ne bis in idem—berargumen bahwa ia tidak boleh diadili dua kali untuk objek perkara yang dianggapnya tumpang tindih.

Pakar hukum pidana menilai manuver ini sebagai ujian besar bagi Mahkamah Agung. "Persoalannya bukan hanya soal menghukum individu, tapi bagaimana membuktikan peran aktor swasta dan korporasi di baliknya. Jika hukum hanya berhenti di direksi BUMN tanpa menyentuh korporasi swasta yang diuntungkan,

maka keadilan bagi negara belum sepenuhnya tegak," pungkask pakar hukum tersebut.

Krisis Garuda menjadi pengingat pahit bahwa kegagalan integritas di tingkat puncak, yang berkelindan dengan cerdiknyanya pemain swasta dalam memanfaatkan celah sistem, dapat melumpuhkan aset negara yang paling berharga sekalipun. ●





# SUMSEL SIAP PERKUAT IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor. Untuk itu ia meminta agar jangan ada visi daerah yang berbeda dengan Presiden.

**R**akornas bertema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045" tersebut dihadiri para kepala daerah se-Indonesia, termasuk Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Cik Ujang serta Bupati dan Wali Kota.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melaporkan bahwa Rakornas kali ini mencatatkan kehadiran sebanyak 4.011 peserta. Untuk pertama kalinya, atas perintah langsung Presiden, seluruh wakil kepala daerah turut dihadirkan bersama para gubernur, bupati, walikota serta jajaran pimpinan DPRD dan Forkopimda se-Indonesia.

Mendagri menekankan bahwa Rakornas ini bertujuan menciptakan ke-

samaan gerak untuk mengoptimalkan program strategis nasional tahun 2026, mencakup kebijakan ekonomi, ketahanan pangan, hingga penegakan hukum.

Sementara dalam arahnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pemimpin daerah untuk memahami sejarah panjang Nusantara yang kerap diintervensi karena kekayaan sumber daya alamnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia ser-

ing dianggap sebagai "bangsa yang tidak mungkin" (impossible nation) oleh dunia luar karena keragamannya, namun kearifan lokal serta karakter rakyat yang harmonis menjadi kekuatan utama persatuan.

Presiden juga menuntut integritas dari para pemimpin daerah. "Rakyat mendambakan pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan sege-lintir orang," tegas Presiden di hadapan



ribuan pejabat.

Pada kesempatan itu juga Presiden memberikan instruksi tegas terkait efisiensi anggaran. Beliau meminta seluruh kepala daerah menghentikan acara yang tidak produktif.

Presiden menekankan bahwa tidak boleh ada lagi visi daerah yang bertabrakan dengan visi pusat. Beliau telah memerintahkan untuk mengawasi ketat setiap penggunaan anggaran guna memastikan program swasembada pangan dan energi berjalan tanpa hambatan.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI itu menjadi momentum penting dalam memperkuat harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kepala daerah merupakan pelayan rakyat yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Menurut Presiden, rakyat Indonesia mendambakan pemimpin yang jujur, adil, dan sungguh-sungguh memperjuangkan kesejahteraan rakyat.

Ia mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat merupakan amanah besar yang harus dijaga dengan kerja nyata dan integritas tinggi.

Presiden juga menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

### Siap Jalankan Program Strategis

Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik arahan Presiden tersebut. Ia menyebut, pesan yang disampaikan menjadi penguat komitmen kepala daerah untuk terus bekerja optimal.

Menurutnya, Rakornas ini memberikan banyak wawasan terkait tata kelola pemerintahan serta strategi implementasi program prioritas nasional di daerah.

Herman Deru menegaskan bahwa Sumsel siap memperkuat pelaksanaan program strategis Presiden dan Wakil Presiden di tingkat daerah.

Ia menilai, kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah akan mempercepat pencapaian target pembangunan na-



“Pengarahan Presiden dan Wakil Presiden menjadi bekal penting bagi kami untuk memastikan program nasional berjalan efektif di Sumsel”



sional.

“Pengarahan Presiden dan Wakil Presiden menjadi bekal penting bagi kami untuk memastikan program nasional berjalan efektif di Sumsel,” ujarnya.

Dengan sinergi yang kuat, Herman Deru optimistis Sumsel dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. ● ADV

# HEALTH TOURISM 2026, INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN DAN PARIWISATA

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi melaunching Sumsel Health Tourism (SHT) 2026 sebagai langkah strategis mengintegrasikan layanan kesehatan dengan sektor pariwisata daerah.

Peresmian dilakukan langsung Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang di halaman Griya Agung Palembang.

Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa pencanangan Sumsel Health Tourism menjadi tonggak penting transformasi pelayanan kesehatan di Sumsel. Program ini, menurutnya, merupakan evolusi dari sistem layanan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada promotif dan preventif yang terintegrasi dengan potensi wisata.

"Ini adalah cita-cita besar yang sudah lama kita rancang. Sumsel memiliki infrastruktur kesehatan yang memadai serta SDM kesehatan yang sangat kompeten. Launching ini adalah pernyataan bahwa kita siap berevolusi," ujar Herman Deru.

Ia menjelaskan, keberhasilan health tourism sangat ditentukan oleh kesiapan mental dan profesionalisme seluruh pemangku kepentingan, baik tenaga kesehatan maupun sektor pendukung lainnya. Kepercayaan masyarakat, kata dia, menjadi kunci utama.

"Orang harus yakin siapa dokternya,

bagaimana pelayanannya, dan seperti apa fasilitasnya. Layanan harus profesional sekaligus ramah," tegasnya.

Herman Deru juga menyoroti persaingan global di bidang pelayanan kesehatan, khususnya dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Ia optimistis Sumsel mampu bersaing karena kualitas tenaga kesehatannya telah diakui hingga mancanegara.

"Banyak tenaga kesehatan kita bekerja di luar negeri. Artinya kualitas kita diakui. Tinggal bagaimana kita berani mempromosikan dan transparan terhadap layanan yang ada," katanya.

Menurutnya, health tourism bukan sekadar program kesehatan, melainkan bagian dari penguatan ekosistem ekonomi daerah.

Sektor perhotelan, transportasi, biro perjalanan, hingga UMKM harus terlibat aktif.

"Mulai sekarang,

ketika mempromosikan destinasi wisata, sertakan juga informasi layanan kesehatan. Ini menjadi nilai tambah bagi wisatawan," imbuhnya.

Sementara Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Dr. Apriyadi, menyampaikan bahwa SHT sejalan dengan visi RPJMD Sumsel 2025-2029 yakni Sumsel Maju untuk Semua.

Ia menambahkan, latar belakang pengembangan SHT adalah tingginya angka masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Sumsel, lanjutnya, harus menjadi alternatif layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

"Ini deklarasi awal pengembangan health tourism yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujar Apriyadi.

Raih Penghargaan UHC Nasional 2026

Pemprov Sumsel kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dalam bidang pelayanan kesehatan dengan dianugerahi Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Prata-ma.

Orang harus yakin siapa dokternya, bagaimana pelayanannya, dan seperti apa fasilitasnya. Layanan harus profesional sekaligus ramah"





Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr H. Abdul Muhaimin Iskandar kepada Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dr. H. Trisnawarman di Jakarta.

Atas pencapaian tersebut, Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur serta apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari konsistensi pelaksanaan program Sumsel Berkat (Berobat Pakai KTP) yang telah dicanangkan sejak tahun 2023.

"Alhamdulillah, program Sumsel Berkat yang memfasilitasi masyarakat berobat cukup dengan menunjukkan KTP kini mendapatkan apresiasi tinggi di tingkat nasional. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mencapai target Universal Health Coverage secara konsisten," ujar Herman Deru.

Ia menjelaskan, capaian tersebut merupakan cerminan kuatnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dalam memenuhi kewajiban penyediaan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, khususnya bagi keluarga

yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Lebih lanjut, Herman Deru mengungkapkan bahwa peran Pemerintah Provinsi melalui program Sumsel Berkat adalah memastikan tidak ada masyarakat yang terabaikan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan langsung untuk menutupi kekurangan yang ada di lapangan, mulai dari reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif, pendaftaran peserta baru, hingga menanggung layanan medis tertentu yang belum terakomodasi dalam skema

penjaminan di tingkat kabupaten/kota," jelasnya.

Dengan skema tersebut, masyarakat Sumatera Selatan memperoleh kesempatan akses layanan kesehatan yang lebih luas serta responsif terhadap kebutuhan mendesak di lapangan.

"Terima kasih kepada seluruh bupati dan wali kota yang telah berkomitmen penuh mendukung Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan cakupan kesehatan semesta. Insya Allah, ke depan kita akan terus meningkatkan kualitas layanan demi memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Sumatera Selatan," pungkasnya. ●ADV





## PASTIKAN PROGRES SEKOLAH RAKYAT SESUAI RENCANA

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Sumsel yang berlokasi di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir.

**D**alam kunjungan tersebut, Gubernur Herman Deru menyatakan optimismenya bahwa Sekolah Rakyat Ogan Ilir dapat mulai dimanfaatkan pada pertengahan tahun 2026 atau beroperasi penuh pada tahun ajaran 2026/2027. Ia menilai progres pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

"Sekolah Rakyat ini menjadi kebanggaan. Di Sumatera Selatan terdapat tiga lokasi pembangunan Sekolah Rakyat, yakni di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya Kecamatan Teluk Gelam, serta Kabupaten Empat Lawang. Seluruhnya

masih dalam tahap pembangunan dan kita harapkan pertengahan tahun 2026 sudah dapat dimanfaatkan," ujar Herman Deru.

Khusus Sekolah Rakyat Ogan Ilir, fasilitas pendidikan ini dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Sekolah tersebut diproyeksikan menjadi solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak putus sekolah, serta yatim piatu.

Sementara itu, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya telah dimulai sejak akhir tahun

**"Yang paling penting adalah rekrutmen siswa. Aparat pemerintah setempat paling tahu siapa warganya yang benar-benar tidak mampu. Itulah sasaran utama Sekolah Rakyat"**

2025 dan dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Target penyelesaian pembangunan direncanakan pada pertengahan tahun 2026 atau sekitar bulan Juli.

"Targetnya pertengahan tahun ini sudah dapat dimanfaatkan sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat kurang mampu," kata Panca.

Sekolah Rakyat Ogan Ilir dibangun di atas lahan seluas sekitar 8,5 hektar milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan dukungan pendanaan dari APBN sebesar kurang lebih Rp 250 miliar. Sasaran peserta didik ditetapkan sesuai kriteria Kementerian Sosial RI.

Terkait tenaga pendidik, Panca menyebutkan bahwa saat ini masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemkab Ogan Ilir optimistis Sekolah Rakyat Ogan Ilir dapat beroperasi secara optimal pada tahun ajaran

2026/2027.

### Rekrut Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat komitmennya dalam pemerataan akses pendidikan melalui peluncuran Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Launching yang dilakukan Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru pada tahun lalu tersebut menjadi langkah awal pembangunan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera.

Gubernur Herman Deru menegaskan Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat yang digagas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Ia mengatakan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan

oleh bangunan fisik, tetapi juga pada ketepatan sasaran peserta didik.

"Yang paling penting adalah rekrutmen siswa. Aparat pemerintah setempat paling tahu siapa warganya yang benar-benar tidak mampu. Itulah sasaran utama Sekolah Rakyat," ujar Herman Deru.

Menurutnya, kebodohan menjadi

masyarakat.

"Kita berharap proses belajar mengajar segera berjalan. Dengan pendidikan yang baik, kualitas SDM meningkat dan IPM Sumsel ikut terdongkrak," jelasnya.

Dirjen Prasarana Strategis Kemen PUPR, Bisma, menyampaikan bahwa pihaknya mendapat amanah untuk mendukung pembangunan Sekolah



salah satu faktor utama kemiskinan. Oleh sebab itu, akses pendidikan yang adil dan merata menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Herman Deru juga mengingatkan agar seluruh elemen pembangunan sekolah, termasuk desain gerbang, dibuat menarik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan minat

Rakyat secara menyeluruh.

"Di Sumsel terdapat tiga lokasi Sekolah Rakyat dengan pembiayaan APBN tahun jamak. Kualitas dan spesifikasi teknis harus menjadi pedoman utama," katanya.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. •ADV

# SIAP TINGKATKAN PRODUK NYATA DAN KINERJA KONKRET

Guna memacu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, Gubernur Dr. H. Herman Deru menegaskan komitmennya untuk meminta adanya produk nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Dalam arahnya, Herman Deru menekankan bahwa tahun 2026 ini bukan lagi saatnya untuk sekadar berencana atau mengumbar janji. Ia menginstruksikan seluruh jajaran agar serius melaksanakan kebijakan strategis, terutama pada sektor infrastruktur dan percepatan operasional pelabuhan Tanjung Carat.

Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang dan Sekda Dr. Edward Candra ini menyatakan bahwa inovasi pelayanan publik harus menjadi prioritas.

"Saya minta di momen awal tahun ini kita benar-benar menghasilkan produk terbaik. Yang saya minta bukan janji, tapi hasil nyata," tegasnya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Perjan-

jian Kinerja serta Pakta Integritas Tahun 2026.

Herman Deru mengingatkan bahwa amanah kepemimpinan yang ia emban merupakan mandat dari 9 juta lebih masyarakat Sumsel.

Masyarakat dengan beragam latar belakang pendidikan dan ekonomi menaruh harapan besar pada kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah.

Ia mengibaratkan jajaran OPD sebagai organ tubuh yang saling bertautan dalam satu sistem besar.

Jika salah satu perangkat daerah tidak berfungsi maksimal atau "sakit", maka seluruh ritme pembangunan di Sumatera Selatan akan ikut terganggu.

Gubernur juga menepis isu adanya praktik kelompok tertentu atau transak-

"Saya minta di momen awal tahun ini kita benar-benar menghasilkan produk terbaik. Yang saya minta bukan janji, tapi hasil nyata"



si jabatan di lingkungannya.

Ia menjamin bahwa profesionalisme adalah satu-satunya tolok ukur, di mana pejabat harus membalas kepercayaan tersebut dengan kinerja yang melampaui standar normatif.

Menurutnya, bekerja sekadar "mengalir saja" tidak akan membawa perubahan signifikan bagi daerah. Setelah penandatanganan pakta integritas, setiap kepala dinas diminta melakukan otokritik terhadap capaian konkret yang telah atau akan mereka hasilkan bagi publik.

Menengok perjalanan 11 bulan terakhir di periode kedua kepemimpinannya, Herman Deru mengakui adanya fase transisi yang cukup menantang. Meski berbagai penghargaan nasional telah diraih, ia menilai prestasi tersebut belum memberikan dampak yang benar-benar transformatif.

"Kita memang banyak mendapat penghargaan dan data statistik meningkat, tapi bagi saya itu belum signifikan. Kita belum boleh puas dengan pencapaian yang ada saat ini," tambah Gubernur dengan penuh motivasi.

Tantangan keterbatasan anggaran pun disinggung sebagai ujian kreativitas bagi para pimpinan OPD. Ia meminta jajarannya keluar dari zona nyaman dan tidak menjadikan minimnya dana sebagai alasan untuk berhenti melakukan inovasi atau kolaborasi dengan pihak swasta.

Herman Deru juga mengajak para pejabat untuk merenungi kembali esensi sebagai pelayan rakyat. Ia yakin jika setiap OPD mampu menghasilkan satu produk unggulan, maka akumulasi dari kinerja tersebut akan membawa Sumsel menuju kemajuan yang jauh lebih pesat.

### Tetapkan 9 Isu Strategis

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dr. Drs. H. Edward Candra mengarahkan seluruh perangkat daerah agar menjadikan sembilan isu strategis pembangunan sebagai fokus utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

Penetapan ini dinilai penting untuk memastikan perencanaan pembangu-

nan daerah berjalan lebih terarah, sinergis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.

Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 didasarkan pada evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, tantangan aktual yang dihadapi daerah, serta proyeksi kebutuhan pembangunan jangka menengah dan panjang guna mewujudkan Sumatera Selatan yang mapan dan berkelanjutan.

Adapun sembilan isu strategis pem-

gasi bencana. Peningkatan daya saing daerah dan investasi.

Rendahnya kapasitas fiskal daerah. Percepatan transformasi ekonomi dan transisi energi berkeadilan. Penguatan tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial.

Melalui RKPD 2027, Pemprov Sumsel menetapkan enam prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penguatan ekonomi daerah berbasis sum-



angunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027 meliputi masih tingginya angka kemiskinan dan stunting serta ketimpangan akses layanan dasar. Belum optimalnya produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan.

Belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. Penguatan miti-

ber daya lokal. Penguatan ketahanan pangan, energi, air, dan lingkungan. Pemerataan infrastruktur. Penurunan kemiskinan. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

"Koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan RKPD 2027. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah daerah harus bekerja secara kolaboratif dan terintegrasi," ujarnya. ●

# MEMAKSIMALKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus bergerak menyeimbangkan geliat ekonomi sektor energi dengan kenyamanan mobilitas masyarakat. Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna mengurai kemacetan serta meningkatkan keselamatan di sejumlah titik krusial perlintasan sebidang.

**S**alah satu komitmennya tersebut mendukung penuh pembangunan empat flyover di jalur lintasan kereta api aktif, yakni Flyover Simpang Belimbing (JPL 99), Flyover Gunung Megang 1 (JPL 104), Flyover Gunung Megang 2 (JPL 106), dan Flyover Ujan Mas (JPL 111).

Menurut Herman Deru, proyek tersebut diproyeksikan menjadi solusi komprehensif yang tidak hanya menjamin kelancaran operasional Kereta Api Batubara Rangkaian Panjang (Babaran-

jang) sebagai tulang punggung logistik energi nasional, tetapi juga membebaskan masyarakat dari kemacetan di perlintasan sebidang.

“Dengan adanya pembaruan penataan angkutan batubara, permintaan pasti meningkat. Namun, ini adalah ekosistem yang bersinggungan langsung dengan jalan raya. Jika tidak ditata dengan baik, ketidaknyamanan masyarakat akan semakin tinggi,” tegas Herman Deru.

la menilai pembangunan flyover



menjadi langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan industri dan kepentingan publik. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar arus distribusi energi sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas masyarakat.

Demi percepatan realisasi proyek, Gubernur mendorong terbentuknya sinergi solid melalui konsorsium lintas sektor. Kolaborasi itu melibatkan PT Bukit Asam (PTBA) dan PT KAI sebagai pilar transportasi energi, PT Semen Baturaja, Pemerintah Provinsi Sumsel, serta Kementerian Pekerjaan Umum.



Gubernur berharap proses ground-breaking segera dilaksanakan sebagai bentuk kepastian dan keseriusan dalam pelayanan publik. Ia mengatakan seluruh flyover tersebut dapat beroperasi penuh pada tahun 2027.

Selain berdampak pada aspek ekonomi, pembangunan flyover ini juga dinilai krusial untuk meminimalisir risiko kecelakaan di perlintasan sebidang yang selama ini rawan insiden.

**Akses Warga OKUS ke OKU Timur Kian Dekat**

Gubernur Herman Deru juga meresmikan Jalan Desa Karang Agung hingga Jalan Desa Trans Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS).

Pembangunan jalan tersebut dilaksanakan pada tahun 2025 menggunakan anggaran Bantuan Khusus Gubernur (Bangubsus) Sumsel yang disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten OKUS. Pembangunan Jalan Karang Agung-Trans Lubar sendiri dimulai pada September 2025.

Jalan dengan lebar tujuh meter terse-

but dibangun menggunakan Bangubsus Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp19.758.129.082,59.

Menurut Gubernur, konstruksi jalan ini telah memenuhi standar jalan nasional, sementara sebagian ruas lainnya sebelumnya telah dirintis melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

“Terima kasih kepada TNI yang telah merintis jalan ini. Insyaallah pada anggaran berikutnya akan kita selesaikan tahap demi tahap sehingga akses masyarakat semakin dekat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru



mengaku bangga atas kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten OKUS. Ia menilai sinergi tersebut memberikan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Dengan adanya jalan lingkaran ini, jarak tempuh warga menjadi lebih dekat. Bahkan waktu perjalanan dari OKU Selatan ke OKU Timur semakin singkat. Dari Muara Dua ke Martapura yang sebelumnya sekitar 60 kilometer, jika ruas ini selesai hingga Simpang Gemiung, jaraknya menjadi sekitar 50 kilometer,” jelasnya.

**Tinjau Perbaikan Jalan Nasional TAA - Sri Menanti**

Gubernur Herman Deru juga meninjau langsung ke lokasi Jalan Desa Sri Menanti dengan mengendarai motor

menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Kota Palembang.

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari kunjungan kerja Gubernur ke Kabupaten Banyuasin untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis berjalan sesuai rencana.

Di lokasi peninjauan, Herman Deru mengungkapkan jalan ini bantuan dari Gubernur Sumsel yang merupakan jalur vital penghubung kawasan pertanian, permukiman, dan kawasan industri di Banyuasin.

“Hari ini kita meninjau jalan Sri Menanti yang merupakan bantuan Guber-

nur Sumsel sebagai akses masyarakat, industri dan pelabuhan untuk menyebrang dari ke Desa Muara Telang,” ujarnya.

Perbaikan jalan ini dilaksanakan melalui Kegiatan Bantuan Keuangan

Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 oleh

Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan data teknis proyek, dana Peningkatan Ruas Jalan Tanjung Api-Api - Sri Menanti sesuai nilai kontrak sebesar Rp7.286.983.500.

Menurutnya, jalan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian dan lalu lintas berjalan lancar.

“Sekarang jalan ini sudah bagus ke arah Pelabuhan Desa Sri Menanti, warga mudah kalau mau menyebrang lewat Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Leanpuri sebagai transportasi warga Banyuasin,” ujarnya. ●



# HERMAN DERU CETAK SEJARAH BARU

Angka Kemiskinan Sumsel Turun Satu Digit



# KEMISKINAN SUMSEL TURUN KE SATU DIGIT DI ERA HDCU

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali mencatatkan capaian bersejarah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru dan Wakil Gubernur H. Cik Ujang (HDCU), angka kemiskinan Sumsel untuk pertama kalinya sejak 2014 berhasil ditekan hingga satu digit.

Berdasarkan data resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 9,85 persen. Angka ini turun 0,30 persen poin dibandingkan Maret 2025 yang berada di angka 10,15 persen.

Capaian tersebut disampaikan langsung Kepala BPS Sumsel, Mohammad Wahyu Yulianto, dalam Rapat Koordinasi Sinergi Program Pengentasan Kemiskinan se-Provinsi Sumsel Tahun 2026 di Griya Agung.

Dalam arahnya, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

Menurutnya, Sumsel kini berada di jalur yang tepat dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi Sumsel tahun 2025 mencapai 5,35 persen, melampaui angka nasional sebesar 5,11 persen.

Capaian tersebut menjadikan Sumsel sebagai kontributor ketiga terbesar di Pulau Sumatera setelah Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.

"Pertumbuhan Sumsel tidak hanya bertumpu pada satu sektor. Kita tumbuh secara inklusif, mulai dari pertambangan, pertanian, industri pengolahan hingga real estate," ujar Herman Deru.

Selain kemiskinan yang menurun, tingkat pengangguran terbuka juga berhasil ditekan hingga 3,59 persen. Sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 44 persen.

Dari sisi wilayah, angka kemiskinan perkotaan tercatat 8,91 persen, sedangkan perdesaan sebesar 10,43 persen, keduanya mengalami penurunan.

Terjadinya penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi pada peningkatan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan.

Perekonomian Sumsel tahun 2025 berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp720,21 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp 80,66 juta.

Kemudian pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan juga mengalami peningkatan yang cukup baik dalam



Gubernur menekankan dua strategi utama dalam pengentasan kemiskinan, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan biaya hidup. Salah satu langkah konkret adalah melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak lengah atas capaian tersebut. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi kebijakan yang tepat sasaran.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada September 2025 tercatat 898,24 ribu orang, turun 21,4 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

satu terakhir ini. Di tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumsel mencapai 5,07 persen sedangkan tahun 2025 ini mencapai 5,54 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumsel tersebut disumbang dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 1,11 persen.

Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Sumsel untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kebijakan berbasis data. •ADV

# SIAP JADI TUAN RUMAH ASIAN MINI FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2026

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional Asian Mini Football Championship 2026 yang berlangsung pada 24 April hingga 4 Mei 2026 di Jakabaring Sport City (JSC), Palembang.

Kesiapan tersebut disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru saat menerima Pengurus Pusat Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) bersama President International Minifootball Federation (IMF) Mr. M. Dosari dari Riyadh serta delegasi Irak.

Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa bangga dan terhormat atas kepercayaan yang diberikan kepada Sumsel sebagai tuan rumah turnamen tingkat Asia tersebut.

"Ini merupakan kebanggaan bagi saya dan jajaran Pemprov Sumsel da-

pat bertemu langsung dengan Presiden IMF. Pemilihan Sumsel sebagai lokasi penyelenggaraan Piala Asia Mini Football merupakan sebuah kehormatan besar," ujarnya.

Menurut Herman Deru, penyelenggaraan event ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan persaudaraan antarbangsa.

"Ini akan semakin mempererat hubungan persaudaraan. Apalagi Presiden IMF juga sesama muslim. Di Sumsel sendiri sekitar 95 persen penduduknya beragama Islam, kurang



lebih 8 juta jiwa. Ini menjadi momentum silaturahmi yang baik, baik secara kemanusiaan maupun antar tim sepak bola mini," tambahnya.

Ia menegaskan Pemprov Sumsel siap memenuhi seluruh kebutuhan sebagai tuan rumah, mulai dari infrastruktur hingga fasilitas pendukung lainnya.

"Kita siap. Apa saja yang perlu disiapkan sebagai tuan rumah akan segera kita lakukan.

Saya minta KSMI Sumsel berkoordinasi dengan OPD terkait, termasuk Dinas PU Perkim, agar pembagian hak dan kewajiban antara pusat dan daerah jelas, transparan, dan persiapannya berjalan lancar," tegasnya.

Pemprov Sumsel, lanjut Herman Deru, juga akan menyiapkan infrastruktur penunjang seperti akomodasi bagi atlet dan ofisial, serta lapangan pertandingan yang memenuhi standar internasional.

**Siap dan Berpengalaman**

Sementara itu, Presiden IMF M. Dosari mengaku sangat bahagia dapat berkunjung ke Sumsel dan menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan.

"Sumsel sudah dikenal sebagai daerah yang berpengalaman menggelar event internasional. Dari pengamatan kami di level Asia, kami yakin penyelenggaraan turnamen ini akan berjalan dengan baik," katanya.

Ia menekankan bahwa olahraga merupakan faktor pemersatu bangsa-bangsa. Kunjungan ini menjadi yang pertama baginya ke Sumsel dan diharapkan dapat memperkuat hubungan persaudaraan di masa mendatang.

"Saya optimistis Asian Mini Football Championship 2026 akan sukses dengan dukungan penuh dari Gubernur Sumsel," ujarnya.

Asian Mini Football Championship 2026 diikuti 12 negara yang dibagi ke dalam empat grup melalui proses undian di Jakarta. Pemilihan Palembang didasarkan pada kesiapan infrastruktur olahraga dan rekam jejak kota tersebut sebagai tuan rumah event nasional dan internasional.

Kejuaraan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan minifootball di Asia, terlebih

setelah Indonesia menggantikan Vietnam yang terkena sanksi. Selain menjadi tuan rumah, Indonesia juga akan menggelar dua agenda internasional minifootball pada 2026, memperkuat legitimasi nasional dalam penyelenggaraan event olahraga global.

Dalam turnamen ini, sebanyak 16 negara akan ambil bagian, yakni Indonesia, Lebanon, Timor Leste, Irak, Maladewa, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Filipina, India, Pakistan, Kazakhstan, Tiongkok, dan Brunei Darussalam. Negara-negara peserta telah dibagi ke dalam empat grup melalui proses undian terbuka yang

"Jika penyelenggaraan ini sukses, bukan tidak mungkin kedepan Sumsel bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia Mini Football dengan peserta hingga 53 negara," ungkapnya.

Yan menegaskan bahwa ajang ini tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga mendukung pengembangan sport industry dan sport tourism. KSMI melibatkan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, hingga sektor kebudayaan.

"Bahkan kami juga merencanakan pemecahan rekor MURI, seperti meng-



**ASIAN MINI FOOTBALL CHAMPIONSHIP 2026 :**

- Grup A: Lebanon, Timor Leste, Indonesia, Irak**
- Grup B: Maladewa, Singapura, Chinese Taipei, Arab Saudi**
- Grup C: Qatar, Bahrain, Filipina, India**
- Grup D: Pakistan, Kazakhstan, China, Brunei Darussalam**

dilaksanakan di Jakarta pada Rabu (4/2/2026) lalu.

Ketua KSMI Pusat Yan Mulia Abidin menjelaskan pemilihan Jakabaring Sport City sebagai lokasi pertandingan karena kawasan tersebut dinilai lengkap dan terintegrasi.

"Jakabaring sudah one stop service, dari hulu ke hilir. Hari ini rombongan juga akan mengecek langsung kesiapan lapangan. Untuk mini football, kawasan ini sangat memungkinkan karena sesuai standar," jelasnya.

Yan juga menyebutkan bahwa Presiden IMF menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Asian Mini Football Championship 2026 menggantikan Vietnam yang terkena sanksi.

giring bola terbanyak bersama puluhan ribu pelajar serta fun run pelajar sebagai rangkaian kegiatan," pungkasnya.

**Timnas Indonesia di Grup A**

Hasil undian grup Asian Mini Football Championship 2026 resmi diumumkan dalam agenda yang berlangsung di Jakarta, Kamis (5/2) menempatkan Timnas sepakbola mini Indonesia ada di peringkat ketiga.

Ketua Panitia Pelaksana Asian Mini Football Championship 2026, Agung Kurniawan memberikan informasi terbaru terkait kesiapan Palembang sebagai tuan rumah. Ia memastikan pihaknya berupaya keras untuk menyukseskan ajang tersebut. ●

# MISI DAGANG PERDANA JATIM-JATENG 2026 BUKUKAN TRANSAKSI RP3,15 TRILIUN

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung pelaksanaan Misi Dagang dan Investasi Perdana Tahun 2026 antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan ini menjadi pembuka rangkaian misi dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2026 sekaligus menandai penguatan kerja sama ekonomi antardaerah di Pulau Jawa.

Hasilnya, forum business matching yang mempertemukan pelaku usaha kedua provinsi tersebut berhasil membukukan total komitmen transaksi sebesar Rp3.152.408.358.000.

Kegiatan strategis ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, jajaran kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta perwakilan organisasi dunia usaha, di antaranya HIPMI, Kadin, IWAPI, REI, dan Gekrafs dari kedua provinsi.

Misi dagang ini dirancang sebagai instrumen penguatan konektivitas perdagangan, perluasan pasar domestik, sekaligus integrasi rantai pasok antarwilayah untuk menopang ketahanan ekonomi regional.

"Matur nuwun semuanya. Ini menjadi sinergi yang luar biasa. Dari business matching yang dilakukan, terlihat adanya kebutuhan yang bersifat komplementer. Jawa Timur membutuhkan

produk dari Jawa Tengah, demikian pula sebaliknya. Alhamdulillah, hingga pukul 17.00 WIB nilai transaksi telah menembus Rp3,152 triliun lebih," ujar Khofifah.

Khofifah merinci, total komitmen transaksi tersebut terdiri atas, Jatim Jual sebesar Rp2.759.547.585.000, Jatim Beli sebesar Rp296.860.773.000 dan Jatim Investasi sebesar Rp96.000.000.000

Skema transaksi dua arah ini, menurut Khofifah, tidak hanya memperluas pasar,

asap, benih jagung hibrida, udang dan kulit ikan, serta pupuk organik cair.

Komoditas tersebut mencerminkan kekuatan sektor unggulan Jawa Timur, mulai dari peternakan, perikanan, pertanian, industri pengolahan, perkebunan hingga kehutanan.

"Produk yang diperdagangkan dalam misi dagang ini mencerminkan kekuatan dan kebutuhan masing-masing daerah," tutur Khofifah.

Sementara itu, pada skema Jatim Beli,



tetapi juga mengoptimalkan muatan barangkat dan muatan balik antarwilayah, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan distribusi komoditas menjadi lebih efisien.

Dalam skema Jatim Jual, Jawa Timur mencatatkan penjualan beragam produk strategis, antara lain rokok, beras, kopi, tetes tebu (molasses), pakan ikan dan udang, benih tebu, surimi, daging ayam dan sapi, produk olahan daging ayam dan sapi, susu, gula kristal putih, DOC (day old chick), fillet dori dan aneka produk seafood, sapi ternak, benih tanaman pangan dan hortikultura, jagung, produk tekstil, veneer, ikan bandeng

Jawa Timur melakukan pembelian berbagai produk dari Jawa Tengah, antara lain kayu bulat, telur ikan, karung, cengkeh, tembakau, katul, minuman botanikal seduh, sambal pecel, botol plastik, biji carica, tepung tapioka, tas anyam, serta gula merah tebu.

Pola transaksi dua arah tersebut dinilai semakin memperkuat integrasi pasar domestik, khususnya untuk komoditas pangan, bahan baku industri, serta produk penunjang sektor UMKM.

Selain perdagangan, misi dagang ini juga mencatatkan komitmen investasi Jawa Timur di Jawa Tengah pada sektor pembangunan perumahan dengan

nilai mencapai Rp96 miliar.

Menurut Khofifah, kehadiran skema investasi di dalam misi dagang menunjukkan bahwa kerja sama antardaerah tidak hanya berhenti pada transaksi jual beli, tetapi telah berkembang menuju kolaborasi jangka menengah dan panjang.

Khofifah menegaskan bahwa misi dagang ini merupakan agenda perdana Jawa Timur pada tahun 2026, sekaligus kelanjutan dari upaya sistematis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mempertemukan pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas.

“Misi dagang berkelanjutan ini menjadi instrumen penting untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku usaha penjual dan pembeli, baik melalui skema government to business maupun business to business, agar potensi kerja sama dan transaksi dapat terbangun secara lebih efektif,” kata Khofifah.

Lebih jauh, forum ini juga diarahkan untuk memperkuat perdagangan dalam negeri dan mendukung program substitusi impor, khususnya dalam pemenuhan bahan baku industri.

Dalam pelaksanaan Misi Dagang Jatim-Jateng 2026 ini, sepuluh komitmen transaksi terbesar didominasi sektor peternakan, pangan, industri pengolahan, perikanan, dan perkebunan.

Komitmen terbesar tercatat pada kerja sama antara Asosiasi Pelaku Usaha Peternakan Jawa Timur dengan Asosiasi Pelaku Usaha Peternakan Jawa Tengah dengan nilai mencapai Rp1,13 triliun per tahun, meliputi perdagangan daging unggas, daging sapi, susu, telur, produk olahan daging, DOC ayam, hingga temak sapi.

Kerja sama strategis lainnya adalah:

- PT Sinergi Gula Nusantara (Jawa Timur) dengan PT Citra Gemini Mulya (Jawa Tengah) untuk komoditas gula kristal putih senilai Rp300 miliar per tahun.
- Kerja sama sektor industri hasil tembakau antara GAPERO Jawa Timur dengan PT TSPM Jawa Tengah dengan nilai Rp192 miliar per tahun.
- Penjualan surimi dan produk olahan perikanan oleh PT Indo Lautan Makmur senilai Rp142,8 miliar per tahun.
- Penjualan beras oleh CV Sumber Pangan Kediri senilai Rp126,5 miliar per tahun.

- Penjualan pakan ikan dan udang oleh PT Matahari Sakti senilai Rp105,6 miliar per tahun.

Pada sisi muatan balik, Jawa Timur juga melakukan pembelian kayu bulat dari Jawa Tengah melalui Perum Perhutani dengan nilai transaksi Rp60,22 miliar per tahun.

Menurut Khofifah, konfigurasi transaksi tersebut menunjukkan bahwa struktur perdagangan kedua provinsi bersifat saling melengkapi.

“Kita semua sama-sama punya kekuatan dan kelemahan. Karena itu mari tumbuh bersama, berkembang bersama, maju bersama, dan sejahtera bersama. Kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi yang terus dikuatkan,” ujarnya.

Khofifah menambahkan, penguatan perdagangan antarwilayah merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah

- sektor perdagangan sebesar 18,31 persen,
- sektor pertanian sebesar 11,98 persen,
- dan sektor lainnya sebesar 38,55 persen.

Berdasarkan data Perdagangan Antarwilayah Indonesia, Jawa Timur juga mencatat surplus perdagangan antarwilayah terbesar secara nasional, yakni mencapai Rp209 triliun.

Hingga Triwulan III-2025, total ekspor Jawa Timur tercatat sebesar Rp1.234,16 triliun, sedangkan impor mencapai Rp1.055,42 triliun, sehingga neraca perdagangan Jawa Timur mencatat surplus sebesar Rp178,74 triliun.

Untuk hubungan perdagangan Jawa Timur-Jawa Tengah, total nilai perdagangan tercatat sebesar Rp47,58 triliun, dengan muat dari Jawa Timur ke Jawa



Provinsi Jawa Timur dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah.

Pada Triwulan III-2025, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,22 persen (year on year), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,04 persen. Dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp867,39 triliun, Jawa Timur berkontribusi 14,54 persen terhadap PDB nasional dan 25,65 persen terhadap PDRB Pulau Jawa.

Struktur perekonomian Jawa Timur ditopang oleh:

- sektor industri pengolahan sebesar 31,16 persen,

Tengah sebesar Rp28,31 triliun dan bongkar sebesar Rp19,26 triliun. Dengan demikian, Jawa Timur mencatat surplus perdagangan sebesar Rp9,05 triliun terhadap Jawa Tengah.

Sejak 2019 hingga Januari 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan 49 kali misi dagang domestik di 29 provinsi dengan total nilai komitmen transaksi mencapai Rp30,52 triliun dan melibatkan 2.410 pelaku usaha asal Jawa Timur.

Selain itu, sejak 2022 hingga 2025, Jawa Timur juga telah melaksanakan enam kali misi dagang luar negeri yang berhasil membukukan potensi transaksi sebesar Rp5,896 triliun. ●

# Bobby Nasution Pasang Target Agresif BANK SUMUT DIPACU JADI MOTOR UMKM DIGITAL

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan perlunya lompatan kinerja Bank Sumut di bawah kepemimpinan Direktur Utama yang baru, Heru Mardiansyah.

“**I**a meminta bank pembangunan daerah itu tampil lebih progresif dan adaptif di tengah tekanan ekonomi global yang kian menempatkan sektor keuangan sebagai penopang utama ketahanan negara.

Pesan tersebut, menurut Bobby, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi

tingkat provinsi, Bank Sumut harus mengambil peran yang jauh lebih progresif,” ujar Bobby saat memberikan arahan kepada jajaran direksi Bank Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Rabu 4 Februari 2026.

Bobby secara khusus meminta pembenahan internal dilakukan cepat, disiplin, dan profesional. Program konsolidasi organisasi ditargetkan rampung paling lama enam bulan.

Ia menekankan pentingnya ketegasan manajemen dalam menata struktur, sumber daya, serta pola kerja agar bank daerah itu mampu bergerak lebih lincah.

“Program konsolidasi diberi waktu enam bulan. Jangan berlarut-larut. Kalau ada hambatan, harus berani menertibkan. Apalagi Direktur Utama sekarang berasal dari internal Bank Sumut, tentu lebih paham dan memiliki ikatan emosional dengan institusi ini,” tegas Bobby.

Optimisme itu lahir karena Heru Mardiansyah merupakan kader internal yang

berharap kepemimpinan internal tersebut mampu melahirkan kebijakan yang lebih kompetitif di tengah persaingan industri perbankan nasional.

Peta Jalan 100 Hari

Menanggapi arahan Gubernur, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyampaikan bahwa manajemen telah menyiapkan peta jalan melalui program 100 hari kerja.

Pada 30 hari pertama, fokus diarahkan pada konsolidasi dan diagnosis organisasi. Fase berikutnya, hari ke-31 hingga ke-60, difokuskan pada eksekusi serta pencapaian hasil cepat (quick wins). Sementara pada hari ke-61 hingga ke-100, transformasi digital menjadi prioritas.

Target utama program ini meliputi perbaikan profil risiko, diversifikasi ke ekosistem bisnis baru, penguatan kinerja usaha, peningkatan tingkat kematangan digital, serta penurunan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL).

“Yang paling penting adalah menetapkan budaya kerja, membangun kultur kinerja yang berorientasi hasil, menghilangkan sekat-sekat internal, serta memastikan transformasi digital berjalan nyata agar layanan Bank Sumut setara dengan bank nasional lainnya,” kata Heru.

Digitalisasi UMKM, Tantangan Nyata di Daerah

Di balik agenda pembenahan internal, tantangan terbesar Bank Sumut justru berada di luar gedung kantor, yakni pada transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara.

UMKM kerap disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Namun, di tengah perubahan pola belanja dan transaksi masyarakat, daya tahan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dengan teknologi.

Data Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tahun 2024 menunjukkan, sebanyak 56.295 usaha industri mikro dan ke-



Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Dalam forum itu, sektor keuangan ditegaskan sebagai salah satu instrumen strategis untuk menghadapi dinamika global.

“Kalau skala nasional, sektor keuangan adalah pondasi negara. Maka di

meniti karier panjang di Bank Sumut. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya yang diisi figur dari luar, Heru dinilai memiliki pemahaman menyeluruh terhadap karakter organisasi dan tantangan bisnis bank daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

cil di sektor pengolahan telah memanfaatkan internet. Pada saat yang sama, masih terdapat 67.616 usaha yang belum menggunakannya secara optimal.

Pemanfaatan internet pun masih terbatas. Sekitar 44.387 usaha menggunakan internet untuk pemasaran, sementara hanya 12.467 usaha yang memanfaatkannya untuk pembayaran transaksi.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 46.269 pelaku usaha menyatakan internet tidak dibutuhkan, dan 11.308 usaha mengaku tidak mengetahui cara menggunakannya. Angka ini menegaskan bahwa hambatan digitalisasi bukan hanya soal jaringan, melainkan rendahnya literasi dan minimnya pendampingan.

### Bank Sumut di Garis Depan Transformasi

Kondisi tersebut menempatkan Bank Sumut pada posisi strategis. Sebagai bank pembangunan daerah yang memiliki jaringan hingga pelosok, Bank Sumut dinilai mampu menjadi penggerak transformasi digital UMKM secara langsung.

Salah satu contoh konkret dilakukan melalui sosialisasi pembayaran digital dan pembiayaan produktif kepada pelaku usaha homestay di Kabupaten Samosir pada Oktober 2025. Dalam kegiatan tersebut, Bank Sumut tidak hanya memperkenalkan layanan keuangan digital, tetapi juga memfasilitasi pelaku usaha untuk masuk ke platform e-commerce agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah UMKM terjebak dalam pola usaha konvensional, sementara perilaku konsumen terus bergerak ke ruang digital.

Namun, tantangan digitalisasi di Sumatera Utara masih besar. Gubernur Bobby Nasution sebelumnya menyebut, baru sekitar 19 persen UMKM di Sumut yang mulai menggunakan teknologi, dan hanya 3 persen yang terhubung ke dalam ekosistem digital.

Rendahnya pemahaman tentang pemasaran digital, sistem penjualan daring, serta metode pembayaran non-tunai berpotensi membuat ekosistem UMKM berjalan stagnan apabila tidak diintervensi secara serius.

### Dari Sosialisasi ke Ekosistem

Karena itu, peran Bank Sumut tidak dapat berhenti pada tahap edukasi singkat. Pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebagai agenda seremonial.

Bank Sumut didorong membangun ekosistem menyeluruh, mulai dari pengenalan teknologi, pelatihan, implementasi, hingga evaluasi kinerja usaha. Skema ini dapat diperkuat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), terutama untuk pelatihan digital UMKM di pasar tradisional dan sentra produksi daerah.

Upaya Bank Sumut menghadirkan daftar UMKM binaan melalui kanal Pojok UMKM di situs resminya juga menjadi langkah positif. Melalui fitur tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi pelaku usaha dari berbagai daerah, seperti UMKM tenun di Deli Serdang hingga perajin gerabah lokal.

Meskipun demikian,



Kalau skala nasional, sektor keuangan adalah pondasi negara. Maka di tingkat provinsi, Bank Sumut harus mengambil peran yang jauh lebih progresif,"

konsistensi pembaruan dan perluasan konten menjadi prasyarat agar kanal tersebut benar-benar berfungsi sebagai etalase bisnis yang hidup, bukan sekadar pajangan digital.

Di sisi layanan, Bank Sumut juga mengembangkan aplikasi New Sumut Mobile dan Sumut Merchant untuk memudahkan pelaku usaha memantau transaksi secara real time. Namun, teknologi tanpa pendampingan berisiko tidak digunakan secara optimal.

Kolaborasi Daerah dan Penguatan Ekonomi Desa

Digitalisasi UMKM tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada perbankan. Sinergi dengan pemerintah daerah, dinas teknis, koperasi, serta komunitas pelaku usaha menjadi keharusan.

Keterlibatan Bank Sumut dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih, terutama dalam pembiayaan dan pengajuan kredit berbasis digital, berpotensi mempercepat penguatan ekonomi desa. Skema ini dapat sekaligus berfungsi sebagai jembatan pemasaran produk UMKM di tingkat lokal hingga regional.

Ketika akses pembiayaan semakin mudah, transaksi semakin transparan, dan pemasaran semakin terbuka, posisi tawar pelaku usaha pun meningkat. Ketimpangan informasi antara produsen dan distributor dapat ditekan, sementara nilai tambah usaha lebih adil dinikmati pelaku di tingkat bawah.

Di titik inilah tuntutan Gubernur Bobby Nasution terhadap Bank Sumut menemukan maknanya. Pembenaan internal dan transformasi digital bukan semata untuk memperkuat kinerja bank, tetapi menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem ekonomi digital Sumatera Utara. ●

# HELMI HASAN PASTIKAN BENGKULU KEBAGIAN PROGRAM 3 JUTA RUMAH

Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat langkah percepatan pembangunan perumahan rakyat melalui sinergi langsung dengan pemerintah pusat.

**G**ubernur Bengkulu Helmi Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendorong pemerataan program perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus memastikan Bengkulu memperoleh porsi perhatian yang lebih adil dalam kebijakan pembangunan nasional.

Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa Bengkulu memiliki peran historis penting bagi Indonesia, namun belum sepenuhnya sebanding dengan perhatian yang diterima dalam berbagai program pembangunan, termasuk sektor perumahan.

"Bengkulu ini provinsi yang paling berjasa bagi Indonesia. Tidak akan ada Indonesia tanpa Bengkulu, karena putri penjahit bendera Merah Putih adalah putri asli Bengkulu. Tetapi faktanya, Bengkulu kerap dilupakan dalam berbagai program pemerintah," tegas Helmi Hasan.

Dalam forum tersebut, Helmi Hasan secara khusus meminta penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kementerian PKP agar program perumahan yang digulirkan

benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat di daerah.

Ia juga mendorong Kementerian PKP untuk melakukan kunjungan langsung ke Bengkulu guna melihat kebutuhan lapangan secara lebih akurat.

"Kami berharap Bapak Menteri bisa datang langsung ke Bengkulu, melihat kondisi masyarakat, dan bersama-sama menentukan program perumahan yang paling dibutuhkan," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan komitmennya untuk segera melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu sebagai tindak

lanjut pertemuan tersebut.

"Dalam waktu dekat kami akan berkunjung ke Bengkulu untuk

meninjau langsung pelaksanaan program perumahan, mulai dari program bedah rumah, KUR perumahan, hingga rumah subsidi yang telah dibangun," kata Maruarar.

Ia menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen mempercepat dan mempermudah skema pembiayaan rumah subsidi, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik pembiayaan informal yang memberatkan.

"Negara harus hadir memberikan solusi nyata. Pembiayaan rumah subsidi harus mudah, cepat, dan tidak memberi ruang bagi rentenir yang selama ini membebani rakyat kecil," ujarnya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, jajaran Eselon I Kementerian PKP, Ketua BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi, serta Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo.

Optimalkan Tanah Terlantar untuk Program 3 Juta Rumah

Selain memperkuat koordinasi dengan Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mengambil langkah konkret dalam penyediaan lahan perumahan dengan menggandeng Badan Bank Tanah.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Bengkulu di Nusantara Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat.

Melalui kerja sama ini, sekitar 20 hektare lahan teridentifikasi sebagai tanah terlantar di wilayah perkotaan Bengkulu akan dioptimalkan untuk mendukung Program Pembangunan 3 Juta



Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari penataan kembali pengelolaan pertanahan yang selaras dengan rencana pembangunan daerah dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Pengelolaan tanah ini akan diselarasakan dengan perencanaan yang sudah disusun Pemerintah Provinsi Bengkulu, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat," kata Hakiki.

Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut merupakan implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 64 tentang Badan Bank Tanah, dengan menekankan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan optimalisasi pemanfaatan tanah negara.

Gubernur Helmi Hasan menilai, kerja sama tersebut lahir dari proses panjang dan diskusi lintas level pemerintahan, mengingat isu ketersediaan lahan memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan nasional dan daerah.

Seiring pesatnya pertumbuhan wilayah perkotaan Bengkulu, kebutuhan ruang untuk hunian dan lingkungan hidup dinilai semakin mendesak.

"Modal besar kita bukan hanya sumber daya alam, bukan semata anggaran atau sumber daya manusia, tetapi kekompakan dan kolaborasi antar-institusi pemerintah," ujar Helmi Hasan.

17 Hektare Telah Ditetapkan sebagai Tanah Terlantar

Dalam penandatanganan MoU tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu menyampaikan pemaparan secara daring. Kanwil BPN Bengkulu mengonfirmasi bahwa dari total sekitar 20 hektare lahan yang berada di kawasan perkotaan, seluas 17 hektare telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, sementara tiga hektare lainnya sedang dalam proses penetapan.

"Sebanyak 17 hektare sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dan tiga hektare akan menyusul karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat keputusan penetapan tanah terlantar," ujarnya.

Kanwil BPN Bengkulu juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN telah mengarahkan agar lahan tersebut dikelola oleh Badan Bank Tanah, karena sesuai dengan rencana tata ruang sebagai kawasan permukiman.

Lahan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu lokasi utama penyediaan perumahan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

untuk perumahan, Badan Bank Tanah juga akan melakukan kajian lanjutan terhadap potensi pengembangan kawasan lain di Bengkulu, seperti kawasan industri, kawasan pangan, serta fasilitas publik berskala regional, dengan mempertimbangkan lokasi yang berbeda dan luasan lahan yang lebih besar.

"Ke depan kami juga akan mengevaluasi lahan yang telah dimanfaatkan, termasuk yang sudah ditanami, dan menyiapkan kawasan industri Bengkulu,"



"Lokasi ini sangat memungkinkan untuk mendukung penyediaan perumahan dalam program 3 juta rumah Presiden," jelas perwakilan Kanwil BPN Bengkulu.

Pemanfaatan tanah terlantar untuk pembangunan hunian dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di wilayah perkotaan.

Dorong Tata Kelola Tanah dan Sumber PAD Baru

Hakiki Sudrajat menambahkan, selain

ujarnya.

Menurut Hakiki, keseluruhan kerja sama tersebut diarahkan untuk mengembalikan pengelolaan tanah kepada negara dan pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan publik, sekaligus membuka peluang sumber baru pendapatan asli daerah.

"Tanah negara harus kembali dikelola oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat serta menjadi sumber pendapatan daerah," tuturnya. ●



Cheria Trip Bahagia

# PELOPOR WISATA HALAL DUNIA DARI INDONESIA

PT Cheria Trip Bahagia (CTB), melalui brand Cheria Holiday, telah menjelma menjadi pelopor wisata halal dunia sejak 2012.

**K**isah pendirian perusahaan ini berakar dari pengalaman pribadi pendirinya, Cheria, saat melakukan perjalanan ke Jepang dan China.

Di sana, Cheria merasakan kesulitan dalam mencari makanan halal dan tempat ibadah. Dari pengalaman itulah, lahir tekad kuat untuk menyediakan layanan perjalanan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kini, Cheria Holiday tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga dipercaya sebagai partner strategis oleh berbagai pihak internasional. Cheria menjadi representasi nyata dari perusahaan Indonesia yang mampu menghadirkan layanan halal global.

Salah satu keunggulan utama Cheria Trip Bahagia adalah jaminan terhadap pengalaman halal selama perjalanan. Setiap itinerary dirancang dengan seksama agar waktu salat dapat dijalankan tepat waktu dan seluruh konsumsi selama perjalanan adalah 100 persen halal. Tour leader yang mendampingi juga adalah Muslim yang terlatih, memahami kebutuhan ibadah, dan etika perjalanan syariah.

Dengan pendekatan ini, Cheria berhasil membangun kepercayaan ribuan pelanggan. Bahkan, menurut survei internal, lebih dari 75 persen pelanggan melakukan repeat order, di mana mayoritas memberikan rating bintang lima atas pengalaman mereka.



Kepuasan pelanggan terhadap Cheria Trip Bahagia tidak sekadar klaim, tetapi dibuktikan dengan data survei yang terkini. Sebanyak 54,5 persen pelanggan memberikan rating bintang lima terhadap pengalaman mereka bersama Cheria Holiday. Lalu, 75,1 persen pelanggan menyatakan ingin kembali berwisata bersama Cheria di masa mendatang. 85,7 persen pelanggan menyebut wisata halal sebagai alasan utama memilih Cheria, menandakan kekua-

tan brand ini sebagai simbol perjalanan syariah. Kemudian, 55,5 persen menilai layanan tour leader dan komunikasi sebagai excellent. Sedangkan, 47,7 persen merasa destinasi yang dikunjungi tergolong sangat memuaskan. Statistik ini menjadi bukti kuat bahwa Cheria bukan hanya menjual perjalanan, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan pelayanan berkualitas tinggi bagi umat Muslim.

Statistik ini menjadi bukti kuat bahwa Cheria bukan hanya menjual perjalanan, tetapi juga menghadirkan ketenangan dan pelayanan berkualitas tinggi bagi umat Muslim.

ketenangan dan pelayanan berkualitas tinggi bagi umat Muslim. **Layanan Wisata Terlengkap** PT Cheria Trip Bahagia menyediakan berbagai layanan, yakni wisata domestic, wisata internasional, serta umroh dan haji. Wisata Domestik di antaranya Bandung, Malang, Lombok, Pulau Seribu, Derawan,





Raja Ampat, dan lainnya. Lalu, wisata internasional seperti ke Jepang, Korea, China, Eropa Timur dan Barat, Australia, Maroko, hingga Mesir. Semua paket dilengkapi fasilitas dan panduan halal untuk memastikan kenyamanan maksimal bagi wisatawan Muslim.

Sejak awal berdiri, PT Cheria Trip Bahagia telah mengantongi legalitas lengkap, antara lain Izin resmi BPW (SIUP. 2365/2012), anggota IATA (15337980), Izin Umroh & Haji melalui PT Jazira Halal Wisata, serta NPWP dan lisensi yang sesuai ketentuan hukum nasional.

Kantor pusatnya terletak di Jakarta Selatan dan memiliki lebih dari 20 kantor cabang di kota-kota besar di Indonesia. Ekspansi ini menjadikan Cheria sebagai salah satu biro perjalanan halal dengan jaringan terluas di Tanah Air.

Ada delapan alasan kenapa harus pilih Cheria Holiday:



1. Pelopor wisata halal dunia sejak 2012.
2. Paket wisata halal terlengkap ke lebih dari 50 negara dan 300 kota.
3. Legalitas lengkap dan terdaftar resmi di IATA serta Kementerian

Agama.

4. Tour leader Muslim profesional.
5. Makanan halal dan waktu ibadah selalu dijaga.
6. Kantor cabang nyata di berbagai kota besar.
7. Mitra lebih dari 200 travel agent di Indonesia dan luar negeri.
8. Tingkat kepuasan dan repeat order pelanggan sangat tinggi.

### Prestasi dan Penghargaan

Prestasi PT Cheria Trip Bahagia tak luput dari perhatian public. Pada 2016, Cheria Trip Bahagia meraih Travel Halal Terbaik dan Website Travel Muslim Terbaik dari Kementerian Pariwisata.

Pada 2018, Cheria Trip Bahagia meraih penghargaan dari Pemerintah China untuk program Wisata Muslim. Lalu, pada 2022 meraih Best Foreign Travel Agent to Egypt dari Pemerintah Mesir.

Pengakuan internasional ini menjadi bukti bahwa Cheria Holiday tidak hanya unggul di dalam negeri, tetapi juga dipercaya secara global.

Cheria Holiday juga telah menjadi pilihan banyak tokoh dan selebriti Muslim ternama di Indonesia, di antaranya Oki Setiana Dewi, Ria Ricis, Arie Untung & Fenita Arie, Pevita Pearce, Keenan Pearce, Ustadz Abdullah Gymnastiar, Ustadz Fadlan Garamatan, Ustadz Bachtiar Nasir, Tika Ramlan, Mustafa Debu Band, dan Salim Bahanan.

Kehadiran nama-nama tersebut sebagai pelanggan sekaligus pendukung membuktikan bahwa Cheria telah menjadi brand terpercaya di hati masyarakat luas, khususnya dari tokoh agama hingga publik figur.

### Halal Traveler Club

Sebagai bagian dari transformasi



digital, Cheria meluncurkan Aplikasi Halal Traveler Club (HTC), yang telah diunduh lebih dari 1.000 kali. Aplikasi ini menjadi solusi bagi wisatawan Muslim untuk merencanakan dan memesan paket halal secara mudah, cepat, dan terpercaya.

"Hari ini, bisnis tanpa online akan tertinggal. Siapa yang muncul setiap hari di HP pelanggan, itu yang akan dipilih," kata Cheriarna.

Dengan pendekatan ini, 100 persen strategi pemasaran Cheria kini berbasis digital, mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, hingga podcast.

Cheria Trip Bahagia tidak hanya berhenti pada layanan travel. Perusahaan juga mengembangkan ekosistem digital melalui perusahaan Sahabat Bertumbuh Digital untuk membantu UMKM go global, penerbitan buku seperti Laris Manis Bisnis Wisata Halal karya Cheriarna, hingga mitra reseller lebih dari 1.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pada 2025, Cheria Trip Bahagia menargetkan untuk go public (IPO), memperluas jaringan menjadi 300 mitra, serta membangun 10 hotel halal sebagai bagian dari

"Hari ini, bisnis tanpa online akan tertinggal. Siapa yang muncul setiap hari di HP pelanggan, itu yang akan dipilih"



an dari roadmap besar Cheria Ecosystem.

Cheria Holiday adalah

bukti nyata bahwa Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam industri wisata halal global. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, legalitas yang kuat, jaringan luas, dan dedikasi pada kualitas, Cheria Trip Bahagia terus membuktikan diri sebagai pionir dan inovator.

"Sukses bukan sekadar omzet, tapi keberkahan dan manfaat. Kita tidak hanya menjual paket perjalanan, tapi menghadirkan ketenangan dan kemudahan dalam beribadah bagi setiap pelanggan Muslim," ujar Cheriarna. ●



## Rahasia Kuliner Aceh:

# KEKAYAAN OLAHAN DAGING SARAT REMPAH DAN TRADISI

Aceh dikenal bukan hanya sebagai Serambi Mekah, tetapi juga sebagai salah satu daerah dengan kekayaan kuliner paling kuat di Indonesia.

Letak geografis Aceh yang strategis sejak masa lampau menjadikannya persinggahan para pedagang dari Arab, India, hingga Persia.

Interaksi panjang tersebut meninggalkan jejak mendalam dalam tradisi memasak masyarakat Aceh, terutama pada olahan daging yang kaya rempah, beraroma tajam, dan sarat nilai budaya.

Sejumlah hidangan khas Aceh bahkan telah melampaui fungsi kuliner semata. Ia menjadi simbol kebersamaan, identitas sosial, hingga warisan budaya yang terus dijaga lintas generasi.

Ini kuliner khas Aceh yang lezat, sarat rempah dan tradisi

### 1. Mie Aceh Daging, Ikon Kuliner dengan Rempah Kuat

Mie Aceh merupakan salah satu kuliner paling populer dari provinsi paling barat Indonesia ini. Hidangan berbahan mie kuning tebal tersebut hadir dalam dua varian utama, yakni mie goreng dan mie kuah, dengan ciri khas kuah kari kental yang sarat rempah.

Pilihan topping yang digunakan sangat beragam, mulai dari daging sapi, kambing, hingga hasil laut seperti udang, cumi, dan kepiting.

Racikan bumbu yang terdiri dari kapulaga, jintan, kunyit, cabai merah, lada, bawang putih, serta daun seledri men-

ciptakan rasa pedas dan gurih yang khas. Sajian ini biasanya dilengkapi acar mentimun, emping, dan perasan jeruk nipis untuk menambah kesegaran.

Lebih dari sekadar makanan, Mie Aceh mencerminkan sejarah panjang percampuran budaya. Pengaruh India dan Arab terlihat jelas dari penggunaan rempah-rempah yang kuat. Kini, Mie Aceh tidak hanya mudah ditemukan di daerah asalnya, tetapi juga tersebar di berbagai kota besar Indonesia. Menikmatinya bersama teh tarik atau kopi Aceh menjadi pengalaman kuliner yang tak terpisahkan.

### 2. Kuah Beulangong, Warisan Budaya dari Dapur Kolektif

Kuah Beulangong adalah masakan tradisional khas  
A c e h

Besar yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia sejak 2018. Hidangan ini berbahan dasar daging sapi, kambing, atau kerbau yang dimasak dalam kuah besar bersama bumbu kari khas Aceh.

Nama "beulangong" berasal dari kata belanga, yakni kuah berukuran besar yang digunakan untuk memasak hidangan ini secara massal.

Selain daging, Kuah Beulangong juga diperkaya dengan bahan tambahan seperti nangka muda, pisang muda, hingga bagian dalam batang pisang yang memberikan cita rasa unik.

Tradisi memasak Kuah Beulangong telah berlangsung sejak abad ke-19 dan dipengaruhi oleh pedagang Gujarat yang datang ke Aceh. Hidangan ini kerap disajikan dalam berbagai acara

adat, perayaan keagamaan, hingga tradisi Khanduri

Blang atau kenduri menjelang musim tanam padi.

Keunikan lainnya terletak pada proses memasaknya yang secara adat dilakukan oleh kaum pria. Aktivitas memasak bersama ini menjadi simbol gotong royong dan kebersamaan masyarakat Aceh.

Dalam waktu sekitar dua jam, masakan tersebut siap disajikan untuk ratusan orang, memperkuat nilai sosial yang terkandung di dalamnya.



### 3. Sie Reuboh, Daging Awet Penuh Sejarah

Sie Reuboh merupakan olahan daging khas Aceh yang dikenal dengan daya tahannya yang lama. Dalam bahasa Aceh, sie berarti daging, sementara reuboh merujuk pada proses perebu-

malaman dalam belanga. Keesokan harinya, belanga dipanaskan kembali hingga lemak meleleh, kemudian disiram cuka enau dan sedikit air hingga daging empuk dan beraroma khas.

Karena sifatnya yang tahan lama dan tidak mudah basi, Sie Reuboh pernah

dan kerap diolah kembali menjadi kuah asam keuing atau abon. Sayangnya, hidangan ini kini semakin jarang ditemukan di rumah makan, terutama di Banda Aceh. Hanya beberapa tempat di kawasan Aceh Besar yang masih setia menyajikannya, terutama saat sahur di bulan Ramadan.



san. Hidangan ini dibuat dari potongan daging sapi beserta lemaknya yang dibumbui garam, cabai, cabai kering, dan kunyit.

Proses memasaknya tergolong unik. Daging direbus tanpa tambahan air hingga mengering, lalu didiamkan se-

menjadi logistik perang atau peunajoh prang. Saifuddin, mantan kombatan asal Aceh Besar, mengungkapkan bahwa makanan ini kerap dibawa sebagai bekal saat bergerilya di hutan.

Meski sederhana dalam penyajian, Sie Reuboh memiliki rasa yang kuat

### 4. Sate Matang, Sajian Malam dengan Kuah Berempah

Sate Matang berasal dari kawasan Matang Geuleumpang Dua dan menjadi salah satu kuliner malam favorit di Aceh. Awalnya menggunakan daging kambing, kini sate ini juga banyak dibuat dari daging sapi sesuai selera penikmatnya.

Keistimewaan Sate Matang terletak pada proses pengolahannya. Potongan daging diungkep terlebih dahulu dengan bumbu ketumbar, bawang putih,



jahe, kunyit, dan garam sebelum ditusuk dan dibakar. Hasilnya, daging terasa empuk dan kaya rasa.

Tidak seperti sate pada umumnya, Sate Matang disajikan bersama bumbu kacang bertekstur kasar dan semangkuk kuah soto berempah. Kuah ini sering berisi potongan kentang dan daging, dengan aroma sereh yang memberikan sensasi segar saat disantap.

Sate Matang umumnya diujakan pada malam hari dan mudah ditemukan di pusat jajanan, salah satunya di kawasan Peunayong, Banda Aceh. Kehadiran kuah soto sebagai pelengkap menjadikan sate ini berbeda sekaligus memperkaya pengalaman kuliner khas Aceh. ●



# MENYUSURI KEHENINGAN LAUT TAWAR DAN KEINDAHAN SENJA ANEUK LAOT DI ACEH

Aceh bukan sekadar penanda geografis sebagai titik paling barat Indonesia. Provinsi yang dikenal sebagai Bumi Serambi Mekah ini adalah ruang pertemuan antara alam, budaya, dan ketenangan hidup.

**H**amparan hutan tropis, barisan pegunungan, serta laut yang membingkai wilayahnya menghadirkan lanskap yang terasa utuh seolah diciptakan dengan kesabaran dan cinta. Tak heran jika Aceh kerap disebut sebagai “surga kecil” yang jatuh ke bumi.

Di balik pesona pantainya yang mendunia, Aceh juga menyimpan keindahan perairan darat yang tak kalah memikat.

Dua danau, masing-masing berada di kutub wilayah yang berbeda, menawarkan pengalaman wisata yang kontras namun saling melengkapi.

Danau Laut Tawar di dataran tinggi Gayo dan Danau Aneuk Laot di jantung Kota Sabang bukan sekadar destinasi, melainkan potret kehidupan masyarakat Aceh yang bersahaja dan harmonis dengan alam.

Danau Laut Tawar merupakan salah satu danau terbesar di Aceh. Danau ini memiliki panjang sekitar 17 kilometer, lebar 3,2 kilometer, dengan luas sekitar 5.472 hektar, dan kedalaman rata-rata 80 meter.

Selain merupakan objek wisata yang populer, danau ini menjadi sumber air utama bagi masyarakat sekitar.

Pagi hari di Takengon, Aceh Tengah, selalu diawali dengan kabut tipis yang menggantung di atas Danau Laut Tawar. Permukaan airnya yang luas tampak tenang, memantulkan langit biru pucat serta perbukitan hijau yang menggilinginya.

Dalam bahasa Gayo, danau ini dikenal sebagai Lut Tawar sebuah sebutan yang lekat dengan identitas dan kehidupan masyarakat setempat.

Keberadaannya bukan hanya menjadi daya tarik wisata alam, tetapi juga sumber air utama dan pusat aktivitas ekonomi warga Aceh Tengah.

Setiap hari, kehidupan berjalan dalam irama yang teratur dan alami. Nelayan lokal menyusuri danau dengan perahu sederhana, memancing ikan depik spesies endemik yang hanya hidup di perairan ini. Di sekitarnya, lahan-lahan subur ditanami kopi Gayo, komoditas unggulan Aceh yang aromanya telah dikenal hingga mancanegara.



Udara yang sejuk, panorama hijau yang memanjakan mata, serta ritme hidup yang berjalan perlahan membuat siapa pun betah berlama-lama di kawasan ini.

Danau Laut Tawar seakan mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu harus riuh dan penuh hiruk pikuk. Ia hadir dalam kesederhanaan, keheningan, dan kejujuran alam.

Untuk mencapai Danau Laut Tawar, wisatawan dapat menempuh perjalanan darat sekitar lima jam dari Bireuen. Alternatif jalur lain melalui Blang Kejeren atau Kutacane juga tersedia, dengan bonus



nya menyatu dengan denyut kota, namun tetap menawarkan suasana yang tenang dan bersih.

Air Danau Aneuk Laot tampak jernih kebiruan, dikelilingi perbukitan yang membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan bebas polusi.

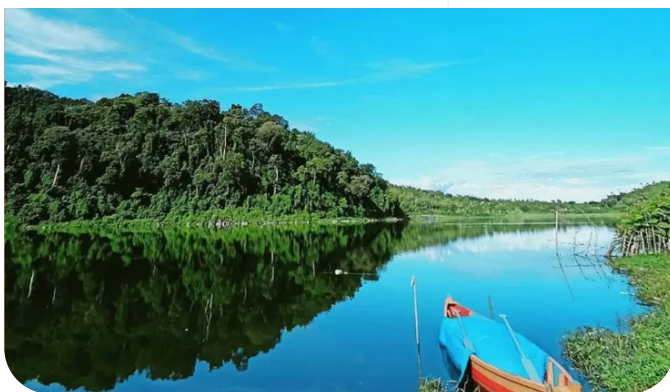
Sore hari menjadi waktu terbaik untuk berkunjung. Saat matahari perlahan turun, cahaya keemasan memantul di permukaan danau, sementara burung-burung kembali ke sarang, menandai peralihan hari menuju malam.

Ketika senja berangsur gelap, lampu-

han cahaya dan suasana.

Akses menuju Danau Aneuk Laot terbilang mudah. Dari pusat Kota Sabang, pengunjung dapat melintasi Jalan Untung Surapati menuju Jalan Cut Meutia hingga tiba di Kelurahan Aneuk Laot. Lokasinya yang strategis menjadikan danau ini sebagai salah satu destinasi favorit untuk menikmati waktu sore.

Dari dinginnya dataran tinggi Gayo hingga hangatnya senja di Sabang, Danau Laut Tawar dan Danau Aneuk Laot membuktikan bahwa Aceh bukan hanya tujuan wisata, melainkan sebuah



pemandangan alam khas Aceh yang menenangkan sepanjang perjalanan.

Berbeda dengan karakter Danau Laut Tawar yang luas dan sunyi, Danau Aneuk Laot menghadirkan keindahan yang lebih intim dan hangat.

Terletak di tengah Kota Sabang, danau ini menjadi ruang jeda bagi warga dan wisatawan yang ingin melepaskan penat dari aktivitas harian. Keberadaan-



lampu kota di perbukitan Sabang mulai menyala, menciptakan panorama romantis yang sulit dilupakan. Pemandangan inilah yang membuat Danau Aneuk Laot selalu ramai dikunjungi, tidak hanya oleh wisatawan lokal, tetapi juga pelancong mancanegara.

Aktivitas yang ditawarkan pun sederhana: berenang, bersantai di tepi danau, atau sekadar duduk menikmati peruba-

pengalaman yang utuh. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap momen-nya layak dikenang.

Dan ketika jaringan internet yang stabil menemani perjalanan, kisah tentang Aceh pun mengalir ke media sosial membiarkan dunia tahu bahwa di ujung barat Indonesia, keindahan alam dan ketenangan hidup masih terjaga dengan sangat baik. ●

# Fatalitas Tinggi

## VIRUS NIPAH MEREBAK DI ASIA SELATAN, INDONESIA SIAGA

**W**abah virus Nipah kembali menyita perhatian dunia setelah otoritas kesehatan India melaporkan kemunculan klaster baru infeksi di wilayah West Bengal. Virus zoonosis yang dikenal mematikan ini terdeteksi menular antarmanusia, meskipun para ahli menilai risiko wabah berkembang menjadi pandemi global masih relatif rendah.

Klaster awal dilaporkan berasal dari dua tenaga kesehatan di Kota Barasat, West Bengal. Seorang perawat laki-laki dilaporkan telah membaik, sementara seorang perawat perempuan masih menjalani perawatan intensif di unit perawatan intensif (ICU).

Dari dua kasus awal tersebut, infeksi kemudian terkonfirmasi menyebar ke setidaknya tiga orang lain, mengindikasikan terjadinya penularan antarmanusia. Otoritas kesehatan setempat kini menggarantina dan memantau ketat sekitar 100 orang kontak erat guna mencegah perluasan klaster.

Para epidemiolog menilai, meskipun virus Nipah berbahaya, wabah di West Bengal masih tergolong terbatas dan bersifat lokal.

### Virus Mematikan yang Pernah Mengguncang Asia Tenggara

Virus Nipah pertama kali diidentifikasi pada wabah besar di Malaysia dan Singapura pada 1998-1999. Saat itu, ratusan orang terinfeksi, dengan tingkat kematian tinggi akibat komplikasi berat, terutama gangguan paru-paru dan rangkang otak.

Hingga kini, virus Nipah (Nipah virus/ NiV) masih menjadi perhatian global. World Health Organization (WHO) bahkan menetapkannya sebagai priority pathogen, yakni patogen yang dinilai berpotensi menimbulkan wabah besar

Kasus penularan antartanaga kesehatan di West Bengal memicu perhatian global. Meski dinilai masih bersifat lokal, pemerintah Indonesia menyiapkan langkah antisipasi dan memperkuat sistem deteksi dini.

dan berdampak fatal terhadap kesehatan Masyarakat.

Menyusul meningkatnya perhatian global terhadap kemunculan kembali virus Nipah di India dan Bangladesh, Pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus tersebut

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, hingga akhir Januari 2026, belum ditemukan kasus virus Nipah di Indonesia.

"Virus Nipah itu banyaknya di India sama Bangladesh. Ini memang fatality ratenya tinggi, dia berasal dari kelelawar, jadi kalau bisa makan buah yang kemungkinan tersentuh oleh kelelawar ini," ujar Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa 27 Januari 2026.

la menambahkan, Kementerian Kesehatan terus melakukan pemantauan intensif dan memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama untuk mengantisipasi

kemungkinan masuknya kasus.

"Sampai sekarang sih belum kita amati di Indonesia," sambungnya.

Sebagai langkah kesiapsiagaan, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan perangkat diagnostik untuk mendeteksi virus Nipah di fasilitas rujukan.

"Tapi kita sudah mempersiapkan, sudah sosialisasi, dan kita sudah siapin reagen PCR-nya. Sama kayak virus, tesnya pakai PCR," ungkap Budi.

Selain itu, masyarakat yang berencana bepergian ke kawasan Asia Selatan, khususnya India dan Bangladesh, diimbau menerapkan protokol kesehatan dasar selama perjalanan.

"Kalau bisa kalau mau travel ke Asia Selatan, India atau Bangladesh itu pakai masker," tandasnya.

Pemerintah menegaskan, seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk memastikan Indonesia tetap aman dari ancaman penyakit



menular lintas negara.

Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) memperketat pengawasan kesehatan untuk mengantisipasi Virus Nipah masuk Indonesia.

Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Bandara Soetta, Nanning Nugrahini, menyebut deteksi dini dilakukan melalui deklarasi kesehatan digital yang wajib diisi penumpang sebelum tiba di Indonesia.

"Sistem ini memungkinkan petugas memantau gejala Virus Nipah berdasarkan riwayat perjalanan," katanya.

Selain pemeriksaan digital, Bandara Soekarno-Hatta juga mengoperasikan thermal scanner di seluruh pintu kedatangan, observasi visual penumpang, serta menyiapkan pos kesehatan. Jika ditemukan penumpang bergejala dari negara terjangkit, petugas akan langsung melakukan pemeriksaan lanjutan di dalam pesawat.

Pengawasan tidak hanya menyasar manusia, tetapi juga hewan pembawa Virus Nipah seperti kelelawar buah, monyet, dan babi. Setiap hewan dari negara terjangkit wajib melalui pemeriksaan kesehatan ketat sebelum masuk ke Indonesia.

Nanning menegaskan, hingga kini belum ditemukan kasus Virus Nipah di Bandara Soetta. Namun, potensi penularan tetap ada karena hewan pembawa virus tersebut juga hidup di Indonesia.

Virus Nipah diketahui memiliki tingkat kematian tinggi, mencapai 40-70 persen, serta belum memiliki vaksin maupun obat khusus.

Seiring meningkatnya kewaspadaan regional, beberapa negara seperti Thailand telah menetapkan status risiko tinggi dan memperketat penyarangan di bandara. Virus Nipah dapat menular dari buah atau minuman yang terkontaminasi gigitan kelelawar, lalu menyebar antar manusia.

"Masyarakat diimbau tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih, mencuci buah sebelum dikonsumsi, menghindari buah bekas gigitan hewan, serta membatasi kontak dengan individu bergejala," jelasnya.

### Mengenal Virus Nipah

Virus Nipah merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan juga antarmanusia. Inang alamnya adalah kelelawar pemakan buah.

Penularan ke manusia dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, terutama kelelawar dan babi. Konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, seperti buah yang digigit kelelawar atau nira kurma mentah.

Penularan antarmanusia, melalui kontak erat dengan cairan tubuh penderita, droplet, atau peralatan medis yang terkontaminasi.

Dalam sejumlah wabah sebelumnya, penularan di fasilitas pelayanan kesehatan tercatat cukup signifikan, terutama ketika protokol pencegahan infeksi be-



lum diterapkan secara ketat.

### Gejala dan Masa Inkubasi

Gejala awal infeksi virus Nipah umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, mual dan muntah, sakit tenggorokan dan serta rasa lemas.

Pada kasus yang lebih berat, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan akut dan ensefalitis (radang otak), yang ditandai dengan kebingungan, kantuk berlebihan, kejang, hingga penurunan kesadaran. Dalam kondisi berat, penyakit ini dapat berujung pada kematian.

Masa inkubasi virus Nipah umumnya

berkisar 4-14 hari, namun pada beberapa laporan dapat mencapai lebih dari 20 hari.

### Tingkat Kematian Masih Tinggi

Virus Nipah dikenal memiliki tingkat fatalitas yang sangat tinggi. Berdasarkan data WHO, angka kematian berkisar antara 40 hingga 75 persen, bergantung pada kesiapan sistem kesehatan dan kecepatan penanganan pasien.

Kelompok dengan risiko tertinggi meliputi:

- \* tenaga kesehatan yang merawat pasien tanpa perlindungan memadai
- \* masyarakat yang tinggal di wilayah dengan populasi kelelawar tinggi
- \* individu yang mengonsumsi buah atau produk hewani yang tidak higienis
- \* serta pelaku perjalanan dari dan ke wilayah dengan wabah aktif.

### Belum Ada Vaksin, Pencegahan Jadi Kunci

Hingga kini, belum tersedia vaksin maupun obat antivirus khusus untuk virus Nipah. Penanganan pasien bersifat suportif, termasuk perawatan intensif untuk mengatasi komplikasi pernapasan dan gangguan saraf.

Upaya pencegahan yang dianjurkan meliputi:

- \* tidak mengonsumsi buah yang memiliki bekas gigitan kelelawar,
- \* mencuci dan mengupas buah sebelum dikonsumsi,
- \* menghindari produk hewani mentah atau setengah matang,
- \* penggunaan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan,
- \* penerapan perilaku hidup bersih dan sehat,
- \* serta skrining kesehatan bagi pelaku perjalanan dari wilayah terdampak.

Di dalam negeri, Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat sistem kewaspadaan dini dan pengawasan di seluruh pintu masuk negara, guna mencegah masuknya virus Nipah ke Indonesia.

Meski situasi di India masih dinilai terkendali, kemunculan kembali virus mematikan ini menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan lintas negara tetap menjadi kunci dalam menghadapi ancaman penyakit menular global. ●

"Tapi kita sudah mempersiapkan, sudah sosialisasi, dan kita sudah siapin reagen PCR-nya. Sama kayak virus, tesnya pakai PCR"



# EKSODUS PEMAIN NATURALISASI KE LIGA LOKAL

Liga Indonesia Super League kini mulai dipenuhi pemain naturalisasi. Eksodus pemain abroad ini menjadi pertanyaan tersendiri apakah kualitas liga lokal meningkat atau pemainnya yang butuh jam terbang akibat sering menjadi bangku cadangan

Tidak ada larangan memang untuk memanfaatkan pemain naturalisasi yang selama ini berkari di luar namun memilih pulang ke Indonesia. Bahkan diantara mereka sengaja memutus kontrak agar bisa pulang dan bermain di Liga Indonesia.

Sebut saja, Cyrus Margono, yang memilih tidak memperpanjang di Klub Dukagjini Kosovo dan akhir bermain untuk Persija Jakarta. Kemudian ada Ivar Jenner yang memilih berpisah dengan klub Belanda, FC Utrecht dan kini merapat ke Dewa United.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa mengintervensi langkah yang diambil para pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk bermain di Liga Indonesia.

"Yang seperti kami sampaikan. Per-

tama ini pilihan mereka. Kami tidak bisa tahan mereka. Kami tidak gaji mereka," ujar Arya.

"Mungkin beda kalau kami yang menggaji mereka, pasti bisa diarahkan. Tapi ini soal pilihan mereka dan Hak asasi mereka juga, kami tidak bisa tahan," jelas Arya.

Arya menduga para pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu tertarik berkancah di BRI Super League karena naiknya level kompetisi, yang dibuktikan bisa mendatangkan pemain level Eropa.

"Mungkin karena banyak pemain naturalisasi datang, kualitas liganya naik sehingga membuat pemain-pemain naturalisasi mau datang," ucap Arya.

Gaji yang Menggiurkan

Gaji yang lebih tinggi menjadi alasan mengapa pemain naturalisasi ini me-



milih pulang kampung halaman dan bermain di BRI Super League.

Terbaru, Shayne Pattynama yang baru direkrut Persija Jakarta di paruh kedua BRI Super League dari Buriram Thailand. Kemudian ada Dion Markx, pemain timnas Indonesia U23 yang sebelumnya bermain di NEC Belanda yang direkrut Persib Bandung.

Baik Persija Jakarta dan Persib Bandung sebelumnya juga sudah menarik beberapa pemain naturalisasi yang sempat bermain di liga luar atau abroad. Ada Thom Hays dan Eliano Reijnders di Persib Bandung. Kemudian ada Jordi Amat di Persija Jakarta.

Mereka bermain di Indonesia mendapat gaji yang cukup fantastis. Kemudian kesempatan bermain juga lebih besar daripada menjadi abroad.

Saat pemain dengan gaji tertinggi BRI Super League dipegang Thom Hays



di Persib Bandung yang mencapai Rp. 17,38 miliar per tahun.

Untuk soal gaji Asnawi Mangkualam sempat mengungkapkan perbedaan di Liga Indonesia dan liga luar sangat berbeda jauh. Saat di PSM Makassar saja gajinya sampai Rp 100 juta sedangkan di klub lamanya Korea Selatan hanya di gaji Rp 20 juta saja.

Sementara wonderkid Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan yang sempat bermain di Oxford United di Liga Inggris, mendapat gaji hanya sekitar Rp 60 juta per bulan (£3.000). Gaji Marselino ini ter-

PEMAIN DIASPORA PENDATANG BARU  
DI SUPER LEAGUE 2025/26

<p><b>27</b> TAHUN</p> <p><b>SHAYNE PATTYNAMA</b></p>	<p><b>30</b> TAHUN</p> <p><b>THOM HAYS</b></p>	<p><b>25</b> TAHUN</p> <p><b>ELIANO REIJNDERS</b></p>
<p><b>33</b> TAHUN</p> <p><b>JORDI AMAT</b></p>	<p><b>22</b> TAHUN</p> <p><b>RAFAEL STRUICK</b></p>	<p><b>20</b> TAHUN</p> <p><b>JENS RAVEN</b></p>

bilang jauh lebih rendah dibandingkan pemain lokal Indonesia di Liga 1 BRI Super League.

Bagi beberapa pemain, selain gaji yang cukup besar mereka juga merasa nyaman dengan suasana di Indonesia bahkan memilih berkeluarga.

Sehingga ada juga yang memilih naturalisasi meski bukan keturunan Indonesia seperti Ilija Spasojević pemain asal Montenegro yang kini bermain untuk Bhayangkara FC dan Marc Klok dari Belanda yang bermain bersama Persib Bandung. •

**DAFTAR PEMAIN BERGAJI TERTINGGI  
DI BRI SUPER LEAGUE 2025/2026:**

1. Thom Hays - Persib Bandung (Rp. 17,38 M)
2. Layvin Kurzawa - Persib Bandung (Rp. 13,04 M) \*
3. Rizky Ridho - Persija Jakarta (Rp. 11,30 M)
4. Eliano Reijnders - Persib Bandung (Rp. 10,43 M)
5. Noah Sadaoui - Dewa United (Rp. 10,43 M) \*
6. Tijjmen Goppel - Bali United (Rp. 10,43 M)
7. Adrian Luna - Persik Kediri (Rp. 10,43 M) \*
8. Teppei Yachida - Bali United (Rp. 10,43 M) \*
9. Diego Campos - Bali United (Rp. 10,43 M) \*
10. Jordi Amat - Persija Jakarta (Rp. 10,43 M)

# TETAP MEMILIH SEBAGAI ABROAD DAN SUKSES

Meski banyak yang pulang kampung dan memilih bermain di Liga Indonesia, sebagian pemain keturunan lebih memilih bertahan bahkan kini menjadi bagian penting klub yang dibelanya.

**T**ernyata ada banyak pemain keturunan Indonesia yang memilih abroad atau bermain di klub-klub luar negeri. Meski mungkin gajinya tidak sebesar di BRI Super League namun mereka tidak tergiur hingga mampu menjadi bagian penting klubnya.

Dari banyak pemain keturunan yang merumput di luar negeri, Belanda menjadi yang terbesar. Terbaru, Ajax Amsterdam merekrut Maarten Paes, kiper Timnas Indonesia yang sebelumnya bermain di Dallas FC, klub MLS Amerika Serikat. Ia dikontrak 4 tahun, hingga musim 2029.

Nama Maarten Paes ternyata sangat populer di Belanda khususnya di media sosial. Media Belanda Algemeen Dagblad mengatakan bahwa interaksi di sosial media pada tahun 2024 di MLS, Maarten Paes hanya kalah dari seorang Lionel Messi. Bahkan, Paes mengalahkan Luis Suarez dan Olivier Giroud dalam popularitas di sosial media saat itu.

"Interaksi yang begitu besar membuat Paes mendapati dirinya berada di bawah Lionel Messi pada peringkat MLS tahun 2024, di posisi kedua (Interaksi Sosial Media). Lionel Messi menghasilkan 72 juta interaksi, yang 140 kali lebih banyak daripada Paes (522.000), tetapi Paes mengungguli bintang-bintang seperti Luis Suárez dan Olivier Giroud."



Pemain abroad lainnya yakni Jay Idzes, kapten Timnas Indonesia yang kini memperkuat Sassuolo, klub Serie A Italia. Ia menjadi salah satu pemain kunci Sassuolo dan banyak diincar klub besar seperti AC Milan.

AC Milan membidik kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes (25/CB) sebagai pemain baru pada Transfer musim dingin ini. Ketertarikan AC Milan karena Jay Idzes mampu bermain baik di formasi 3 bek dan memiliki usia yang masih muda.

Nilai pasar Jay Idzes (25/CB) mengalami kenaikan cukup signifikan dengan angka Rp173.82 miliar per hari ini (sebelumnya Rp130.36 miliar).

Bahkan Sassuolo siap melepas Jay

Idzes dan Tarik Muharemovic jelang bursa transfer Januari 2026 setelah ketertarikan serius dari AC Milan

Namun Sassuolo memberikan satu syarat untuk melepas Jay dan Tarik dalam satu paket dengan nilai total €40 juta kepada siapapun klub yang berminat.

Timnas Indonesia juga punya kiper tangguh lainnya yakni Emil Audero yang kini bermain di Cremonese, Serie A Italia. Bahkan Emil Audero tercatat sebagai kiper yang memuncaki daftar penyelamatan terbanyak Serie A hingga pekan ini dengan 94 saves.

Pria berdarah Lombok Nusa Tenggara Barat ini mengalahkan Arijanet Muric

(Sassuolo/91), Elia Caprike (Cagliari/87), Ivan Provedel (Lazio/85), Marco Carne-secchi (Atalanta/80), dan David de Gea (Fiorentina/78).

Sementara Calvin Verdonk menjadi pemain Indonesia pertama yang tampil di Ligue 1 Prancis. Ini bukan hanya bagi karier pribadi tetapi juga bagi representasi Indonesia di sepakbola Eropa.

"Itu membuat saya bangga. Saya adalah pemain Indonesia pertama di Ligue 1. Jadi tentu perasaan yang membanggakan, dan saya berharap bisa menunjukkan kepada masyarakat Indonesia

yang menghadapi Heidenheim.

Dari puluhan pemain Indonesia yang berstatus abroad, pemain Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda, menjadi yang terbanyak memiliki menit bermain yakni lebih dari 1.865 menit jumlah ini terus bertambah karena tercatat di Januari lalu.

Kemudian ada Nathan Tjoe A On (Willem II/Belanda/1704 menit), Kevin Diks (Borussia Monchengladbach/1464), Jay Idzes (Sassuolo/1440), Emil Audero (Cremonese/1.170), dan Calvin Verdonk (Lille/981 menit).



bahwa mereka juga bisa mencapai level tertinggi," ujar Verdonk

Sedangkan Kevin Diks tercatat sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain di Bundesliga Jerman. Hebatnya, Kevin Diks lebih populer di Instagram ketimbang klubnya Borussia Monchengladbach yang hanya memiliki 1,2 juta followers. Sedangkan Kevin Diks ini mengoleksi sekitar 1,9 juta pengikut di Instagram.

Bek sayap Timnas Indonesia, ini juga sempat masuk ke dalam Team of The Week pekan ke-11 Bundesliga. Kevin Diks tampil solid dan berhasil menciptakan satu gol melalui titik putih untuk Borussia Monchengladbach saat me-

Sedangkan pemain termahal Indonesia masih dipegang Jay Idzes. Dengan harga €10 juta euro atau setara dengan Rp173.82 miliar Jay Idzes semakin kokoh sebagai pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi.

Dikuti Kevin Diks (Borussia Monchengladbach/Rp86.91 miliar), Mees Hilgers (FC Twente/Rp69.53 miliar), Emil Audero (Cremonese/ Rp55.62 miliar), dan Calvin Verdonk (OSC Lille/ Rp51.14 miliar).

**Masuk Pantauan John Herdman**

Semua pemain abroad ini ternyata sudah masuk pantauan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Keputusan

**SEBARAN PEMAIN ABROAD INDONESIA :**

- LIGA BELANDA**
  - Maarten Paes - Ajax
  - Dean James - Go Ahead Eagles
  - Mees Hilgers - Twente
  - Justin Hubner - Fortuna Sittard
  - Miljano Jonathans - Excelsior
  - Nathan Tjoe-A-On - Willem II
  - Tim Geypens - Emmen
- LIGA PRANCIS**
  - Calvin Verdonk - Lille
- LIGA INGGRIS**
  - Elkan Baggot - Ipswich
  - Ole Romeny - Oxford
- LIGA ITALIA**
  - Emil Audero - Cremonese
  - Jay Idzes - Sassuolo
- LIGA JERMAN**
  - Kevin Diks - Gladbach
- LIGA BELGIA**
  - Ragnar Oratmangoen - Dender
  - Joey Pelupessy - Lommel
- LIGA SLOVAKIA**
  - Marselino Ferdinan - AS Trenčín
- LIGA THAILAND**
  - Sandy Walsh - Buriram
  - Asnawi Mangkualam - Port
  - Pratama Arhan - Bangkok United
- LIGA MALAYSIA**
  - Ramadhan Sananta - DPMM Brunei
  - Yohanes Kandaimu - Kelantan
- LIGA CAMBODIA**
  - Sulthan Zaky - MOI Kompong Dewa
  - Lotra Widiyanto - MOI Kompong Dewa
- LIGA FILIPINA**
  - Muh. Mishbah - Aguilas UMaK
  - Reycredo Bukit - Aguilas UMaK
- LIGA USA**
  - Adrian Wibowo - Los Angeles FC
- LIGA BRASIL**
  - Welber Jardim - São Paulo U20
- LIGA AUSTRALIA**
  - Mathew Baker - Melbourne City

ini ternyata mendapat dukungan penuh dari beberapa klub.

John Herdman mengatakan bahwa ia sudah mengontak kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes dan 60 pemain lainnya sekaligus memberitahu bahwa pelatih Timnas Nasional sedang memantau mereka.

"Kita punya kesempatan bagus pada Maret, untuk mengawali langkah bersama. Saya sudah mulai berkomunikasi dengan kapten (Jay Idzes) dan beberapa sosok kunci."

"Saya sudah mengontak lebih dari 60 pemain Indonesia untuk memberi tahu kalau saya sudah ada di sini dan saya memperhatikan (mereka)," kata Johan Herdman. ●



# MISTERI BOARD OF PEACE DIBONGKAR

GREAT INSTITUTE: KEPUTUSAN PRABOWO  
DI DAVOS SUDAH BENAR

Berbagai kritik terhadap pada keputusan Indonesia bergabung dalam “Board of Peace” yang diumumkan di sela pertemuan World Economy Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, 22 Januari lalu, merupakan apresiasi dari masyarakat luas pada kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo Subianto.

“Kritik dan komentar terhadap keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace adalah bentuk kepedulian. Artinya masyarakat Indonesia peduli pada garis lurus foreign policy kita,” ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa dalam dialog GREAT Talks yang ditayangkan Kamis, 29 Januari 2026.

“Kebijakan Presiden ternyata diapresiasi oleh publik. Apalagi untuk urusan Palestina yang merupakan agenda lama yang kita simpan di playbook foreign policy kita,” sambungnya.

Namun bagaimana pun juga Teguh mengatakan bahwa “Board of Peace” adalah produk PBB yang dilahirkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang diterbitkan pada bulan November 2025.

Dalam Resolusi DK PBB itu disebutkan bahwa DK PBB menerima Comprehensive Plan perdamaian di Gaza yang disampaikan Donald Trump. DK PBB juga memberikan pengakuan pada kontribusi sejumlah negara seperti AS, Qatar, Mesir dan Turkiye yang ikut memfasilitasi upaya perdamaian di Gaza.

Sementara pada poin berikutnya, DK PBB menerima pembentukan “Board of Peace”.

“Jadi kalau kita melihat Board of Peace dilahirkan melalui Resolusi DK PBB, maka tidak perlu meragukan itikad kehadiran Board of Peace,” sambungnya.

Teguh yang juga mendorong semua pihak untuk mempelajari kembali Resolusi DK PBB 2803 tentang perdamaian di Gaza yang mencakup pembentukan “Board of Peace” dan mekanisme kerja umumnya. Juga 20 poin “Comprehensive Plan” yang ditawarkan Trump yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari Resolusi DK PBB 2803 itu.

Poin pertama dalam Comprehensive Plan itu adalah melakukan deradikalisasi di Gaza dan menjauhkan Gaza dari segala bentuk teror.

“Karena itu semua saya menilai apa yang diputuskan Presiden Prabowo ini konsisten dengan perjuangan kita untuk menciptakan perdamaian di Palestina,” kata Teguh lagi.

Pada bagian lain, mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu juga mengatakan bahwa isu perdamaian di Gaza ini bukan isu penentuan nasib sendiri atau self determination.

“Isu self determination bagi Palestina sudah selesai. Palestina ini adalah negara yang berdaulat, maka ia punya bendera di Markas PBB dan statusnya observer state,” masih kata Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional Uni-



Rencana Komprehensif Trump itu juga menyatakan bahwa Hamas dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) harus menghentikan aksi saling serang.

Pelucutan senjata pihak-pihak yang bertikai adalah suatu keharusan untuk mencapai fase pertama dari perdamaian, yaitu negative peace sebagai situasi di mana tidak ada kekerasan, untuk menuju positive peace.

“Untuk Hamas istilah yang digunakan meletakkan senjata, sementara untuk Israel menarik diri. Kenapa? Karena Gaza bukan punya Israel,” kata Teguh lagi.

Teguh juga mengatakan, di dalam Rencana Komprehensif itu juga disebutkan bahwa warga Gaza tidak akan diusir keluar secara paksa dari tanah mereka.

versitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dia menambahkan isu Palestina tidak pernah dibahas di Komisi IV PBB tentang Politik Khusus dan Dekolonisasi yang membahas wilayah-wilayah di muka bumi yang belum memerintah dirinya sendiri atau non-self governing territories.

Teguh memahami hal ini karena dia merupakan salah seorang petisioner masalah Sahara Barat yang dibahas di Komisi IV tersebut.

“Saya melihat Board of Peace ini sebagai suatu ikhtiar. Bukan ikhtiar Donald Trump. Setelah proposal Donald Trump diadopsi DK PBB, maka ini menjadi ikhtiar kita bersama, masyarakat internasional,” demikian Teguh Santosa. ●

# MEMBANGUN EKOSISTEM PARIWISATA YANG AMAN DAN NYAMAN

Keselamatan wisata merupakan pondasi utama dalam membangun ekosistem pariwisata generatif yang berkelanjutan di Indonesia. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang bergantung keamanan dan kenyamanan di lingkungan objek wisata. Hal ini menjadi perhatian penting bagi Kementerian Pariwisata.

**"K**eselamatan bukan sekadar pelengkap dalam aktivitas wisata, melainkan prasyarat mutlak untuk mewujudkan destinasi yang tangguh, berdaya saing, dan dipercaya wisatawan," kata Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham, dalam opening remarks Kuliah Umum bertajuk "Keselamatan Wisata" di Politeknik Pariwisata Makassar.

Martini menjelaskan keselamatan wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi cuaca dan karakteristik alam, hingga aspek teknis operasional serta faktor manusia atau human error. Namun demikian, standar keselamatan yang kuat hanya dapat terwujud melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

"Selain civitas akademika, pelaku usa-



ha dan PHRI memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan wisata. Tidak kalah penting, kita sendiri sebagai wisatawan dan calon wisatawan juga memiliki tanggung jawab yang sama," ujar Martini.

Menurutnya, wisatawan masa kini tidak lagi dapat bersikap pasif. Mereka

perlu menjadi wisatawan yang bertanggung jawab melalui dua langkah utama, yakni memiliki kesiapan yang matang dalam menjaga keamanan diri sendiri serta memastikan kelayakan perbekalan yang dibawa, dan bersikap disiplin dengan memilih jasa pelayanan pariwisata yang telah me-



miliki sertifikat, izin resmi, serta lisensi khusus.

**Luncurkan Seleksi Masuk Poltekpar**

Untuk terus memperkuat fondasi pembangunan pariwisata nasional dengan penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peluncuran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui Seleksi Bersama Masuk (SBM) Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Tahun Akademik 2026/2027.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan transformasi menuju pariwisata berkualitas sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia.

“Daya saing sektor pariwisata ke depan tidak hanya bergantung pada destinasi, tetapi juga pada kualitas layanan, pengalaman wisatawan, serta kemampuan industri dalam beradaptasi dengan perubahan global,” kata Menpar Widiyanti.

Sepanjang 2025, kinerja pariwisata Indonesia menunjukkan momentum positif yang memperkuat optimisme pembangunan sektor ini. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta orang, sementara perjalanan wisatawan nusantara menembus 1,2 miliar perjalanan.

Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara tercatat sebesar 1.267 dolar AS, melampaui target yang telah ditetapkan. Sektor pariwisata juga me-

nyerap 25,91 juta tenaga kerja dan terus menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Untuk menjaga tren positif tersebut, Kemenpar menetapkan lima program unggulan tahun 2026, yaitu Peningkatan Keselamatan Berwisata, Pengembangan dan Penguatan Desa Wisata, Program Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, serta transformasi digital pariwisata melalui

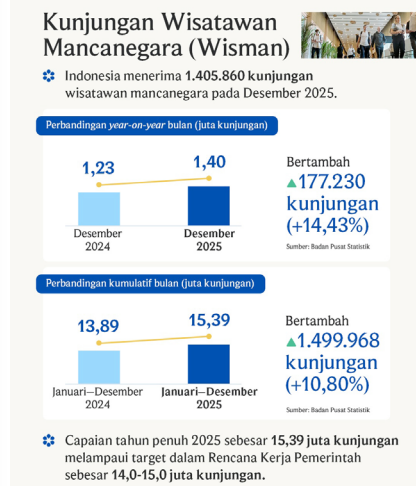
dunia kerja.

“Proses pembelajaran, pembentukan karakter, dan penguatan kompetensi yang dijalani sejak hari ini akan menjadi bekal penting untuk menjawab kebutuhan industri pariwisata masa depan. Semoga penerimaan mahasiswa baru jalur Seleksi Bersama Masuk tahun akademik 2026/2027 berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pariwisata Indonesia,” kata Menpar.

Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekpar 2026/2027, Herry Rachmat Widjaja, menjelaskan total kuota penerimaan mahasiswa baru pada enam Politeknik Pariwisata di lingkungan Kemenpar yakni Medan, Palembang, Bandung, Bali, Lombok, dan Makassar, tahun ini berjumlah 3.610 mahasiswa.

Dari jumlah tersebut, alokasi penerimaan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk ditetapkan sebesar 60 persen atau setara 2.166 mahasiswa. Sementara jalur Seleksi Mandiri Masuk sebesar 40 persen atau setara 1.444 mahasiswa yang tersebar di enam Politeknik Pariwisata.

Adapun program studi yang dibuka meliputi 10 program studi di Poltekpar NHI Bandung, 9 program studi di Poltekpar Bali, 9 program studi di Poltekpar Medan, 8 program studi di Poltekpar Makassar, serta masing-masing 4 program studi di Poltekpar Palembang dan Poltekpar Lombok. Selain itu, terdapat masing-masing 1 program studi di PSDKU Sragen dan PSDKU Manado. ●



Tourism 5.0.

Menpar Widiyanti meyakini Politeknik Pariwisata memegang peran strategis dalam memberikan fondasi pendidikan vokasi yang kuat, membekali generasi muda dengan keterampilan terapan, pemahaman industri yang komprehensif, serta kesiapan menghadapi tuntutan

THR ASN 2026

# PEMERINTAH SIAPKAN ANGGARAN RP55 TRILIUN

Kabar menggembirakan datang bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta anggota TNI dan Polri.

**P**emerintah Republik Indonesia memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 akan kembali dilaksanakan dengan alokasi anggaran mencapai Rp55 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan realisasi pembayaran diupayakan berlangsung pada awal bulan puasa, jauh sebelum perayaan Idulfitri.

Walaupun tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi, alokasi dana telah teranggarkan dalam proyeksi belanja negara triwulan I tahun 2026, dengan total mencapai Rp809 triliun. Kebijakan percepatan belanja ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun.

Selain anggaran THR, pemerintah juga menyiapkan beberapa program strategis untuk mendorong konsumsi dan investasi. Langkah tersebut dipandang krusial untuk memperkuat momentum pertumbuhan sejak awal 2026.

Rincian alokasi belanja strategis mencakup Rp62 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rp6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pas-cagempa di wilayah Sumatera, Rp13 triliun untuk paket stimulus ekonomi yang mendukung aktivitas usaha dan



konsumsi domestik.

Pendanaan tersebut dirancang untuk meningkatkan perputaran ekonomi secara luas, terutama melalui konsumsi rumah tangga di kuartal pertama.

### Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5-6 Persen

Menteri Keuangan optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 dapat menembus kisaran 5,5 persen hingga 6 persen.

Jika terealisasi, capaian ini dipandang mampu mendorong laju ekonomi keluar dari tren stagnan di angka sekitar 5 persen yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Dorongan ini diperkirakan bersumber dari peningkatan konsumsi masyarakat menjelang dan selama musim libur besar, termasuk perayaan Imlek dan Idulfitri, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang semakin populer.

Perkiraan Jadwal Pencairan THR ASN dan Swasta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto secara langsung menyampaikan bahwa "pencairan THR memang direncanakan lebih awal, yakni sekitar tiga minggu sebelum Hari Raya".

Berdasarkan kalender keagamaan, Hari Raya Idulfitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026. Mengacu pada aturan yang berlaku, pencairan THR ASN diprediksi sudah mulai masuk ke rekening penerima pada awal hingga pertengahan Maret 2026.

Bagi ASN, mekanisme pencairan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mensyaratkan pembayaran paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya.

Oleh karena itu, prediksi awal pencairan THR bagi PNS dan PPPK adalah 3 Maret 2026, dengan batas akhir realisasi anggaran pada 17 Maret 2026.

Kalender cuti bersama yang diproyeksikan dimulai sekitar 20 Maret 2026 menjadi acuan agar seluruh hak finansial ASN tersalurkan sebelum memasuki masa libur Lebaran.

Sementara itu, THR untuk pekerja sektor swasta diatur melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yang mewajibkan perusahaan membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya (H-

7).

Dengan asumsi Idulfitri jatuh pada 21 atau 22 Maret, batas akhir pembayaran THR karyawan swasta diperkirakan 13-14 Maret 2026.

Regulasi ketenagakerjaan menegaskan bahwa pembayaran THR oleh perusahaan harus dilakukan secara penuh dan dalam bentuk tunai, serta mempertimbangkan masa kerja karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila perusahaan tidak memenuhi

Kinerja, sesuai kelas jabatan atau peringkat jabatan.

Besaran akhir yang diterima masing-masing pegawai bergantung pada pangkat, golongan, jabatan, serta kebijakan yang ditetapkan dalam regulasi resmi tahun berjalan.

Pemerintah biasanya menerbitkan Peraturan Pemerintah dan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran THR melalui satuan kerja dan Kantor Pelayanan Per-



kewajiban tersebut dalam tenggat waktu, akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 persen dari total nilai tunjangan yang seharusnya dibayarkan.

Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan hak pekerja menjelang hari besar keagamaan, sekaligus menjadi pendorong stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat.

Komponen THR yang Akan Diterima ASN, TNI, dan Polri 2026

Secara umum, komponen THR aparatur negara mengacu pada regulasi pemerintah mengenai pemberian THR dan gaji ke-13. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025 komponen yang dibayarkan meliputi, Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Pangan, Tunjangan Jabatan atau Umum, Tunjangan

bendaharaan Negara (KPPN).

Besaran THR yang akan diterima pensiunan dihitung berdasarkan komponen penghasilan, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tambahan penghasilan lainnya. Nominal yang diterima setiap pensiunan bervariasi, tergantung pada pangkat dan golongan mereka.

Catatan Mureks menunjukkan, kisaran THR berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

- ▶ Golongan I (Ia-Ic): Rp1.748.100 – Rp2.256.700
- ▶ Golongan II (IIa-IIc): Rp1.748.100 – Rp3.208.800
- ▶ Golongan III (IIIa-IIIc): Rp1.748.100 – Rp3.866.100
- ▶ Golongan IV (IVa-IVe): Rp1.748.100 – Rp4.957.100. ●

# 22.000 DAPUR AKTIF, MBG SERAP SATU JUTA TENAGA KERJA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan peran strategis, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi desa.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa skema produksi dan distribusi makanan bergizi yang dijalankan pemerintah telah membentuk rantai ekonomi baru yang langsung menyentuh desa-desa di berbagai wilayah Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul, Jawa Barat, pada 2 Februari 2026.

Presiden Prabowo mengungkapkan, hingga awal 2026 pemerintah telah mengoperasikan sekitar 22.000 dapur MBG di berbagai daerah. Setiap dapur melibatkan rata-rata sekitar 50 pekerja harian untuk kegiatan pengolahan, pengemasan, dan distribusi makanan.

Dengan struktur tersebut, pelaksanaan MBG saat ini telah menciptakan sekitar satu juta lapangan

kerja langsung di tingkat lokal.

"Dengan 22.000 dapur saja, kita sudah menciptakan sekitar satu juta lapangan kerja. Mereka bekerja dan dibayar setiap hari," ujar Presiden.

Skema ini menjadi salah satu model penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas terbesar yang saat ini berjalan di Indonesia.

Lebih jauh, Prabowo menjelaskan bahwa dampak ekonomi MBG tidak berhenti pada tenaga kerja dapur. Setiap dapur membutuhkan pasokan bahan pangan segar setiap hari, mulai dari sayuran, telur, ikan, ayam, daging, hingga komoditas hortikultura lainnya.

"Dalam praktiknya, satu dapur MBG dapat melibatkan sekitar 10 hingga 20 pemasok lokal, yang terdiri atas petani,



peternak, nelayan, pedagang kecil, dan koperasi desa," tambahnya.

Model ini secara langsung memperluas pasar produk pangan lokal, menstimulasi produksi petani dan peternak skala kecil, serta mendorong tumbuhnya usaha logistik dan distribusi di pedesaan.

Rantai pasok pendek dari produsen lokal langsung ke dapur MBG juga memperkuat perputaran uang di desa, sekaligus menekan ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

### Target 82 Juta Penerima dan Proyeksi 3-5 Juta Pekerjaan

Presiden menegaskan bahwa perluasan cakupan MBG masih terus berjalan. Apabila program ini mencapai target sekitar 82 juta penerima manfaat, pemerintah memperkirakan potensi penciptaan lapangan kerja dapat meningkat menjadi sekitar 3 hingga 5 juta orang.

"Itu nanti di ujungnya, kalau kita sampai 82 juta penerima, kita akan menciptakan tiga sampai lima juta lapangan kerja," kata Presiden.

Perluasan ini mencakup penguatan dapur produksi baru, peningkatan volume distribusi, serta perluasan jaringan pemasok pangan berbasis desa.

Dari perspektif kebijakan pembangunan, MBG dirancang sebagai program sosial yang memiliki efek ekonomi berlapis. Pemerintah menempatkan MBG sebagai bagian dari strategi memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah, produktivitas tenaga kerja lokal dan basis produksi pangan dalam negeri.

Keterlibatan tenaga kerja, pelaku UMKM pangan, petani, peternak, dan nelayan desa membuat belanja negara dalam program MBG langsung mengalir ke sektor riil. Pola ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan penguatan ekonomi domestik, perluasan kesempatan kerja, dan pemerataan pertumbuhan antarwilayah.

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi Indonesia, MBG berfungsi sebagai stimulus permintaan sekaligus penopang sisi produksi. Permintaan bahan pangan meningkat secara stabil dan terjadwal, sementara kapasitas produksi desa terdorong untuk menyesuaikan skala usaha.

Presiden juga menekankan bahwa kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah tersedianya pekerjaan yang nyata, bukan sekadar janji kebijakan.

"Saya buktikan kepada saudara-saudara, sebagai Presiden Republik Indonesia, sekarang kita sudah menghasilkan sekitar satu juta lapangan kerja hanya dari MBG," tegasnya.

Dalam keterangan resmi BGN, Wakil Kepala BGN untuk Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan skala penciptaan lapangan kerja dari program MBG setiap dapur MBG membutuhkan sekitar 47 tenaga kerja untuk

pengolahan dan distribusi makanan.

"Dengan sekitar 21.000 unit dapur yang sudah beroperasi di Indonesia, program ini telah menyerap hampir 987.000 tenaga kerja langsung. Selain itu, sekitar 40.000 pelaku UMKM sebagai pemasok lokal juga mendapatkan efek positif dari rantai pasok MBG," sambungnya.

Ditambahkan Koordinator Perencanaan Pemerintah, Airlangga Hartarto menyebut dengan alokasi anggaran sekitar Rp80 triliun per kuartal yang langsung mengalir ke masyarakat melalui MBG. ●



## 1TAHUN PEMERINTAHAN TOHA-ROHMAN

Sejumlah program populer Bupati Haji Toha Tohet - Wabup Abdur Rohman Husen mulai terealisasi, pondasi Pembangunan daerah telah dipancarkan di Bumi Serasan Sekate sebagai wujud komitmen untuk Masyarakat Musi Banyuasin.

Satu tahun kepemimpinan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Haji Toha Tohet dan Wakil Bupati Abdur Rohman Husen mencatatkan sejumlah capaian strategis. Mulai dari pelunasan utang daerah sekitar Rp 350 miliar hingga penurunan angka kemiskinan dari 12,88 persen menjadi 9,97 persen pada 2025.

# TANCAP GAS LUNASI UTANG RP350 MILIAR HINGGA TURUNKAN KEMISKINAN

**K**epemimpinan Bupati Haji Toha - Wakil Bupati Abdur Rohman terbilang historis. Keduanya dilantik langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Istana

lunasi utang daerah sekitar Rp350 Miliar. "Pelunasan utang bukan sekadar angka, tetapi strategi menjaga ruang fiskal agar pembangunan ke depan lebih lulus dan berkelanjutan," bebarnya.

## 1TAHUN PEMERINTAHAN TOHA-ROHMAN



**H.M. Toha Tohet, S.H.**  
Bupati Kab. Musi Banyuasin

**Abdur Rohman Husen**  
Wakil Bupati Kab. Musi Banyuasin

Negara, menjadi babak baru perjalanan Pemerintahan di Bumi Serasan Sekate.

"Alhamdulillah, satu tahun ini kami fokus membenahi fondasi. Stabilitas fiskal kami jaga, pelayanan publik kami perkuat, dan program pengentasan kemiskinan kami percepat. Target kami jelas, Muba harus maju lebih cepat dan masyarakatnya semakin sejahtera," tegas Bupati Muba Haji Toha.

Pada masa awal kepemimpinannya, lanjut Bupati Haji Toha, Pemkab Muba mengambil langkah berani dengan me-

la menjelaskan pelunasan tersebut dilakukan melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. "Dengan kondisi fiskal yang lebih sehat, kapasitas pembiayaan program prioritas menjadi lebih kuat. Ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan, apalagi di tengah penurunan transfer pusat," ujarnya.

Di sektor birokrasi, Pemkab Muba memperkuat manajemen ASN, dimana sepanjang 2025 sebanyak 151 CPNS dan 2.838 PPPK dilantik. Disusul PPPK

formasi 2024 periode kedua sebanyak 2.563 orang. Penataan tenaga honorer juga diarahkan melalui skema PPPK paruh waktu.

“Pelayanan publik yang baik dimulai dari ASN yang profesional. Karena itu penguatan birokrasi menjadi prioritas,” urainya.

**Hadirkan Banyak Inovasi**

Ia menambahkan, Inovasi pelayanan publik turut dipercepat, melalui Disdukcapil, hadir program PADUKA ANTAT MUBA yakni pelayanan antar dokumen kependudukan gratis langsung ke ru-

gram seragam sekolah gratis pada 24 Desember 2025,” terangnya.

Di bidang olahraga, kata Haji Toha, Muba sukses menjadi tuan rumah Porprov-Peparprov Sumsel 2025 dan keluar sebagai juara umum. “Even tersebut turut menggerakkan ekonomi kerakyatan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Muba Dr Mursalin mengungkapkan, dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui bantuan modal UMKM, pembentukan wirausaha muda, pelatihan tenaga kerja, hingga dukungan sektor pertanian dan perikanan

melalui BAZNAS, serta insentif bagi 674 marbot Masjid.

“Untuk memperkuat pelayanan sosial desa, sebanyak 75 desa pada tahap awal 2025 menerima bantuan mobil operasional. Program ini akan direalisasikan bertahap melalui APBD,” tuturnya.

Mursalin menambahkan, memasuki tahun 2026, Pemkab Muba tetap memprioritaskan penguatan PKM, digitalisasi UMKM melalui Klinik Usaha, serta pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.

“Di tengah keterbatasan anggaran akibat penurunan transfer pusat, pem-

**PROGRAM PRIORITAS MULAI TEREALISASI!**

- KATE, KIK & KIP (GABIS SAMPAI BUMAH)**  
Layanan administrasi kependudukan kini diantar langsung ke rumah warga tanpa biaya. Tidak ada lagi alasan terhambat karena jarak atau biaya. Pemerintah hadir memudahkan, bukan mempersulit.
- BEASISWA PRESTASI SAMPAI SARJANA**  
Anak daerah berprestasi dan kurang mampu didukung hingga jenjang sarjana. Akses pendidikan tinggi tidak lagi dibatasi kemampuan ekonomi. Prestasi diberi jalan, masa depan diperjuangkan.
- BANTUAN SAYANG ANAK (BASANAK)**  
Program ini memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan perhatian & dukungan. Pemerintah daerah hadir mengga tumbuh kembang generasi penerus. Tidak ada anak yang dibiarkan berjalan sendiri.
- BANTUAN MODAL USAHA UMUM PETANI & NELAYAN**  
Pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan mendapat tambahan modal untuk meningkatkan produktivitas. Bantuan ini mendorong usaha berkembang dan pendapatan naik. Ekonomi rakyat diperkuat dari bawah.
- SANTUNAN KEMATIAN DAN FAKIR MISKIN**  
Pemerintah memberikan santunan bagi keluarga yang berduka dan masyarakat fakir miskin. Bantuan ini meringankan beban di saat paling sulit. Solidaritas sosial diwujudkan secara nyata.
- MEMPERLUAS JARINGAN GAS RUMAH TANGGA**  
Akses jaringan gas diperluas untuk menekan biaya energi rumah tangga. Warga mendapat layanan yang lebih aman dan efisien. Infrastruktur dibangun untuk kenyamanan jangka panjang.
- BANTUAN BIBIT PERTANIAN PERKEBUN & PERIKANAN**  
Petani dan nelayan mendapatkan bantuan bibit unggul untuk meningkatkan hasil produksi. Program ini fokus pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan. Ketahanan pangan diperkuat dari sumbernya.
- Mobil Desa Layanan Masyarakat**  
Mobil desa disiapkan untuk mempercepat layanan masyarakat. Akses transportasi layanan menjadi lebih mudah dan responsif. Pelayanan publik dibuat lebih dekat dan cepat.
- PROGRAM KELUARGA MAJU**  
Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Bantuan ini bersifat produktif, bukan konsumtif. Fokus pada pemberdayaan, bukan ketergantungan. Keluarga didorong menjadi lebih mandiri.
- GRATIS SERAGAM SEKOLAH**  
Siswa mendapatkan seragam sekolah gratis untuk meringankan beban orang tua. Tidak ada lagi alasan anak putus sekolah karena biaya seragam. Pemerintah berupaya menentuhkan hak warga di bidang pendidikan.
- BANTUAN GURU MENGAJAR**  
Guru mengaji mendapatkan dukungan sebagai bentuk penghargaan atas perannya membina generasi. Pendidikan agama diperkuat dari tingkat dasar. Pemerintah memberi perhatian pada pembinaan karakter.
- PEMBERDAYAAN DISABILITAS**  
Program ini hadir untuk memastikan peyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek bantuan, tetapi sebagai subjek pembangunan. Melalui pelatihan keterampilan dan vokasi, mereka dibekali kemampuan mandiri dan produktif.
- EKOSISTEM INDUSTRI HALAL**  
Pemerintah serius menjadikan pelaku usaha lokal naik kelas melalui sertifikasi halal yang masif dan terukur. Ratuhan sertifikat halal berhasil ditertibkan. Ekosistem industri halal ini adalah langkah konkret membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat daya saing daerah.
- DIGITALISASI DAN KLINIK USAHA**  
Melalui pelatihan e-commerce dan layanan Klinik Usaha, ratusan pelaku usaha sudah merasakan pangsangannya nyata dari legalitas hingga akses permodalan. Pemerintah hadir memberi pelatihan dan memantapkan usaha kecil tumbuh, naik kelas, dan berkelanjutan.

● ● ● Swipe untuk program berikutnya

mah warga. Selain itu, Mall Pelayanan Publik (MPP) kini beroperasi sebagai pusat layanan perizinan dan non-perizinan terpadu satu pintu.

“Ini bentuk komitmen kami memangkas birokrasi berbelit dan mendekatkan layanan ke masyarakat,” tambahny.

Kemudian, Sektor kesehatan, program BASANAK digulirkan untuk menekan stunting melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita. Sementara di bidang pendidikan, beasiswa bagi keluarga kurang mampu hingga jenjang sarjana terus disalurkan, termasuk Beasiswa Tahfidz.

“Pemkab juga memberikan insentif bagi guru mengaji, guru PAUD, Ustadz dan Ustadzah, serta meluncurkan pro-

seperti pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan bantuan sarana produksi.

Salah satu program unggulan adalah Program Keluarga Maju (PKM) yang diluncurkan 18 Desember 2025. Pada tahap awal, keluarga penerima bantuan langsung mendapatkan dana transfer ke rekening kepala keluarga sebagai modal usaha produktif, disalurkan langsung melalui rekening Bank Sumsel Babel

“PKM dirancang sebagai intervensi berbasis keluarga produktif. Jadi bukan sekadar bantuan konsumtif, tapi mendorong kemandirian ekonomi,” jelas Mursalin.

Lanjutnya, Pemkab juga menyalurkan santunan kematian Rp3 juta, bantuan tunai fakir miskin, optimalisasi zakat

bangunan infrastruktur sentra produksi tetap berjalan mulai dari jalan usaha tani, irigasi, embung hingga tambak,” imbuhnya.

“Pemkab Muba juga mengoptimalkan pendanaan non-APBD melalui forum CSR serta sinergi dengan Pemprov dan APBN. Pembangunan harus tetap jalan,” tambahny.

Selain itu, ditambahkan Mursalin, arah pembangunan 2026 difokuskan pada penguatan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal.

“Satu tahun ini adalah fondasi. Tantangan ke depan lebih kompleks, tetapi dengan kolaborasi eksekutif, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkab Muba optimistis Muba semakin berdaya saing,” pungkasnya. ●



## Perjanjian Dagang RI-AS **TONGGAK BARU KEMITRAAN STRATEGIS**

Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa perjanjian dagang Indonesia–Amerika Serikat yang tengah dirampungkan menjadi pilar baru penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Gala Iftar Dinner Business Summit yang digelar di U.S. Chamber of Commerce, Washington, DC, Rabu 18 Februari 2026, sebagai bagian dari agenda resmi Presiden selama kunjungan kerja di Amerika Serikat.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa kunjungan ke Washington kali ini tidak bersifat seremonial, melainkan membawa misi strategis untuk menuntaskan perundingan perjanjian perdagangan komprehensif antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Saya juga berada di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Kita telah bernegosiasi sangat intens selama beberapa bulan terakhir, dan saya pikir kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa pem-

bahasan perjanjian tersebut mencakup penguatan kerja sama lintas sektor, mulai dari perdagangan barang dan jasa, investasi, hingga kolaborasi pelaku usaha.

Sejumlah kesepakatan pendukung juga telah ditandatangani oleh institusi pemerintah dan dunia usaha kedua negara.

Salah satu fokus utama yang disepakati adalah tindak lanjut isu keseimbangan perdagangan, yang selama ini menjadi perhatian bersama. Pemerintah Indonesia menilai kesepakatan ini akan membuka ruang pasar yang lebih luas bagi produk nasional, sekaligus memperkuat iklim investasi dan rantai pasok bilateral.

“Saya menantikan perjanjian perdagangan ini sebagai dorongan besar bagi kelanjutan kemitraan ekonomi dan kerja sama ekonomi antara Amerika Serikat dan Indonesia,” tegas Presiden.

Gala Iftar Business Summit menjadi bagian penting dari rangkaian agenda

Presiden di Amerika Serikat yang menitikberatkan pada diplomasi ekonomi, penguatan hubungan dengan kalangan dunia usaha, serta konsolidasi dukungan terhadap agenda pembangunan Indonesia.

Selain menghadiri forum bisnis, Presiden juga melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan ekonomi dan pejabat terkait untuk membahas peluang kerja sama strategis di sektor energi, industri manufaktur, teknologi, pertanian modern, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk memperluas mitra perdagangan nontradisional, meningkatkan kualitas investasi asing, serta mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak melupakan peran historis Amerika Serikat dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945-1949. Dukungan tersebut, menurut Presiden, menjadi fondasi moral yang terus mewarnai hubungan kedua negara.

"Indonesia akan selalu mengingat peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam sejarah kami. Amerika Serikat berperan penting dalam mendukung perjuangan kemerdekaan kami," ujarnya.

Meski Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif dan tradisi non-blok, Presiden menegaskan bahwa prinsip tersebut tidak mengurangi komitmen Indonesia untuk membangun persahabatan yang erat dengan Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya.

"Kami selalu ingin melihat kehadiran Amerika yang kuat di Indonesia. Kami selalu mencoba meyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia adalah sahabat sejati, meskipun mungkin secara politik kita memiliki tradisi non-blok," tegas Presiden.

Presiden menilai situasi global saat ini menuntut kolaborasi yang lebih erat di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, serta tantangan ekonomi dunia. Dalam konteks tersebut, Presiden menyambut baik upaya kepemimpinan Amerika Serikat untuk mendorong stabilitas dan perdamaian internasional.

"Saya melihat ada kemauan besar dari

para pemimpin Amerika Serikat saat ini untuk menciptakan iklim perdamaian. Mungkin ini tidak memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya kita harus mencoba," ujar Presiden.

Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat secara menyeluruh, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pada kerja sama politik, bantuan kemanusiaan, perlindungan lingkungan, serta penguatan

yang dilaporkan sebelumnya sekitar US\$7 miliar. Kesepakatan ini mencerminkan berbagai peluang investasi dan ekspansi perdagangan yang substansial.

Dalam pertemuan bisnis dengan pelaku usaha AS, Ketua KADIN Indonesia Arsjad Rasjid Bakrie menyebut bahwa hubungan dagang kedua negara telah mencapai sekitar US\$45 miliar, dan kemampuan untuk memperluas kerja sama melalui investasi strategis diang-



peran kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan.

"Kami menginginkan hubungan terbaik dengan Amerika Serikat di semua bidang," pungkas Presiden.

Sebagai bagian dari inisiatif perdagangan, puluhan kesepakatan bisnis antara perusahaan Indonesia dan AS telah ditandatangani di Washington.

Data terbaru menunjukkan bahwa nilai MoU yang disaksikan oleh Presiden Prabowo mencapai sekitar US\$38,4 miliar mencakup sektor pertambangan, energi, agribisnis, tekstil, teknologi, dan manufaktur jauh melebihi angka awal

gap sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC menandai fase baru diplomasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Momentum ini sekaligus menegaskan bahwa perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat yang tengah dirampungkan diposisikan sebagai tonggak strategis dalam membangun kemitraan jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan, stabilitas, dan kepentingan bersama. ●

# 95% RAKYAT JABAR PUAS DENGAN DEDI MULYADI

SETAHUN SUDAH DEDI MULYADI MENJABAT GUBERNUR JAWA BARAT, KINERJA POSITIFNYA MENJULANG. BAGAIMANA TAHUN-TAHUN SELANJUTNYA?



Dua hari menjelang ulang tahun pelantikannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan penghargaan kepada segenap pihak yang telah bekerja sama dan mendukungnya selama tahun pertama masa jabatannya. Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, berkat kerja sama yang solid, terjadi banyak perubahan positif dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Ia mencontohkan, rasa aman di Jabar semakin meningkat. Ketertiban pun se-

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar yang telah banyak berkontribusi kepada Jabar, salah satunya pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa yang akan dilakukan di Kabupaten Bandung Barat. "Rumah Sakit ini bermanfaat, Pak. Warga saya lebih baik diperiksa di rumah sakit oleh dokter daripada diperiksa oleh jaksa Pak," ungkap KDM yang dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025.

Selain itu, Kang Dedi pun menyam-

Politik Indonesia dalam sigi 30 Januari hingga 8 Februari 2026. Survei ini mencakup 800 responden yang tersebar di desa-desa di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Hasilnya, Pendiri dan Peneliti Indikator Prof. Burhanudin Muhtadi mengungkapkan, hasil survei lembaga menunjukkan kepuasan atas kinerja KDM sebagai Gubernur Jawa Barat mencapai 95.5 persen atau sangat tinggi. Jika dibanding dengan temuan pada Mei tahun lalu, tingkat kep-



makin baik, termasuk kondisi lalu lintas yang kian tertata. Dalam kaitan ini, atas nama masyarakat Provinsi Jawa Barat, KDM mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Jabar yang telah menciptakan kondisi provinsi ini semakin aman dan kondusif.

"Kasus pembunuhan terungkap dalam waktu satu hari. Kemudian premanisme dalam waktu sekejap ditahan, geng motor ditangani dengan baik. Saya ucapkan terima kasih," ucap KDM dalam acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba, Knalpot Nonstandar dan Penyerahan Pinjam Pakai Barang Bukti Ranmor, di Halaman Parkir Gedung Reskrim Polda Jabar, Rabu, 18 Februari 2026.

paikan apresiasi kepada jajaran Kodam III Siliwangi, khususnya kepada Asintel Kodam III Siliwangi. Ia berharap agar Kodam III Siliwangi bisa menjadi mitra terbaik di wilayah Provinsi Jawa Barat.

KDM juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Jabar serta jajaran atas dukungan selama dirinya menjabat gubernur. "Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, terima kasih dukungan terhadap gubernur. Bisa jadi langkah-langkah saya banyak kontroversinya, tapi Pak Ketua selalu konsisten memberikan dukungan," kata KDM.

Sebelumnya, kinerja setahun KDM sebagai Gubernur mendapatkan validasi dari Lembaga Survei Indikator

uasan masyarakat relatif stabil bahkan cenderung meningkat.

"Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Barat, tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi selama hampir satu tahun masa jabatannya," ujamya di El Hotel Bandung, Senin, 16 Februari 2026.

Menurut Burhanuddin, hanya sebagian kecil kelompok warga yang keuasannya kurang dari 90 persen, itu pun tidak kurang dari 80 persen di tiap segmen demografi dan wilayah Jawa Barat. ●



Haji 2026

## PENINGKATAN LAYANAN, PENURUNAN BIAYA, PEROMBAKAN KUOTA

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, orientasi utama kebijakan haji 2026 adalah memastikan seluruh proses berlangsung pasti, patuh regulasi, dan akuntabel, dengan dampak langsung pada kenyamanan serta keselamatan jemaah.

"Pelayanan jemaah menjadi prioritas utama. Setiap proses harus jelas, pasti, patuh terhadap regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kenyamanan dan keselamatan jemaah," ujar Irfan Yusuf dalam Media Briefing Outlook Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Di Arab Saudi, Kemenhaj mengawal ketat penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi melalui koordinasi langsung dengan otoritas setempat agar layanan sesuai standar dan tepat waktu.

Di dalam negeri, kesiapan penerbangan, asrama haji, dan embarkasi disiapkan sejak awal melalui sinergi lintas kementerian, maskapai, dan pengelola bandara.

Pelunasan biaya haji reguler dan khusus dipantau secara terintegrasi dengan sistem layanan dan pemvisaan guna mencegah hambatan administrasi.

Layanan kesehatan menjadi pilar utama melalui pemenuhan istithaah

kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan di Tanah Air dan Arab Saudi.

"Keselamatan jemaah adalah hal yang tidak bisa ditawar. Pemenuhan istithaah kesehatan dan kesiapan layanan medis menjadi perhatian utama pemerintah," tegas Irfan.

Untuk mendukung operasional lapangan, rekrutmen petugas dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi, disertai penguatan pendidikan serta pelatihan, termasuk pelayanan bagi jemaah rentan.

Kemenhaj juga memperkuat akurasi dan sinkronisasi data jemaah, pemetaan risiko, serta mitigasi dini melalui pengawasan dan koordinasi lintas sektor.

Pada 2026, pemerintah menerapkan sistem pembagian kuota haji antarprovinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Regulasi tersebut memberi dasar pembagian kuota berdasarkan daftar tunggu, proporsi penduduk muslim, atau kombinasi keduanya.

Pemerintah memilih daftar tunggu sebagai rujukan utama karena dinilai paling adil dan memberikan kepastian keberangkatan.

"Dengan ketentuan baru ini, UU 14/2025 menghadirkan reformasi mendasar dalam sistem pembagian kuota haji," ujar Irfan dalam keterangan resminya.

Pendekatan ini diambil setelah melalui kajian mendalam, pembahasan bersama DPR, serta masukan publik, mengingat pola lama berbasis populasi muslim kerap menimbulkan kesenjangan antar-daerah.

Kemenhaj menetapkan 525 kloter haji 2026 untuk memberangkatkan 204.362 jemaah dan petugas dari 16 embarkasi.

Penerbangan dilayani oleh dua maskapai yakni Garuda Indonesia: 277 kloter (102.502 jemaah) dan Saudia Arabian Airlines: 248 kloter (101.860 jemaah)

Pembagian ini ditujukan untuk mempercepat arus keberangkatan sekaligus menjaga pemerataan layanan. Embarkasi Surabaya tercatat sebagai pengirim jemaah terbanyak secara nasional, melayani jemaah dari Jawa Timur, Bali,

dan Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sebesar Rp87.409.365,45, turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, Bipih yang dibayar langsung oleh jemaah ditetapkan sebesar Rp54.193.806,58. Sisanya ditutup melalui nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Biaya terendah tercatat di Embarkasi Aceh sebesar Rp45.109.422, sedangkan tertinggi di Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.645.422.

Pelunasan tahap pertama dijadwalkan pada 24 November–23 Desember 2025. Prioritas diberikan kepada jemaah tunda, jemaah yang masuk kuota 2026, serta jemaah lanjut usia dengan alokasi khusus 5 persen. Tahap kedua direncanakan pada Januari–Februari 2026.

Indonesia memperoleh kuota haji 2026 sebanyak 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

Rata-rata masa tinggal jemaah di Arab Saudi ditetapkan selama 41 hari. Untuk transportasi udara, pemerintah mensyaratkan pesawat berusia maksimal 15 tahun dan memenuhi standar teknis keselamatan.

Layanan darat dan layanan puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dipastikan dikelola secara profesional. Pemerintah menegaskan tidak ada jemaah Indonesia yang akan ditempatkan di kawasan Mina Jadid.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak juga menegaskan isi utama penyelenggaraan haji 2026, yakni haji yang berkeadilan, berempati, dan berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan lansia, merupakan hal pokok yang wajib dipahami dan dihidupkan oleh seluruh petugas haji.

"Kalau kita membaca sejarah, kita ingat sekali salah satu pesan utama dari Haji Wada. Dalam khutbah tersebut, Rasulullah SAW secara tegas menyampaikan pesan kepedulian: jaga dan muliakan perempuan-perempuan kalian," ujar Wamenhaj. •

**DAFTAR LENGKAP KUOTA HAJI REGULER INDONESIA 2026**

- Jawa Timur - 42.409 jemaah
- Jawa Tengah - 34.122 jemaah
- Jawa Barat - 29.643 jemaah
- Sulawesi Selatan - 9.670 jemaah
- Banten - 9.124 jemaah
- DKI Jakarta - 7.819 jemaah
- Sumatera Utara - 5.913 jemaah
- Lampung - 5.827 jemaah
- Nusa Tenggara Barat - 5.798 jemaah
- Aceh - 5.426 jemaah
- Sumatera Selatan - 5.354 jemaah
- Kalimantan Selatan - 5.187 jemaah
- Riau - 4.682 jemaah
- Sumatera Barat - 3.928 jemaah
- DI Yogyakarta - 3.748 jemaah
- Jambi - 3.576 jemaah
- Kalimantan Timur - 3.189 jemaah
- Sulawesi Tenggara - 2.063 jemaah
- Kalimantan Barat - 1.858 jemaah
- Sulawesi Tengah - 1.753 jemaah
- Bali - 1.698 jemaah
- Kalimantan Tengah - 1.559 jemaah
- Sulawesi Barat - 1.450 jemaah
- Bengkulu - 1.357 jemaah
- Kepulauan Riau - 1.085 jemaah
- Bangka Belitung - 1.077 jemaah
- Papua - 933 jemaah
- Maluku Utara - 785 jemaah
- Gorontalo - 608 jemaah
- Maluku - 587 jemaah
- Nusa Tenggara Timur - 516 jemaah
- Kalimantan Utara - 489 jemaah
- Papua Barat - 447 jemaah
- Sulawesi Utara - 402 jemaah. \*



## Haji 2026 Naik Kelas PETUGAS FOKUS LAYANI JEMAAH HINDARI NYAMBI IBADAH

Pemerintah resmi mengukuhkan 1.622 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1447 H/2026 M untuk melayani jemaah Indonesia di Arab Saudi. Pengukuhan digelar di Lapangan Galaxy Makodau I Halim, Jakarta, Jumat 30 Januari 2026 dan dipimpin langsung Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf.

**D**alam sambutannya, Menteri yang akrab disapa Gus Irfan itu membacakan amanat Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa peran petugas menjadi kunci utama dalam menjaga kualitas layanan, keselamatan, serta perlindungan jemaah.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya kukuhkan saudara-saudara sebagai petugas haji Indonesia 1447 H/2026 M. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dalam pengabdian," ujar Gus Irfan.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menjelaskan bahwa jumlah petugas yang dinyatakan siap bertugas berasal dari 1.636 peserta pendidikan dan pelatihan (diklat).

Sebanyak 14 peserta tidak melan-

jutkan, terdiri atas enam orang karena faktor kesehatan dan delapan lainnya berdasarkan hasil evaluasi kedisiplinan serta kesiapan.

Menurut Puji, seluruh rangkaian diklat dirancang untuk memastikan kesiapan petugas secara fisik, mental, teknis, dan manajerial.

"Tujuan utamanya membentuk petugas yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan optimal kepada jemaah," katanya.

Tahun ini, Indonesia menargetkan pelayanan bagi sekitar 221 ribu jemaah haji. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerapkan pola pelatihan yang lebih ketat dan terintegrasi lintas sektor.

Diklat tatap muka dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede pada 10-30 Januari 2026, dilanjutkan pembekalan

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya kukuhkan saudara-saudara sebagai petugas haji Indonesia 1447 H/2026 M. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dalam pengabdian"



daring pada 2-11 Februari 2026, serta pelatihan lanjutan berbasis kloter pada April 2026. Materi meliputi kebijakan penyelenggaraan haji 2026, mekanisme pelayanan jemaah, komunikasi layanan, bahasa Arab, pembentukan fisik, serta simulasi tugas lapangan.

Hasil survei internal menunjukkan indeks performa peserta berada di atas 90 persen, mencerminkan peningkatan kesiapan tim dan koordinasi lapangan.

Di sisi lain, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa orientasi utama petugas haji adalah melayani jemaah, bukan menjadikan penugasan sebagai sarana berhaji secara pribadi.

"Kami ingin memastikan niatnya adalah menjadi petugas haji, bukan 'nebeng' berhaji," tegas Dahnil saat pengukuhan di Asrama Haji Pondok Gede.

Ia menyebutkan, seluruh petugas telah mengikuti pendidikan intensif selama 20 hari dengan pola semi-militer, termasuk pembinaan disiplin, kekompakan tim, dan uji ketahanan fisik. Model "masuk barak" diterapkan untuk membangun mental melayani, ketangguhan, serta kemampuan bekerja di bawah tekanan tinggi.

Pemerintah juga menerapkan aturan ketat selama diklat. Peserta yang tidak memenuhi standar kesehatan, kedisiplinan, dan kinerja langsung dinyatakan gugur.

Dahnil Anzar mengungkapkan 14 peserta Diklat PPIH Arab Saudi 2026 dicopot selama proses pelatihan.

Menurut Dahnil, pencopotan peserta dalam Diklat PPIH Arab Saudi 2026 merupakan bagian dari seleksi ketat untuk memastikan hanya petugas yang benar-benar siap melayani jemaah haji yang diloloskan.

Dahnil menyebut salah satu penyebab peserta dicopot adalah faktor kesehatan, termasuk hasil Medical Check-Up (MCU) yang menunjukkan penyakit serius seperti gangguan jantung, sehingga tidak direkomendasikan dokter untuk melanjutkan diklat.

Selain kesehatan, kedisiplinan dan kehadiran penuh dalam Diklat PPIH 2026 juga menjadi penilaian utama. Peserta diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan semi-militer tanpa

pengecualian.

Dahnil menegaskan, Kementerian Haji tidak melakukan intervensi terhadap kelulusan peserta. Penilaian sepenuhnya berada di tangan panitia dan instruktur, berdasarkan standar ketat seperti disiplin, kesiapan fisik, serta komitmen melayani jemaah.

Ia juga mengingatkan agar peserta tidak menjadikan posisi petugas haji sebagai cara untuk "nebeng naik haji." Menurutnya, menjadi petugas adalah

maupun gelar akademik selama bertugas agar sepenuhnya memosisikan diri sebagai pelayan jemaah," tegasnya.

Bahwa beban kerja di Tanah Suci menuntut stamina ekstra dan kesiapsiagaan tanpa jeda, terutama pada fase puncak ibadah di Makkah dan Madinah. Karena itu, aspek kebugaran, empati, serta respons cepat terhadap kebutuhan jemaah, khususnya lansia dan kelompok rentan, menjadi fokus pembinaan.



amanah besar, sedangkan berhaji hanyalah bonus.

Sementara itu, Wakil Ketua Diklat PPIH Arab Saudi Kolonel (Purn) Mufiono menegaskan tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun. Peserta dari berbagai latar belakang, termasuk pejabat dan akademisi, diperlakukan sama.

"Selain itu, seluruh petugas diminta menanggalkan identitas sosial, jabatan,

Menteri Haji dan Umrah juga mengingatkan para petugas untuk terus menjaga kebugaran, kemampuan bahasa, dan keterampilan layanan menjelang keberangkatan. Pemerintah menilai peningkatan kualitas petugas menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan haji 2026 yang lebih tertib, aman, dan manusiawi, sekaligus memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap layanan haji Indonesia. ●



## Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran KLAIM KEBERHASILAN MBG HINGGA PEMBERANTASAN KORUPSI

Pada 14 Februari lalu, tepat dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada banyak klaim pencapaian keberhasilan di dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.

**D**i sisi lain kritik kepemimpinan juga ikut mengalir deras sebagai bentuk penyeimbang klaim keberhasilan yang disampaikan pemerintah.

Sehari sebelum mencapai genap dua tahun kepemimpinan, Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto, menganugerahkan tanda kehormatan negara kepada para penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguat rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kepedulian Polri dan instansi terkait terhadap masa depan gizi anak bangsa.

Penganugerahan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya tersebut berlangsung dalam rangkaian peresmian dan peletakan batu pertama 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri di Jakarta, Jumat (13/2).

Penghargaan diberikan kepada jaja-

ran pejabat Polri, pimpinan Badan Gizi Nasional, kepala daerah kepolisian, hingga tokoh masyarakat sektor pangan, yang dinilai memiliki jasa besar dan kontribusi nyata dalam memperkuat implementasi MBG, menjaga kelancaran rantai pasok SPPG Polri, serta mendukung kebijakan nasional di bidang gizi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik.

Penganugerahan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian peresmian dan groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis (SPMBG) serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri, Jumat (13/2/2026).

Penghargaan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Bintang Jasa dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Satyalancana Wira Karya, yang ditandatangani di Jakarta pada 13 Februari 2026.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dr. Ir. Dadan Hindayana menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama karena dinilai berhasil melaksanakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sempat diejek dan diramalkan gagal, bahkan kalangan profesor. Namun menurut Prabowo, program MBG hadir untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu.

Hingga kini, MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, dengan 22.275 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi.



“Kita mau menyelamatkan anak-anak Indonesia. Saya ingin sisa hidup saya untuk membangun Indonesia.” ujar Presiden Prabowo Subianto.

### Pemberantasan Korupsi

Presiden Prabowo Subianto juga menyinggung tantangan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

Bahkan Presiden Prabowo blak-blakan mengatakan upaya pemerintah untuk membereskan korupsi selalu mendapat perlawanan dari kelompok koruptor. Prabowo menyebut kelompok ini sebagai garong-garong.

“Kita harus menjaga Republik ini, kita menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap

kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, menegakkan keadilan, menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini, menyerang balik,” kata dia.

Ia juga menegaskan tidak akan mundur dalam menegakkan hukum, keadilan, dan konstitusi meski mendapat serangan balik berupa upaya adu domba dan kerusuhan.

Prabowo menyatakan semakin yakin dan berani menjalankan komitmen tersebut setelah mendapat dukungan dan dorongan moral dari MUI.

Bahkan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka ikut menegakkan

pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen utama untuk memiskinkan pelaku korupsi di Indonesia.

Menurutnya, hukuman penjara saja tidak memadai jika negara tidak dibekali kekuatan hukum untuk merebut kembali harta hasil kejahatan yang telah merugikan rakyat.

“Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi,” ujar Gibran, Jumat (13/2).

Gibran menilai aturan ini sangat relevan untuk memulihkan kerugian negara, terutama dalam kondisi di mana pelaku tindak pidana melarikan diri ke luar negeri atau meninggal dunia.

“RUU Perampasan Aset menjadi

semakin relevan dan penting untuk pemulihan aset negara, apalagi ketika pelaku tindak pidana meninggal atau kabur ke luar negeri,” tambah Gibran.

### Kepuasan Publik ke Prabowo Naik

Mayoritas publik menyatakan puas terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tingkat kepuasan tersebut paling tinggi ditemukan pada kelompok generasi muda, khususnya Generasi Z.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 12,2 persen responden mengaku sangat puas dan 60,6 persen menyatakan cukup puas



terhadap program MBG. Dengan demikian, total warga yang merasa puas mencapai 72,8 persen

Jadi memang yang sangat puas 12,2 persen dan cukup puas 60,6 persen,” ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2/2026).

Sementara itu, responden yang merasa kurang puas tercatat sebesar 19,9 persen dan yang menyatakan tidak puas sama sekali sebesar 4,5 persen.

Adapun responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 2,8 persen. “Yang kurang puas atau tidak puas total 24,4 persen,” jelas Burhanuddin. ●

## Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran PEMERINTAH BERJALAN NYARIS TANPA SAINGAN

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto menyentuh hampir 80 persen. Namun dibalik tingginya angka kepuasan, pentingnya menjaga keseimbangan demokrasi. Minimnya oposisi yang vokal di parlemen dikhawatirkan melemahkan fungsi check and balances.

**D**isi lain, tantangan ekonomi tetap menjadi ujian nyata. Publik masih menanti realisasi janji penciptaan jutaan lapangan kerja baru serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan.

Ada tiga program unggulan dari Prabowo Subianto yang nyaris berjalan mulus karena tidak ada hambatan yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa.

Kedua, diplomasi aktif di panggung internasional. Interaksi Prabowo dengan pemimpin dunia seperti Donald Trump dan Xi Jinping dinilai membangun rasa percaya diri dan kebanggaan nasional di tengah ketidakpastian global.

Ketiga, agenda pemberantasan korupsi yang dinilai tegas dan cepat, memberi kesan pemerintah tidak main-main dalam penegakan hukum.

Sementara PDIP yang diharapkan sebagai partai oposan tampaknya tidak berani bermain sendiri. Mereka lebih suka disebut partai penyeimbang.

Dalam pidato politiknya Megawati Soekarnoputri menegaskan PDI Perjuangan tidak memosisikan sebagai oposisi, namun tidak juga berkoalisi dengan penguasa. PDI Perjuangan adalah partai ideologis, partai penyeimbang yang selalu memihak pada rakyat.

Politikus muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro, menegaskan bahwa posisi tersebut bukan soal pro atau kontra terhadap pemerintah.

"PDI Perjuangan tidak berada di dalam pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya.

Sebagai partai penyeimbang, PDIP mengklaim siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis. Artinya, tidak asal menentang, tetapi juga tidak menutup mata terhadap kebijakan yang bermasalah.

### Rakyat Beralih Menjadi Oposisi

Tidak semua program pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan mulus di lapangan, ribuan kasus keracunan di Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) membuat rakyat bergerak untuk men-



lak.

Sepanjang Januari 2026 ini kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meluas. Sebagian besar siswa mengalami keracunan saat menyantap makanan dari MBG. Seperti SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, 521 siswa dan 24 guru diduga keracunan MBG serta beberapa daerah juga mengalami hal serupa.

Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sepanjang Januari 2026 terdapat 1.242 orang yang diduga menjadi korban

cunan massal, risikonya sangat besar karena mereka juga belum mampu mendeskripsikan kondisi kesehatannya dengan jelas," ujar Jasra dalam keterangannya.

Berbagai gerakan menolak MBG cukup ramai di media sosial. Sayangnya hingga kini tidak ada partai politik yang berani mendukung gerakan ini karena semuanya sebagian jatah proyek ratusan triliun rupiah itu.

Hal ini membuat sejumlah kalangan merasa resah hingga sejumlah akademisi, aktivis hingga pegiat demokrasi

praktik demokrasi semakin rusak, korupsi merajalela.

Kemudian pelanggaran HAM terus terjadi, kondisi lingkungan rusak, hukum tidak tegak, kondisi fiskal alami krisis, PHK terus terjadi. Kondisi Indonesia bakal makin terpuruk kedepan andai situasi tidak berubah dari sisi hukum, sosial dan politik.

Dia mengatakan suara kelompok kritis pun diperlukan agar arah hukum, sosial dan politik di Indonesia bisa berubah ke perbaikan.

Sikap ekstrem juga ditunjukkan Ket-



keracunan MBG seperti dikutip Jogja Student. Sementara berdasarkan perhitungan BBC, sepanjang Januari 2026 jumlah korban mencapai 1.929 orang, tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama pemerintah untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini terjadi karena berulangnya kasus keracunan makanan yang menimpa siswa dan santri di sejumlah daerah.

"Ketika anak-anak mengalami kera-

membentuk organisasi yang disebut Barisan Oposisi Indonesia (BOI) di Indonesia.

Sejumlah hadir dalam acara pembentukan BOI, yakni guru besar UI Sulistyowati Irianto, akademisi UNJ Ubedilah Badrun, Ekonomi Anthony Budiawan dan Peneliti Senior Ikrar Nusa Bakti. Turut juga hadir Direktur LIMA Ray Rangkuti, aktivis demokrasi STF Ali Imran, peneliti Arif Sutanto, Komite Pemilih Indonesia

Ubedilah Badrun atau akrab disebut kang Ubed menyebut keresahan terhadap kondisi Indonesia membuat sejumlah tokoh membentuk BOI, situasi saat ini sesungguhnya berada di tepi jurang,

ua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto mengkritisi kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Bodoh.

Bahkan Tiyo juga melaporkan kasus kematian seorang bocah 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memilih mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pensil ke UNICEF.

Mahasiswa jurusan Filsafat ini mengatakan, Makanan Bergizi Gratis (MBG) itu merampas anggaran pendidikan. Dari Rp 757 triliun anggaran pendidikan yang diklaim sebagai 22 persen APBN, Rp 223 triliun dirampas untuk MBG. •



# HARAPAN PENINGKATAN LAYANAN BPJS KESEHATAN

Terbersit harapan layanan dan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan lebih memuaskan warga setelah perombakan jajaran direksi dan pengawasnya. Selamat dan semoga sukses mengemban amanat.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas serta Direksi BPJS Kesehatan, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mayjen (Pur) dr Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan menggantikan Ali Ghufon Mukti.

Sekilas mengenai Dirut Prihati, dokter kelahiran Solo, Jawa Tengah, 29 Maret 1967 ini sudah memiliki jam terbang tinggi di dunia kesehatan sejak muda. Karier Prihati di dunia kesehatan dimulai sebagai Perwira Kesehatan Batalyon Kopassus, yang diembannya dari Mei 1995 hingga Juli 2002. Selain bidang klinis, dia juga merambah dunia akademik sebagai dosen.

“Penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional”

Rekam jejaknya antara lain menjabat Dekan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan untuk 2023-2025. Prihati pun tercatat sebagai Dosen Ilmu Penyakit Jantung di universitas tersebut mulai Agustus 2023. Di bidang akademik, ia telah mengabdikan sebagai Dosen Ilmu Penyakit Dalam di Universitas Jenderal Ahmad Yani sejak Januari 2008 hingga sekarang. Selain itu, sejak Juni 2019, ia dipercaya sebagai bagian dari Panel Ahli Dokter Kepresidenan Republik Indonesia.

Selain menetapkan Prihati sebagai Direktur Utama, Presiden Prabowo juga mengangkat Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianty Permanasari, dan Sutopo Patria Jati sebagai anggota direksi. Pergantian jajaran Dewan Direksi dan mulai efektif pada



Kamis, 19 Februari 2026.

Beriringan dengan itu, jajaran Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga mengalami perubahan. Presiden menunjuk Lula Kamal sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan untuk periode 2026-2031. Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan periode 2026-2031 terdiri dari tujuh orang. Mereka adalah Stevanus Adrianto Passat sebagai Ketua dari unsur pekerja, Murti Utami Adyanto dan Rukijo dari unsur pemerintah, serta Afif Johan dari unsur pekerja. Selain itu, unsur pemberi kerja diwakili Paulus Agung Pambudhi dan Sunarto, sementara Lula Kamal masuk sebagai tokoh masyarakat. Komposisi ini diharapkan mencerminkan keterwakilan berbagai kepentingan dalam sistem jaminan sosial nasional.

“Penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ungkap Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah dalam keteran-

gan resmi, Kamis, 19 Februari 2026

Alasan formal rangkaian pergantian kali ini adalah berakhirnya masa jabatan jajaran Direksi dan Dewan Pengawas periode sebelumnya (2021-2026), termasuk Direktur Utama Ali Ghufron Mukti, telah berakhir pada Februari 2026. Selain itu pergantian Direksi dan Pengawas BPJS Kesehatan pun terkait penyegaran sumber daya manusia, upaya memperbaiki tata kelola, serta kesinambungan pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) untuk periode 2026-

2031.

Tambahan pula, jajaran direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga mengemban amanat efisiensi operasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Sejalan dengan visi pemerintah, perombakan ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pemeriksaan medis dan percepatan solusi kesehatan bagi masyarakat kecil sehingga pemerataan layanan kesehatan benar-benar terwujud. •



# TIMBAL BALIK IDEALNYA SALING MENGUNTUNGKAN

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) secara resmi menandatangani perjanjian perdagangan timbal balik. Apa saja isinya?

Secara garis besar, kesepakatan kedua negara mengatur upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk menciptakan perdagangan yang timbal balik dengan AS. Sebagai catatan, sejauh ini Indonesia mengalami surplus perdagangan dengan Negeri Paman Sam itu.

Perjanjian dagang terbaru antara Indonesia dan AS ini dikenal sebagai *Agreements on Reciprocal Trade (ART)*. Secara resmi ART tercapai melalui pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Kesepakatan ini menetapkan tarif timbal balik sebesar 19 persen untuk mayoritas produk ekspor-impor di antara kedua negara, dengan be-

berapa pengecualian strategis.

Poin-poin penting dalam perjanjian dagang AS-Indonesia antara lain Tarif Timbal Balik 19 persen. Secara umum, Indonesia akan membayar tarif sebesar 19 persen untuk produk yang diekspor ke AS, dan sebaliknya, AS akan dikenakan tarif yang sama untuk produk yang masuk ke Indonesia.

Namun, ada pula Tarif 0 persen untuk produk tertentu. Beberapa komoditas mendapatkan pengecualian tarif hingga 0 persen. Dari Indonesia, produk tekstil, kelapa sawit, kopi, kakao, dan teh bebas bea masuk jika masuk AS. Total produk bebas bea masuk AS dari Indonesia mencakup hingga 1.819 pos tarif.

“Baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah nol persen,”



“Baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah nol persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Jumat, 20 Februari 2026.

“Khusus untuk produk tekstil dan pakaian Indonesia, AS juga akan memberikan tarif 0 persen dengan mekanisme tariff rate quota. Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” ujarnya

Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan dalam kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berfokus pada kerja sama di bidang perdagangan.

Ia memastikan substansi ART kali ini berbeda dibandingkan sejumlah perjanjian serupa yang dibahas dengan negara lain. Dalam kesepakatan den-



gan AS, pasal-pasal di luar kerja sama ekonomi disepakati untuk tidak dimasukkan dan hanya berfokus pada aspek perdagangan serta investasi.

“Berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain, Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerja sama ekonomi. Antara lain untuk terkait pengembangan reaktor nuklir, kemudian terkait dengan kebijakan Laut China Selatan, terkait dengan pertahanan dan keamanan

perbatasan. Sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia dan AS telah menuntaskan perundingan tarif dagang tersebut di Washington, Kamis waktu setempat, 20 Februari 2026. Penandatanganan ART dilakukan oleh Menko Airlangga bersama Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer. ●





# SIAPKAN 4 PROGRAM STRATEGIS LAYANAN TERBAIK BAGI JEMAAH

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TIDAK HANYA MENYANGKUT ASPEK RITUAL, TETAPI JUGA TATA KELOLA, PERLINDUNGAN JEMAAH, DAN NILAI PERADABAN.

Pemerintah saat ini fokus pada empat penguatan program strategis sebagai fondasi perbaikan layanan haji secara berkelanjutan.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan haji yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah melalui penguatan program strategis dan layanan menyeluruh.

Empat program strategis tersebut meliputi penurunan biaya haji, penataan kebijakan waiting list, penguatan ekspor produk Indonesia untuk kebutuhan haji, serta pembangunan Kampung Haji sebagai pusat layanan jemaah Indonesia di Arab Saudi.

"Penurunan biaya haji tidak berarti menurunkan kualitas layanan. Justru efisiensi yang kami lakukan diarahkan untuk memastikan layanan tetap optimal dan hak jemaah tetap terpenuhi," tegas Menhaj.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan waiting list terus diperbaiki agar lebih transparan dan adil, sementara penguatan ekspor produk Indonesia menjadi bagian dari upaya mendorong sukses ekonomi haji. Adapun pembangunan Kampung Haji diharapkan menjadi simbol kehadiran negara sekaligus pusat layanan yang memudahkan jemaah Indonesia.

Mengusung tagline "Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan", Gus Irfan menegaskan bahwa kebijakan haji saat ini disesuaikan dengan demografi jemaah. Data menunjukkan bahwa 56% jemaah haji Indonesia adalah perempuan, sehingga penguatan layanan dan peningkatan jumlah petugas pembimbing ibadah perempuan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.

"Haji harus ramah, aman, dan manusiawi. Lansia, disabilitas, dan perempuan harus merasa dilayani, bukan disu-

litkan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan kondisi prima jemaah sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan ibadah haji. Ia mengaitkan hal ini dengan konsep istitha'ah, yang menjadi syarat utama keberangkatan.

Istithaah mencakup tiga aspek utama, yakni istithaah syar'iyah berupa pemahaman ilmu manasik yang memadai, istithaah maliyah terkait kemampuan pembiayaan, serta istithaah sholihiyah yang menekankan kesiapan kesehatan.

"Haji adalah ibadah yang sakral.

kelompoknya masing-masing.

Melalui penguatan program strategis dan pelayanan yang berorientasi pada jemaah, pemerintah berharap penyelenggaraan haji ke depan semakin berkualitas, inklusif, dan memberikan pengalaman ibadah yang aman, nyaman, serta bermakna bagi seluruh jemaah Indonesia.

### Sepakati Penguatan Layanan Haji 1447 H/2026 M

Komitmen pelayanan terbaik bagi tamu Allah kembali ditegaskan dalam pertemuan khusus antara Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, dan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Taufiq F. Al-Rabiah, yang berlangsung di Kantor Da-

gang Arab Saudi.

Pertemuan dua hari ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi bilateral dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 1447 H/2026 M. Dalam pembicaraan terbatas tersebut, kedua menteri sepakat bahwa keberhasilan pelayanan jemaah merupakan tanggung jawab bersama.

"Kesuksesan dalam melayani tamu Allah bukan hanya keberhasilan satu pihak, melainkan tanggung jawab kolektif. Karena itu, seluruh kendala dalam persiapan penyelenggaraan haji tahun ini harus kita inventarisir dan carikan solusi bersama," ujar Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf di Jeddah.

Menhaj Irfan, secara khusus menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait aspek layanan, mulai dari penguatan

sistem Nusuk, pengelolaan DAM, akomodasi, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, hingga integrasi berbagai layanan pendukung lainnya. Seluruh poin tersebut menjadi perhatian bersama untuk memastikan pelayanan berjalan lebih efektif, terukur, dan humanis.

Kedua menteri juga menegaskan bahwa fokus utama pembahasan adalah keberhasilan penyelenggaraan haji 2026. ●



Jemaah harus benar-benar siap secara ilmu, fisik, dan mental. Kesadaran membangun pola hidup sehat menjadi bagian dari ibadah itu sendiri," kata Gus Irfan.

Ia juga menegaskan bahwa jemaah haji diharapkan mampu beribadah secara mandiri, tidak bergantung sepenuhnya pada pihak lain, termasuk KBI-HU, melainkan minimal mengandalkan kekompak dan kesadaran dalam



# IKN SIAP HUNI, JADI KOTA HIJAU DAN MODERN BAGI ASN KEMENAG

SIAP BERTUGAS DAN MEN-  
EMPATI HUNIAN YANG ADA DI  
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Pegawai Kementerian Agama (Kemenag) siap bertugas dan menempati hunian yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk memastikan kesiapan itu Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i meninjau berbagai kawasan dan fasilitas di IKN.

"Ini semakin memperkuat arah kebijakan pemerintahan presiden Prabowo dalam mewujudkan pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan berkelanjutan. IKN adalah simbol transformasi Indonesia ke depan," ujar Wamenag saat menanam pohon flamboyan di Taman Plaza Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol komitmen pembangunan kota hijau dan modern.

"Pembangunan IKN tidak hanya bertujuan menghadirkan pusat pemerintahan baru, tetapi juga membangun peradaban yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan," terangnya.

Wamenag juga menyoroti kesiapan hunian ASN, mulai dari staf hingga pejabat setingkat eselon I, sebagai indikator kesiapan IKN dalam menyediakan hunian berkualitas bagi aparatur negara. Kesiapan kawasan perkantoran Kementerian/Lembaga dan Kementerian Koordinator di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang dapat menampung hingga 16.000 personel dinilai akan mempercepat proses pemindahan ASN ke IKN.

"Keberadaan ASN yang tinggal dan beraktivitas penuh di IKN harus dipastikan sebelum Presiden dan Wakil Presiden melakukan kegiatan rutin di sini," tegasnya.

Di bidang kesehatan, Wamenag menyampaikan bahwa keberadaan tiga rumah sakit bertaraf internasional di IKN akan mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif.

Terkait kawasan peribadatan, Wamenag menekankan bahwa fasilitas keagamaan di IKN tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol persatuan nasional dan kebhinekaan Indonesia.

Masjid Negara di IKN ditargetkan siap digunakan untuk salat tarawih

pada awal Ramadan 1447 H/2026 M, sementara gereja Katolik dan rumah uskup ditargetkan dapat digunakan pada Mei 2026.

"Fasilitas rumah ibadah bagi umat Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu direncanakan akan dibangun pada tahap pengembangan selanjutnya," ungkapnya.

Wamenag berharap, aktivasi IKN sebagai pusat kerja pemerintahan semakin bergerak seiring pemindahan ASN dan kesiapan berbagai sarana pendukung, mulai dari perkantoran, hunian, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga fasilitas lainnya.

### Masjid IKN Siap Gelar Salat Tarawih Ramadan

Wamenag juga memastikan kesiapan Masjid IKN untuk salat tarawih pada awal Ramadan 1447 H/ 2026 M.

2 Ramadan beliau sudah dapat melaksanakan salat tarawih dan menyampaikan tausiyah di masjid ini. Setelah peninjauan, Insya Allah target tersebut dapat tercapai," kata Wamenag.

"Kami juga melihat progres pemasangan karpet dan penyiapan ruang-ruang yang diperlukan yang saat ini sedang dalam proses. Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa harapan ini pada prinsipnya sudah terpenuhi," lanjutnya.

Sementara Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Timur Kementerian Pekerjaan Umum, Efy Biaktama Meliala menjelaskan, masjid ini dirancang memiliki kapasitas sekitar 29.000 jemaah pada tahap pertama. Pada tahap pengembangan berikutnya, kapasitas ditargetkan meningkat hingga sekitar 60.000 jemaah.



**"Keberadaan ASN yang tinggal dan beraktivitas penuh di IKN harus dipastikan sebelum Presiden dan Wakil Presiden melakukan kegiatan rutin di sini"**

"Kami bersyukur hari ini dapat bekerja dan melakukan peninjauan ini. Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan kesiapan masjid, khususnya menjelang rencana pelaksanaan salat tarawih pada awal Ramadan di kawasan IKN," ujar Wamenag.

Ia mengungkapkan rencana Menteri Agama Nasrudin Umar untuk melaksanakan salat tarawih dan menyampaikan tausiyah di Masjid IKN pada 2 Ramadan 1447 Hijriah.

"Bapak Menteri secara khusus meminta saya memastikan bahwa pada

"Di kawasan masjid, terdapat bangunan utama untuk area salat, plaza, minaret, area penunjang, serta area komersial yang akan digunakan sebagai Plaza Ramadan. Berdasarkan koordinasi dengan Otorita IKN, akan tersedia sekitar 100 tenant, dengan 20 tenant berada di area ini," ujar Efy.

Bangunan masjid terdiri atas empat lantai dengan berbagai fasilitas, termasuk ruang salat, ruang pertemuan, ruang VIP, area edukasi, serta fasilitas ramah disabilitas seperti lift, ramp, dan tangga. Desain masjid mengadopsi konsep sorban tergulung yang berputar searah jarum tawaf saat ibadah haji. ●



# MEUTYA HAFID PANTANG SURUT DI TENGAH GEMPURAN AKAL IMITASI

Berlatar belakang media dan anggota parlemen di Komisi I DPR, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid hirau pula pada dampak pesat perkembangan kecerdasan buatan, artificial intelligence atau akal imitasi. Bagaimana gagasannya?

**D**i hadapan komunitas lamanya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengemukakan urgensi perlunya kolaborasi strategis antara pemerintah, ekosistem pers, dan platform digital. Menurut mantan jurnalis TV dan anggota komisi I DPR ini, kolaborasi itu adalah kunci jawaban menghadapi tantangan era transformasi digital, termasuk disinformasi dan dampak kecerdasan artifisial.

“Pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam praktik jurnalistik harus tetap menjadikan kepentingan publik sebagai kompas utama,” kata Meutya pada Konvensi Nasional Media Massa bertema “Pers, AI dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” sebagai rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten, Minggu, 8 Februari 2026.

Ia mengemukakan pula, di tengah derasnya arus konten digital dan meningkatnya disinformasi, pers tidak boleh mengorbankan kepercayaan publik demi kecepatan, algoritma, atau efisiensi teknologi. “Dalam gelombang transformasi digital dan AI, kehadiran pers yang kredibel dan independen bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan dasar demokrasi,” ujar Meutya Hafid.

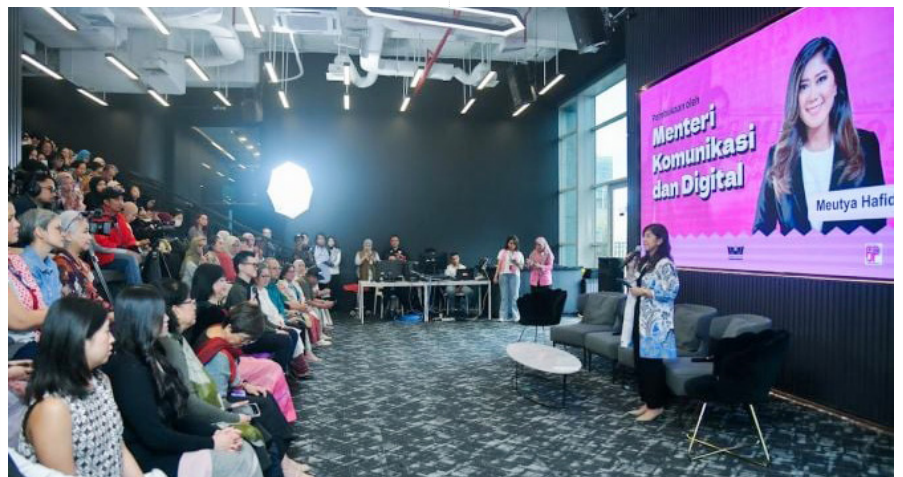
Meutya menekankan pula, di tengah kompleksitas tantangan baru, peran pers justru semakin krusial sebagai penjaga integritas informasi dan ruang publik yang sehat. Terkait soal ini, sambungnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers, telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, dan masa depan jurnalisme.

Kebijakan itu menekankan pada perlindungan konten, etika penggunaan AI, dan keabsahan berita. Antara lain, regulasi AI dan Panduan Etika yang dirilis Dewan Pers lewat Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang panduan penggunaan AI dalam karya jurnalistik. Salah satu poin peraturan

itu menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia, melainkan hanya sebagai alat bantu, dengan jurnalis sebagai pengendali utama untuk menjamin akurasi.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 (Publisher Rights) yang mewajibkan platform digital bertanggung jawab atas konten jurnalistik. Ini bertujuan mengatasi ketimpangan ekosistem digital dan melindungi media lokal dari ancaman AI yang mengambil alih konten.

“Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola AI harus human-centric (berpusat pada manusia) dan jurnalistik harus tetap humanis di tengah gempuran AI untuk menjaga kepercayaan publik,” tandas Meutya. ●





# **STOK PANGAN AMAN, BAHKAN LEBIH DARI CUKUP**

Kementerian Pertanian memastikan stok pangan selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026 aman bahkan lebih dari cukup. Dari sembilan bahan pokok utama, sebagian besar sudah berada pada posisi swasembada bahkan mampu menembus pasar ekspor.



Sementara untuk komoditas yang masih membutuhkan impor, ketersediaannya juga dipastikan mencukupi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa ketersediaan dan stabilitas stok pangan nasional dalam kondisi aman dan terkendali

“Stok pangan kita aman. Untuk dua bulan ke depan lebih dari cukup. Bahkan sampai Idulfitri, stok 11 sampai 12 bahan pokok tersedia dan dalam kondisi aman,” kata Amran.

“Bawang merah kita sudah swasembada, bahkan ekspor. Tahun 2025 eksportnya sekitar seribu ton. Jadi yang kita benahi sekarang adalah rantai pasoknya agar harga tetap stabil,” ujarnya.

Menurut Mentan Amran, pemerintah terus memperkuat pengendalian harga melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), terutama pada komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, dan telur.

“Beras itu yang paling strategis. Ini yang kita jaga betul. Targetnya jelas, petani untung, konsumen tersenyum,” ungkap Mentan Amran.

Mentan juga menyampaikan posisi cadangan beras pemerintah yang terus menguat. Saat ini stok beras nasional mencapai 3,4 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,8 juta ton pada akhir Februari, serta menembus 4 juta ton pada Maret 2026.

“Stok bantuan pangan sangat cukup. SK sudah ada dan penyalurannya kita percepat,” jelasnya.

### Ada Lonjakan Produksi Beras

Penguatan stok tersebut ditopang oleh lonjakan produksi beras nasional sepanjang tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras Indonesia Januari–Desember 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024.

Momentum peningkatan produksi diperkirakan berlanjut pada awal 2026. Potensi produksi beras Januari–Maret 2026 diproyeksikan mencapai 10,16 juta ton, naik 1,39 juta ton atau 15,79 persen dibanding periode yang sama

tahun sebelumnya.

Mentan Amran menegaskan, keberadaan cadangan pemerintah menjadi kunci utama stabilisasi harga, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah, tidak boleh absen dalam menjaga pasar agar tidak terjadi gejolak harga.

“Kalau pemerintah tidak punya cadangan, bagaimana cara intervensi pasar? Itu sebabnya negara harus hadir dan punya stok yang kuat,” tegasnya.

“Alhamdulillah, Nataru kemarin relatif stabil. Itulah yang kita jaga sekarang. Ramadan dan Idul Fitri harus lebih baik, harga terkendali, masyarakat tenang,” pungkasnya.

Sementara hasil resmi BPS pada 2 Februari 2026, potensi produksi beras pada periode Januari hingga Maret

ya.” kata Ateng

Seiring dengan meningkatnya potensi produksi beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan pada potensi produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada awal tahun 2026.

“Potensi produksi padi gabah kering giling (GKG). Potensi produksi padi pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2026 diperkirakan mencapai 17,65 juta ton GKG atau mengalami peningkatan 2,41 juta ton GKG atau meningkat sebesar 15,80% jika dibandingkan dengan periode sama pada tahun sebelumnya.” imbuh Ateng.

Kinerja produksi padi GKG sepanjang tahun 2025 pun menunjukkan pertumbuhan yang sejalan dengan



2026 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 15,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan kondisi pertanaman padi yang relatif kondusif serta proyeksi panen yang cukup kuat di berbagai sentra produksi.

“Potensi produksi beras khusus untuk potensi pada bulan Januari sampai dengan Maret 2026 diperkirakan ya mencapai 10,16 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 1,39 juta ton atau 15,79% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

peningkatan produksi beras.

“Produksi padi sepanjang Januari sampai dengan Desember tahun 2025 tercatat 60,21 juta ton GKG atau mengalami peningkatan sebesar 7,06 juta ton GKG setara dengan peningkatan 13,29% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024.”

Selain produksi, BPS turut mencatat proyeksi kenaikan luas panen padi pada periode Januari hingga Maret 2026.

“Potensi luas panen padi Januari sampai dengan Maret 2026, Diperkirakan mencapai 3,28 juta hektar atau mengalami peningkatan sebesar 0,44 juta hektar atau 15,32% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.” paparnya. ●

“Stok pangan kita aman. Untuk dua bulan ke depan lebih dari cukup. Bahkan sampai Idulfitri, stok 11 sampai 12 bahan pokok tersedia dan dalam kondisi aman”

# EFISIENSI PEMKOT PALEMBANG TEMBUS RP10 MILIAR

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai merealisasikan kebijakan penataan ulang dan penggabungan kantor organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari transformasi birokrasi dan pelayanan publik.

**K**ebijakan ini digagas langsung oleh Wali Kota Palembang, Ratu Dewa dengan target utama menghadirkan pelayanan terpadu dalam satu lokasi, sekaligus memangkas beban belanja operasional pemerintah daerah.

Ratu Dewa menegaskan, penataan kantor OPD tidak sekadar relokasi fisik, tetapi diarahkan untuk membangun pola one stop service yang lebih terintegrasi.

"Tujuan kita jelas, meningkatkan pelayanan. Baik pemberi layanan mau-

pun masyarakat sebagai penerima akan merasakan proses yang lebih cepat karena sistemnya terpusat," ujar Ratu Dewa.

Dari sisi efisiensi, Pemkot mencatat penghematan awal lebih dari Rp10 miliar. Penghematan tersebut berasal dari penurunan biaya rutin, antara lain layanan kebersihan, pengamanan, listrik, serta konektivitas internet.

"Pada tahap awal saja, lebih dari Rp10 miliar bisa kita amankan," tegasnya.

Selain mengurangi beban anggaran,



kebijakan ini juga menekan kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana.

“Dengan skema kantor bersama, pegawai dapat lebih fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi, terutama dalam melayani masyarakat,” lanjut Ratu Dewa.

Penataan perkantoran mulai berjalan di sejumlah titik strategis.

Gedung eks DPMPSTSP Jakabaring kini difungsikan sebagai pusat bersama bagi Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Dinas Sosial.

Kantor kecamatan menjadi lokasi integrasi sejumlah unit pelayanan, yakni UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Badan Pendapatan Daerah, UPTD Dinas Lingkungan Hidup, UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta penyuluh keluarga berencana.

Skema tersebut memungkinkan masyarakat mengakses beberapa layanan dasar dalam satu kawasan, tanpa harus berpindah lokasi perkantoran.

Dari sisi pengelolaan keuangan dan aset, kebijakan ini dinilai sejalan dengan strategi efisiensi belanja daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, Ahmad Nashir menjelaskan bahwa penggabungan kantor dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka pendek hingga jangka panjang.

“Dalam jangka pendek, penataan ini diupayakan menggunakan APBD seminimal mungkin, bahkan jika memungkinkan tanpa tambahan APBD. Dalam jangka panjang, gedung yang tidak lagi digunakan dapat dimanfaatkan kembali agar memberi pemasukan baru bagi daerah,” ujarnya di Palembang.

Menurut Ahmad Nashir, sejumlah aset perkantoran yang kosong tidak boleh menjadi beban perawatan. Seluruhnya akan diarahkan agar memiliki nilai ekonomi melalui berbagai skema pemanfaatan.

Ahmad Nashir menilai, konsep perkantoran pemerintahan saat ini harus mengikuti perkembangan teknologi dan pola kerja modern.

“Sekarang bekerja bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tidak se-

mua harus tatap muka karena banyak layanan yang bisa dijalankan melalui media digital,” katanya.

Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan gedung perkantoran dinilai tidak lagi harus tersebar di banyak lokasi.

“Tidak perlu kantor terlalu banyak. Kantor bisa digabung, asalkan fasilitasnya memadai dan efisien,” tegasnya.

Setelah tahap penggabungan selesai, Pemkot Palembang akan memasuki fase optimalisasi aset.

Selain efisiensi anggaran dan optimalisasi aset, penggabungan kantor OPD diarahkan untuk memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, terutama OPD yang memiliki keterkaitan fungsi, seperti sektor infrastruktur, lingkungan, dan pelayanan dasar.

Pemanfaatan fasilitas bersama dinilai mampu mempercepat koordinasi, memperpendek alur pengambilan keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. ●



# CAKUPAN MBG BARU MENYENTUH 82 PERSEN SEKOLAH

Dinas Pendidikan Kota Palembang memperkuat pengawasan lapangan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas, keamanan, serta ketepatan distribusi makanan bagi peserta didik.

**K**epala Dinas Pendidikan Kota Palembang, M Affan Prapanca mengatakan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mengawal jalannya program di sekolah-sekolah sekaligus memperkuat koordinasi lintas lembaga.

"Tim kami siapkan untuk pengawasan, sekaligus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Ini juga sebagai langkah pencegahan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Affan di Palembang.

Berdasarkan data terbaru Dinas Pendidikan Kota Palembang, hingga saat ini Program MBG telah menjangkau sekitar 82 persen sekolah dari total 1.300 satuan pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Program menyasar jenjang TK, SD, hingga SMP, baik sekolah negeri maupun swasta.

Artinya, masih terdapat sekitar 18 persen sekolah yang belum menerima layanan MBG.

Affan menjelaskan, hambatan utama pemerataan program masih terletak

pada keterbatasan KPPG (dapur penyedia makanan bergizi) yang menjadi bagian krusial dalam rantai distribusi MBG.

"Saat ini Program MBG sudah diterima sekitar 82 persen sekolah, mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta. Namun memang masih ada sekolah yang belum terlayani karena keterbatasan KPPG," ujarnya.

Menurut Affan, Badan Gizi Nasional masih berada dalam proses pemenuhan kebutuhan dapur MBG di Palembang. Sebagian dapur telah beroperasi dan melayani distribusi makanan, sementara sejumlah lokasi lainnya masih berada dalam tahap kajian kelayakan.

"Kami berharap BGN segera menyiapkan pemenuhan. Saat ini masih dalam proses, sebagian dapur sudah difungsikan dan dapur lainnya masih dalam tahap kajian," jelasnya.

la menambahkan, percepatan penyediaan KPPG menjadi kunci agar distribusi makanan bergizi dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata.

"Kami berharap pemenuhan ini bisa



segera diselesaikan agar distribusi MBG dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata," katanya.

Selain kendala infrastruktur dapur, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga mencatat adanya sejumlah sekolah, khususnya sekolah swasta, yang memilih tidak mengikuti Program MBG.

Keputusan tersebut diambil karena pihak sekolah menilai telah memiliki program pemenuhan gizi secara mandiri bagi para siswa.

Meski demikian, Disdik Palembang menegaskan tetap membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan sekolah-sekolah tersebut agar tujuan besar program tetap sejalan, yakni peningkatan kualitas gizi peserta didik di seluruh wilayah kota.

Sebagai langkah penguatan pelaksanaan, tim pengawas Disdik Palembang kini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kualitas makanan yang diterima siswa, ketepatan waktu dan jalur distribusi dan keamanan konsumsi di lingkungan sekolah.

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh standar pelaksanaan MBG dapat diterapkan secara konsisten di lapangan, sekaligus meminimalkan potensi risiko bagi peserta didik.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya memperbaiki asupan gizi anak usia sekolah, meningkatkan kesehatan, serta mendukung konsentrasi belajar di ruang kelas.

Pemerintah Kota Palembang berharap, dengan terpenuhinya seluruh sarana pendukung, terutama ketersediaan dapur penyedia makanan bergizi, program ini dapat segera dinikmati oleh seluruh siswa tanpa terkecuali, sehingga manfaat peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dirasakan secara merata di seluruh satuan pendidikan.

Sementara, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso memastikan harga kebutuhan pangan masih dalam kondisi terkendali meski ada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski MBG dinilai menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan harga pan-

gan, namun Budi Santoso mengklaim harga sangat terpengaruh dengan ketersediaan stok dan pasokan.

Menurutnya, potensi peningkatan permintaan akibat MBG tidak menyebabkan harga melonjak karena pemerintah juga meningkatkan produksi.

"Saat ada MBG permintaan naik, tali produksi juga kita tingkatkan. Jadi harga tetap stabil," ujar Budi saat meninjau Pasar KM 5 Palembang, beberapa waktu lalu.

Dari hasil pengecekan di pasar tersebut, sejumlah harga kebutuhan pokok masih berada pada level aman dan bahkan lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Adapun harga kebutuhan pokok di

pasar KM 5 pada Kamis 12 Februari 2026 untuk harga daging ayam tercatat Rp 38.000 per kilogram, di bawah HET Rp 40.000 per kilogram. Telur ayam dijual Rp 29.000 per kilogram lebih rendah dari HET Rp 30.000 per kilogram.

Lalu harga daging sapi masih sesuai HET Rp 140.000 per kilogram. Namun, Mendag menemukan adanya kenaikan harga pada komoditas cabai rawit. Cabai rawit di Pasar KM 5 dijual Rp 80.000 per kilogram, naik dibanding harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp 57.000 per kilogram.

Budi menjelaskan, kenaikan harga pangan tersebut bukan disebabkan stok panen yang bermasalah tetapi karena faktor cuaca.

"Untuk panen tidak ada masalah. Hanya saja karena sering hujan, jadi proses memanen yang terlambat," katanya. ●

**"Tim kami siapkan untuk pengawasan, sekaligus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Ini juga sebagai langkah pencegahan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,"**





# BOLEH BERBEDA **ASAL TETAP** BERPUASA

1 RAMADAN 1447 HIJRIAH JATUH PADA HARI KAMIS, 19 FEBRUARI 2026

## Penetapan awal puasa Ramadan berbeda lagi setelah pernah terjadi beberapa kali di tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana menyikapinya?

**P**ernah terjadi di masa lalu, dan dapat berulang di masa mendatang. Itulah penetapan awal Ramadan, bulan penting dalam almanak umat Islam terutama untuk menjalankan kewajiban ritual puasa beserta rangkaianannya hingga berakhir dengan perayaan Idul Fitri di awal bulan berikutnya, Syawal. Bukan hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia.

Di Indonesia, pemerintah menetapkan awal Ramadan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan ini berlandaskan hasil Sidang Isbat (penetapan) 1 Ramadan 1447 Hijriyah yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026.

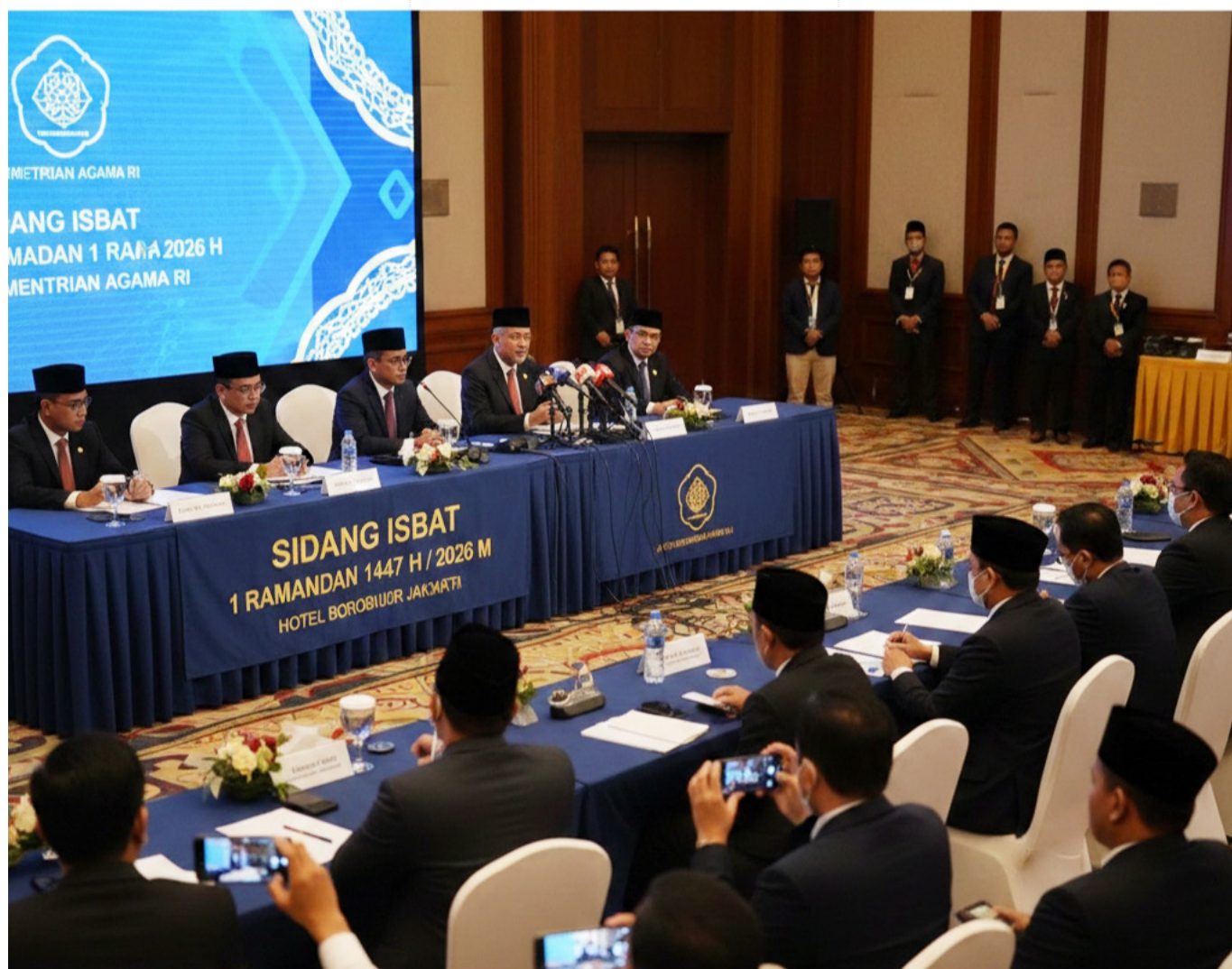
"Sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026," ujar Menag dalam konferensi pers usai Sidang Isbat yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Hadir dalam sidang Isbat yang tayang langsung di berbagai media, antara lain Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, dan Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad. Hadir pula para pimpinan ormas Islam, para ahli falak dan astronomi dari perguruan tinggi, serta perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Informasi Geospasial, Planetarium Jakarta, dan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

Kesepakatan penetapan awal Ramadan di sidang itu tercapai melalui jalan musyawarah. "Musyawarah mengacu pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam, serta dikonfirmasi oleh petugas pengamat di sedikitnya 96 titik pengamatan di seluruh Indonesia," sambung Menag Nasaruddin.

Ia mengemukakan, berdasarkan paparan, ketinggian hilal di seluruh wilayah NKRI masih berada di bawah ufuk, dengan rentang antara  $-2^{\circ} 24' 43''$  ( $-2,41^{\circ}$ ) hingga  $-0^{\circ} 55' 41''$  ( $-0,93^{\circ}$ ). Sementara itu, sudut elongasi berada pada kisaran  $0^{\circ} 56' 23''$  ( $0,94^{\circ}$ ) hingga  $1^{\circ} 53' 36''$  ( $1,89^{\circ}$ ). Makna data teknis ini, menurut perhitungan (hisab), po-



sisi hilal di seluruh wilayah NKRI belum memenuhi kriteria visibilitas (penampakan) hilal yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yaitu tinggi hilal minimum 3° dan sudut elongasi minimum 6,4°.

“Dengan demikian, bukan hanya belum memenuhi kriteria imkan ruyat, tetapi secara astronomis hilal belum mungkin terlihat, sehingga secara hisab data hilal hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” ungkap Menag.

Pertimbangan kedua, hasil hisab tersebut terkonfirmasi oleh laporan para perukyat yang diturunkan Kementerian Agama. Tahun ini, ruyat dilaksanakan di 96 titik pengamatan yang tersebar di seluruh provinsi di Indo-

mencerminkan persatuan kita sebagai anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik,” pesannya.

Apabila terdapat sebagian umat Islam yang memiliki keyakinan berbeda dalam penetapan awal Ramadan, tambah Menag Nasaruddin, kami mengimbau agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan. “Jadikan perbedaan sebagai kekayaan dan mozaik indah bangsa Indonesia. Kita sudah berpengalaman hidup dalam perbedaan, tetapi tetap kokoh dalam persatuan,” tuturnya.

Nah, yang berbeda di sini antara lain organisasi Islam Muhammadiyah yang lebih dulu menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriyah jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. “Keputusan untuk berpuasa

1 Ramadhan 1447 H jatuh pada hari Kamis Pahing, tanggal 19 Februari 2026,” kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Selasa, 17 Februari 2026 dikutip dari web resmi PBNU.

Gus Yahya, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dalam rangka penentuan awal Ramadhan 1447 H, Tim Ruyatul Hilal PBNU yang berada di bawah koordinasi Lembaga Falakiyah



nesia. “Tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh titik pengamatan. Bahkan di negara-negara Islam lainnya, belum ada yang memenuhi kriteria imkan ruyat, dan kalender Hijriah Global versi Turki pun tidak memulai Ramadan esok hari,” ujar Menag.

Berdasarkan hasil hisab dan tidak adanya laporan ruyat hilal, sambungannya, sidang Isbat menyepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Menag berharap keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam di Indonesia memulai ibadah puasa secara bersama-sama. “Semoga momentum ini menjadi simbol kebersamaan umat Islam sekaligus

pada 18 Februari (bukan) mendahului alam, melainkan wujud ketaatan pada sistem hisab (perhitungan) yang memberikan kepastian ilmu dan komitmen pada persatuan matra di seluruh muka bumi,” ungkap penjelasan Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Muhammad Rofiq Muzakkir dikutip dari web resmi PP Muhammadiyah.

Sedangkan organisasi Islam lainnya, Nahdlatul Ulama, mengikuti ketetapan Sidang Isbat yang menggunakan metode ruyatul hilal (pengamatan bulan sabit baru). “Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan ikhbar bahwa awal bulan Ramadhan atau tanggal



PBNU pada Selasa, 29 Sya’ban 1447 H atau 17 Februari 2026 M, telah melakukan ruyatul hilal bil f’li di 45 lokasi yang telah ditentukan di seluruh Indonesia. Laporan LF PBNU di seluruh lokasi tempat dilakukannya ruyatul hilal bil f’li itu tidak berhasil melihat hilal, sehingga umur bulan Sya’ban 1447 H adalah 30 hari atau dengan kata lain

istikmal (disempurnakan).

Tak urung perbedaan itu berkembang hingga ranah digital. Figur muda NU Ainun Najib yang tercatat bermukim di Singapura, misalnya, mengemukakan pandangannya di saluran media sosial. Ainun dengan nama layar AI Noon mengutip hadis Rasulullah: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Bila penglihatan kalian tertutup mendung maka sempurnakanlah bilangan

mendahului terlihatnya hilal di manapun di muka bumi, tapi tetap memutuskan untuk taqlid ikut perintah ormas, ya monggo mawon (silakan saja)," ungkap AI Noon.

Sedangkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam menjadikan Ramadan 1447 Hijriyah sebagai kanopi sosial yang mampu meredam konflik dan menjaga keharmonisan di tengah kehidupan modern. Khususnya di era media sosial.

genai agama sebagai naungan sakral yang mengutamakan makna (nomos) dan tatanan kehidupan manusia di dunia: Menjadi perisai mencegah perpecahan, kekacauan, bahkan konflik.

Dalam konteks itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH M Cholil Nafis menyerukan jangan sampai ada gesekan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah (persaudaraan muslim). "Saya berharap masyarakat sudah dewasa. Ini masalah khilafiyah



(bulan Sya'ban) menjadi tiga puluh hari."

Menurut dia, penetapan awal Ramadan dengan melihat hilal adalah "perintah", bukan soal hitung-hitungan atau hisab. "Kalau sudah paham betul, bahwa tarawih Anda pada 17 Februari mendahului wujudul hilal (Indonesia Timur) dan puasa anda

"Dengan berbagai macam informasi dan postingan yang memberi suasana panas dalam kehidupan sosial kebangsaan kita, maka puasa harus menjadi kanopi sosial kita," ungkap Haedar, Selasa, 17 Februari 2026.

Kanopi (tenda atau naungan) sosial merujuk pada Sacred Canopy yang dikemukakan oleh Peter L Berger men-

fikr, masalah perbedaan pemikiran. Dan tidak perlu dibawa-bawa pada perpecahan, tapi dijadikanlah perbedaan ini untuk kita belajar lebih banyak," ujarnya dikutip dari web resmi MUI.

Akhirnya, sampai jumpa di akhir Ramadan, serta Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriyah yang juga dapat berbeda. Minal aidin al faizin. Mohon maaf lahir batin. ●

# SAAT TEPAT MEMOTRET EKONOMI

“Kalau ingin melihat bagaimana potret ekonomi rakyat yang sebenarnya, lihatlah pada saat menjelang dan selama Idul Fitri. Di sana kita melihat arus uang, arus barang, dan daya beli masyarakat bertemu dalam satu titik ujian yang paling nyata.” (Soemitro Djojohadikusumo)

**T**erlepas dari perbedaan awal Ramadan dan juga penetapan hari raya Idul Fitri, momentum yang sama juga kerap menjadi cerminan situasi ekonomi makro nasional. Sebagaimana ucapan Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, ayahanda Presiden Prabowo Subianto, menjelang dan selama Idul Fitri adalah saat tepat memotret dan merekam situasi dan kondisi perekonomian masyarakat yang mayoritasnya adalah umat Islam.

Pak Cum, sapaan akrab Prof Soemitro, memandang Lebaran bukan hanya sebagai hari raya agama, melainkan ujian ketahanan ekonomi. Ia menekankan bahwa statistik pertumbuhan ekonomi di atas kertas seringkali bersifat “puncak gunung es”. Namun, saat Lebaran, kita dapat melihat kenyataan yang konkret. Dari sisi logistik, apakah sistem ekonomi nasional mampu menyediakan kebutuhan pokok? Dari sisi ketahanan ekonomi, seberapa besar kenaikan harga yang sanggup ditanggung rakyat?

Selain itu, Prof Soemitro juga menggunakan momen Lebaran untuk mengkritik kesenjangan. Ia pernah mengemukakan bahwa jika saat Lebaran hanya kalangan tertentu yang bisa berbelanja mewah sementara harga pangan

mencekik rakyat bawah, maka ada yang salah dengan distribusi pendapatan (ia menyebutnya sebagai “ekonomi biaya tinggi”).

Nah, dalam kaitan itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan stimulus lebaran pada awal 2026. Stimulus Lebaran adalah rangkaian kebijakan ekonomi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama periode Ramadan dan Idul Fitri, saat konsumsi rumah tangga biasanya melonjak tajam.

Untuk periode Lebaran 2026 (1447 H), pemerintah telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp12,83 triliun. Fokus utamanya adalah meringankan beban biaya hidup dan memfasilitasi mobilitas masyarakat melalui berbagai program. Stimulus ini mencakup diskon

Pemerintah menargetkan insentif ini dapat dinikmati oleh 1,2 juta penumpang. Selanjutnya, diskon tarif sebesar 30 persen dari tarif dasar juga diberlakukan untuk angkutan laut PT Pelni (Persero) pada periode 11 Maret–5 April 2026 dengan target 445.000 penumpang. Sementara itu, untuk angkutan penyeberangan ASDP, pemerintah membebaskan 100 persen biaya jasa kepelabuhanan (pas pelabuhan) pada periode 12–31 Maret 2026. Targetnya, 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Di sektor angkutan udara, diskon tarif berkisar antara 17 persen—18 persen disiapkan untuk kelas ekonomi penerbangan domestik pada periode 14–29 Maret 2026, dengan target keterisian 3,3 juta penumpang.

Selain itu, guna memecah konsentrasi



tarif transportasi dengan total anggaran Rp911,16 miliar hingga penyaluran bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun guna menjaga daya beli masyarakat.

“Pada tahun ini dalam rangka libur hari besar nasional pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi total anggarannya adalah Rp911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 10 Februari 2026.

Insentif untuk moda transportasi mencakup kereta api, angkutan laut, penyeberangan, hingga angkutan udara. Untuk moda kereta api, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan diskon tarif sebesar 30 persen untuk periode perjalanan 14–29 Maret 2026.

mobilitas sekaligus memudahkan perencanaan perjalanan, pemerintah juga menetapkan skema kerja Work From Anywhere (WFA) atau kerja di mana saja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Skema tersebut bukan merupakan hari libur tambahan, melainkan fleksibilitas lokasi kerja yang berlaku selama lima hari, yakni pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Belum lagi insentif untuk masyarakat kelas bawah (Desil 1–4), berupa bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Bantuan ini akan disalurkan selama dua bulan, yang dimulai pada bulan Ramadan atau Februari 2026, dengan target penerima manfaat sebanyak 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). ●

# info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



**INFO PASANG IKLAN**  
**NUR AISAH**  
**0815-1157-6312**

IKLAN BACK COVER

**RP 75.000.000**

IKLAN DISPLAY/HAL

**RP 50.000.000**

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

**RP 65.000.000**

CENTER SPREAD

**RP 80.000.000**

*Kami Hadir  
 Memberikan  
 info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



• iNOVASI • UNTUK NEGERI •  
**info indonesia**

••• EDISI # 64 FEBRUARI 2026

<https://www.infoindonesia.id>



**HERMAN DERU - CIK UJANG**  
**CETAK SEJARAH**  
**ANGKA KEMISKINAN DI SUMSEL TURUN 1 DIGIT**